

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

KABUPATEN POHUWATO

TAHUN 2025-2045

Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pohuwato

KATA PENGANTAR

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dirancang dalam tiga jangka waktu, yakni jangka panjang, menengah, dan pendek. Hal ini bertujuan untuk memberikan panduan serta arah dalam mencapai tujuan dan visi daerah, sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pohuwato dalam rentang waktu 20 tahun dapat dilakukan dengan terarah, berkelanjutan, efektif, dan efisien, sambil memperhatikan kepentingan masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagai landasan strategis untuk pencapaian tujuan tersebut. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pohuwato disusun untuk menetapkan arah pembangunan jangka panjang. Dokumen RPJPD ini disusun dengan merangkum berbagai masukan dan data pendukung dari berbagai sumber. Pengumpulan data dianggap sangat penting karena memberikan informasi yang diperlukan untuk memahami kondisi lapangan dengan akurat.

Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan rancangan awal RPJPD Kabupaten Pohuwato. Meskipun kami menyadari bahwa dokumen perencanaan ini masih perlu perbaikan dan penyempurnaan, kami mengharapkan masukan dan koreksi untuk meningkatkan kualitasnya. Masukan tersebut akan sangat berharga sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen turunannya.

BUPATI POHUWATO

Saipul A. Mbuinga

DAFTAR ISI

	Hal
BAB I PENDAHULUAN	**1**
1.1. Latar Belakang	4
1.2. Dasar Hukum	3
1.3. Hubungan Dokumen RPJP Kabupaten Pohuwato dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	5
1.4. Maksud dan Tujuan	7
1.5. Sistematika	7
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	**9**
2.1. Aspek Geografi dan Demografi	9
2.1.1. Aspek Geografi	9
2.1.2. Aspek Demografi	23
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	26
2.2.1. Aspek Kesejahteraan Ekonomi	26
a. Pertumbuhan Ekonomi	26
b. Inflasi	29
c. Kemiskinan	30
d. Ketenagakerjaan	31
e. Indeks Gini	33
f. Indeks Pembangunan Manusia	34
2.2.2. Aspek Kesejahteraan Sosial	35
a. Pendidikan	35
b. Kesehatan	37
c. Kesetaraan Gender	38
2.3. Aspek Daya Saing Daerah	38
2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah	38
a. PDRB Per Kapita	38
b. Indeks Inklusi Keuangan	39
a. Indeks Ekonomi Hijau	40
2.3.2. Daya Saing SDM	41
a. Pendidikan	41
b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	42
2.3.3. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah	43
a. Jalan dan Jembatan	43
b. Sumber Daya Air dan Irigasi	44
c. Air Minum dan Sanitasi	44

d. Perumahan dan Permukiman 45
2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi 46
a. Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat 46
b. Indeks Daya Saing Daerah 46
c. Indeks Inovasi Daerah 47
d. Penanaman Modal 48
2.4. Aspek Pelayanan Umum 48
2.4.1. Tata Kelola Pemerintah 48
2.4.2. Keuangan Daeah 49
2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025 51
2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik 56
2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah 62

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH 67
3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah 68
3.1.1. Bidang Pendidikan 68
3.1.2. Bidang Kesehatan 70
3.1.3. Bidang Sarana dan Prasarana Daerah 71
3.1.4. Permasalahan Pembangunan Aspel Daya Saing Daerah 74
3.2. Isu Strategis 76
3.2.1. Penelaahan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) 81
3.2.2. Penelaahan Terhadap Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 83
3.2.3. Penelaahan Terhadap RPJPD Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2045 83
3.2.4. Penelaahan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah 84

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH 87
4.1. Visi Kabupaten Pohuwato 2025-2045 87
4.2. Misi Kabupaten Pohuwato 2025-2045 92

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH 95
5.1. Arah Kebijakan 95
5.2. Sasaran Pokok RPJPD 2025-2045 95
5.2.1. Transformasi Sosial 99
5.2.2. Transformasi Ekonomi 102
5.2.3. Transformasi Tata Kelola Pemerintahan 104
5.2.4. Keamanan dan Ketertiban, Praktek Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro yang Kuat 104
5.2.5. Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi 106
5.2.6. Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan 108
109
5.2.7. Pembangunan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan 110
5.2.8. Kesinambungan Pembangunan 111
5.3. Sasaran Pokok

BAB VI PENUTUP **128**
6.1. Implementasi Pelaksanaan 128
6.2. Kerangka Pengendalian 131
6.3. Mekanisme Perubahan 133
6.4. Komunikasi Publik 133
6.5. Pembiayaan Pembangunan 134

DAFTAR TABEL

No Tabel	Judul Tabel	Hal
Tabel 2.1	Luas Wilayah Menurut Kecamatan Di Kabupaten Pohuwato, 2023	9
Tabel 2.2	Tinggi Wilayah Per Kecamatan di Kabupaten Pohuwato	11
Tabel 2.3	Wilayah Sungai Kabupaten Pohuwato	13
Tabel 2.4	Daerah Aliran Sungai Kabupaten Pohuwato	13
Tabel 2.5	Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Kabupaten Pohuwato, 2021	14
Tabel 2.6	Jumlah Hotel/Penginapan dan Kamar di Kabupaten Pohuwato	16
Tabel 2.7	Perkembangan Pengelolaan Kehutanan di Kabupaten Pohuwato	17
Tabel 2.8	Indeks Risiko Bencana Kabupaten Pohuwato	19
Tabel 2.9	Status Daya Dukung Penyediaan Air Kabupaten Pohuwato	21
Tabel 2.10	Status Daya Dukung Penyediaan Pangan Kabupaten Gorontalo	21
Tabel 2.11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Pohuwato Tahun 2023	22
Tabel 2.12	Jumlah Penduduk Kabupaten Pohuwato Menurut Kecamatan	24
Tabel 2.13	Produk Domestik Regional Bruto ADHB dan ADHK Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)	26
Tabel 2.14	Produk Domestik Regional Bruto ADHB dan ADHK Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)	28
Tabel 2.15	Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten/Kota Wilayah Provinsi Gorontalo, 2010-2023	29
Tabel 2.16	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Di Provinsi Gorontalo Tahun 2010-2023	32
Tabel 2.17	Capaian Dimensi IPM Kabupaten Pohuwato dan Provinsi Gorontalo, 2010-2023	35
Tabel 2.18	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Pohuwato	35
Tabel 2.19	Jumlah Kasus Bayi Gizi Buruk (BGB) Kabupaten Pohuwato Tahun 2018-2022	37
Tabel 2.20	Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2022	47
Tabel 2.21	Realisasi Penerimaan Daerah Menurut Jenis Penerimaan Kabupaten Pohuwato 2018-2023	50
Tabel 2.22	Indikator Ekonomi Kabupaten Pohuwato, Awal dan Akhir Periode RPJPD 2005-2025	53
Tabel 2.23	Faktor Pendorong dan Penghambat RPJPD 2005-2025	53
Tabel 2.24	Analisis Kebutuhan Rumah Layak Huni Kabupaten Pohuwato	58
Tabel 2.25	Analisis Kebutuhan Air Minum Kabupaten Pohuwato	59
Tabel 2.26	Analisis Kebutuhan Listrik Kabupaten Pohuwato	60

Tabel 2.27	Analisis Kebutuhan Infrastruktur Pendidikan	60
Tabel 2.28	Analisis Kebutuhan Infrastruktur Kesehatan	61
Tabel 2.29	Tren Perkembangan Timbulan Sampah Kabupaten Pohuwato	62
Tabel 3.1	Identifikasi Isu-isu Strategis	77
Tabel 3.2	TPB/SDGs	81
Tabel 3.3	Pemetaan Capaian Indikator SDGs Kabupaten Pohuwato	82
Tabel 3.4	Sasaran Visi, Gorontalo Provinsi Madani yang Maju dan Berkelanjutan 2045	83
Tabel 4.1	Sasaran Visi, Kabupaten Pohuwato Maju, Mandiri, Harmonis Berbasis SDA Bernilai Tambah dan Berkelanjutan yang Ditunjang SDM Handal Berlandaskan Nilai-Nilai Religius	90
Tabel 5.1	Arah Kebijakan/Tujuan Pembangunan Kabupaten Pohuwato 2025-2045	95
Tabel 5.2	Kebijakan dan Sasaran Pokok Pembangunan RPJPD	111

DAFTAR GAMBAR

No Gambar	Judul Gambar	Hal
Gambar 1.1	Bagan Hubungan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	6
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kabupaten Pohuwato	10
Gambar 2.2	Perbandingan Nilai IKD Kabupaten/Kota Di Provinsi Gorontalo Tahun 2023	19
Gambar 2.3	Kondisi Pangan Kabupaten Pohuwato, 2019-2022	23
Gambar 2.4	Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Pohuwato, 2013 - 2023	23
Gambar 2.5	Piramida Kependudukan Kabupaten Pohuwato Tahun 2023	25
Gambar 2.6	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pohuwato dan Provinsi, 2013-2023	26
Gambar 2.7	Rata-Rata Distribusi PDRB Kabupaten Pohuwato, 2013-2023	28
Gambar 2.8	Perkembangan Persentase Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Pohuwato Tahun 2013 – 2023	30
Gambar 2.9	Perbandingan Angka Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Gorontalo Tahun 2010 – 2023	31
Gambar 2.10	Jumlah Pengangguran Kabupaten Pohuwato Berdasarkan Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan Tahun 201-2023 (Ribu Jiwa)	33
Gambar 2.11	Perbandingan Rasio Gini Kabupaten Pohuwato Dengan Kabupaten/Kota Di Provinsi Gorontalo, 2018-2022	33
Gambar 2.12	Komparasi IPM Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo, 2010-2023	34
Gambar 2.13	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kabupaten Pohuwato, Tahun 2018 – 2023	36
Gambar 2.14	Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Pohuwato, Tahun 2018-2023 (dalam tahun)	37
Gambar 2.15	Perkembangan PDRB Per Kapita Berdasarkan Harga Konstan Kabupaten Pohuwato Periode 2018-2023 (dalam rupiah)	39
Gambar 2.16	Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Pohuwato dengan Provinsi Gorontalo, 2018-2023	42
Gambar 2.17	Tren Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pohuwato	57
Gambar 2.18	Proyeksi Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pohuwato	58
Gambar 2.19	Grafik Status Investasi PMA Kabupaten Gorontalo	53
Gambar 5.1	Pentahapan Implementasi RPJPD Kabupaten Pohuwato 2025 – 2045	97

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Jauh sebelum terbentuk menjadi daerah otonom sendiri, wilayah Kabupaten Pohuwato pada awalnya merupakan bagian administratif pemerintahan Kabupaten Gorontalo. Pada tahun 1999 terbentuk Kabupaten Boalemo pecahan dari Kabupaten Gorontalo, dimana wilayahnya meliputi hingga bagian barat Gorontalo berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah. Seiring perjalanan waktu, muncul aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat, wilayah Kabupaten Boalemo dianggap sangat luas, sehingga rentang kendali pemerintahan cukup jauh. Selain itu juga tidak lepas pengaruh polemik kedudukan ibukota Kabupaten Boalemo yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) No. 50 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Boalemo, Kabupaten Buol dan Kabupaten Morowali, yakni pasal 7 dan 8 yang isinya untuk sementara waktu ibukota Kabupaten Boalemo berkedudukan di Tilamuta. Kemudian 5 tahun setelah pemerintahan berjalan, ibukota kabupaten harus pindah ke Kecamatan Marisa.

Perintah undang-undang ini disikapi secara berbeda dengan masyarakat Kabupaten Boalemo pada saat itu, masyarakat Kecamatan Tilamuta berharap ibukota Kabupaten Boalemo tetap berada di wilayahnya, sementara masyarakat yang berada disekitar Kecamatan Marisa meminta perintah undang-undang harus dijalankan. Alhasil terjadi tarik menarik masalah kedudukan ibukota kabupaten, polemik tersebut akhirnya disikapi oleh masyarakat dan para *stakeholder* terkait bersama-sama pemerintah untuk mengupayakan penyelesaian secara damai, arif dan bijaksana, lewat usulan pembentukan daerah otonom baru. Dalam kelanjutannya, upaya dilakukan oleh tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan komponen lainnya membuahkan hasil dengan terwujudnya Kabupaten Pohuwato menjadi daerah otonom baru, setelah disahkan Undang-Undang No. 6 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Pohuwato dan Bone Bolango lewat sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 6 Mei 2003. Lahirnya undang-undang ini merupakan langkah awal dari rangkaian perjuangan sebelumnya yang dilakukan oleh seluruh komponen masyarakat untuk

membentuk satu kabupaten tersendiri. Dalam konteks itu, pemekaran daerah otonom baru bukan tujuan akhir tetapi permulaan untuk membangun daerah guna mensejahterahkan masyarakat Kabupaten Pohuwato, dengan cara berpartisipasi dalam menjaga keberlanjutan pembangunan.

Berdasarkan perjalanan sejarah ini, akhirnya tanggal 6 Mei ditetapkan sebagai hari ulang tahun Kabupaten Pohuwato yang diperingati setiap tahun, dengan demikian pada tahun 2023 sudah masuk usia yang ke 20 tahun. Pada awal tahun terbentuknya roda pemerintahan Kabupaten Pohuwato, kurun waktu 2003 – Februari 2005 dipimpin oleh penjabat bupati Drs. Yahya K. Nasib, kemudian dari Februari 2005 – September 2005 dijabat oleh Hi. Abu Bakar Mopangga, S.H. Penjabat bupati menjalankan 3 (tiga) tugas utama, yakni pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato, penyusunan dan pengisian struktur kelembagaan dan pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung (Pilkada). Pada masa itu, telah berhasil disusun dokumen induk perencanaan pembangunan daerah yakni Rencana Strategi Pengembangan Daerah (Renstra) dan Garis-garis Besar Haluan Daerah (GBHD) yang menjadi acuan dalam pembangunan daerah saat itu.

Kabupaten Pohuwato kini telah memasuki usia ke 20 tahun, jika diibaratkan usia manusia, Kabupaten Pohuwato beranjak menjadi remaja yang senantiasa bersolek mempercantik diri hingga menjadi dewasa dan mapan. Kurun waktu tersebut, Kabupaten Pohuwato telah mengalami dinamika pembangunan dan telah memperlihatkan perkembangan yang cukup signifikan dibanding daerah otonom lainnya yang ada di Provinsi Gorontalo, baik dalam aspek pembangunan, pemerintahan dan pelayanan publik. Kabupaten ini merupakan salah satu wilayah pusat pertumbuhan *(growth pole)* ekonomi, memiliki potensi sumber daya alam dan merupakan lumbung pangan bagi Provinsi Gorontalo dan regional Kawasan Teluk Tomini. Dengan potensi itu, diharapkan mampu meningkatkan ekonomi dan daya saing daerah, berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhususan sesuai potensi sumberdaya dan keanekaragaman yang dimiliki, untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, dalam kerangka pembangunan daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, maka disusunlah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pohuwato. Tujuannya agar roda pemerintahan, pembangunan dan pengelolaan kemasyarakatan terarah dan fokus pada permalasahan dan tantangan dihadapi oleh daerah setiap periodenya, maka pemerintah daerah harus memiliki dokumen RPJPD untuk masa 20 Tahun. Hal ini dilakukan karena merupakan bagian dari amanah pasal 1 ayat (2) Undang -Undang nomor 17 Tahun Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional menyatakan bahwa RPJPD tahun 2005 – 2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk masa 20 tahun terhitung sejak tahun 2005 – 2025. Namun demikian periode RPJPD Kabupaten Pohuwato tertuang 2009 – 2025, hal ini dikarenakan Kabupaten Pohuwato pemerintahannya mulai definitif tahun 2005 hasil pemilihan kepala daerah langsung, sehingga penyusunan dan penetapan dokumen RPJPD disusun tahun 2009 sehingga periode berlaku mulai tahun 2009 sampai dengan 2025. Dokumen RPJPD ini yang menjadi pedoman dan acuan setiap periode pemerintahan daerah di Kabupaten Pohuwato sebagaimana Amanah pasal 265 Undang – Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, menyatakan bahwa calon kepala daerah menyusun visi dan misi serta program berpedoman pada dokumen RPJPD.

Berdasarkan informasi tersebut di atas maka dokumen RPJPD tahap pertama, dua tahun lagi akan berakhir, dan pada tahun 2023 ini harus dilakukan evaluasi berdasarkan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri nomor 600.2.1/1570/SJ tentang Penyusunan Evaluasi Terhadap Hasil pelaksanaan RPJPD Tahun 2005 – tahun 2025. Hasil evaluasi dijadikan pijakan untuk menuju pintu masuk penyusunan dokumen RPJPD tahun 2025 – 2045, selain tentunya memperhatikan dinamika pembangunan yang terjadi saat ini. Penyusunan dokumen RPJPD tahun 2025-2045 dimaksudkan untuk mengarahkan, menjembatani, mensinergikan, mensinkronkan dan menjaga kesinambungan perencanaan antar waktu, antar pelaku di Kabupaten Pohuwato berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan yang adil, merata dan berkelanjutan *(sustainable)*.

1.5. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo;
2. Undang-Undang No. 6 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Pohuwato;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

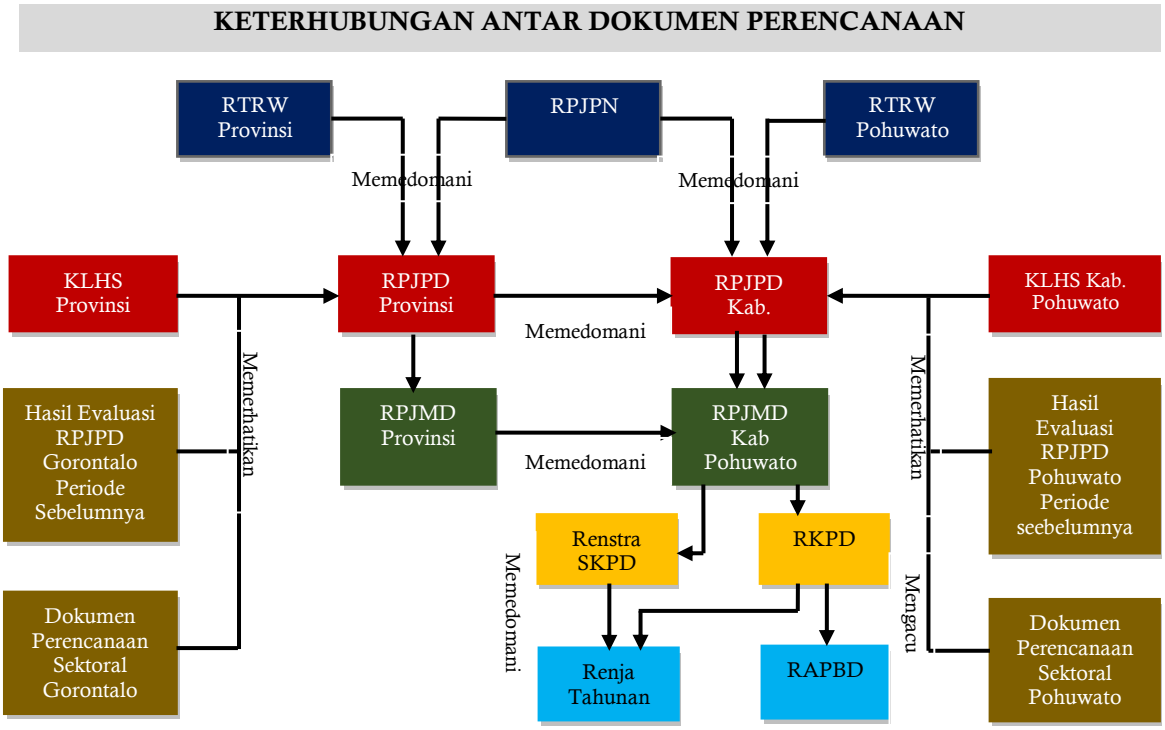
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia 007 Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pohuwato;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tagun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

1.3. Hubungan RPJP Kabupaten Pohuwato Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

RPJPD Kabupaten Pohuwato merupakan dokumen induk sebagai kerangka dasar pengelolaan pembangunan daerah 20 (dua puluh) tahun, yang menjabarkan kehendak masyarakat Kabupaten Pohuwato yang merupakan hasil integrasi dan

sinkronisasi antara kebijakan pembangunan regional dan sektoral. Fungsinya adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat Kabupaten Pohuwato yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah, sektor swasta, perguruan tinggi dan segenap warga masyarakat menuju pada pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggungjawab. RPJPD Kabupaten Pohuwato dibuat untuk menjadi dasar bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, misalnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dokumen lainnya, dan juga dijadikan acuan sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di tingkat bawah. Rencana yang termuat di dalam RPJPD Kabupaten Pohuwato merupakan rencana jangka panjang dari semua aspek pembangunan yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan. Gambaran tentang hubungan antara RPJPD dengan dokumen perencanaan lainnya sebagai kesatuan sistem perencanaan pembangunan ditunjukkan pada Gambar 2 berikut:



Gambar 1.1. Bagan Hubungan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.4. Maksud dan Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2025-2045, selanjutnya disebut RPJPD, ditetapkan dengan maksud memberikan arahan pada penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun rencana tahunan sekaligus menjadi acuan makro bagi seluruh pemangku kepentingan daerah (Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Desa, masyarakat dan dunia usaha) dalam menjalankan perannya sebagai aktor pembangunan di daerah, dalam lingkup penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik, serta partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha dalam meningkatkan perekonomian dan daya saing daerah. Tujuannya adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan cita-cita dan tujuan pembentukan Kabupaten Pohuwato berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, akuntabilitas, keadilan sosial, supremasi hukum dan perlindungan hak azasi manusia.

1.5. Sistematika

RPJPD Kabupaten Pohuwato Tahun 2025-2045 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum

1.3. Hubungan RPJP Kabupaten Pohuwato Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.4. Maksud dan Tujuan

1.5. Sistematika

Bab II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Aspek Geografi

2.1.2. Aspek Demografi

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

2.2.2. Kesejahteraan Sosial
2.3. Aspek Daya Saing Daerah
2.4.1. Daya Saing Ekonomi Daerah
2.4.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia
2.4.3. Daya Saing Fasilitas/Wilayah/Infrastruktur
2.4.3. Daya Saing Iklim Berinvestasi
2.4. Aspek Pelayanan Umum
2.3.1. Pendidikan
2.3.2. Kesehatan
2.3.3. Infrastruktur
2.3.4. Ketenagakerjaan
2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2025-2025
2.6. Tren Demografi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik
2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah
Bab III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah
3.2. Isu Strategis
Bab IV VISI DAN MISI DAERAH
4.1. Visi Kabupaten Pohuwato Tahun 2025 – 2045
4.2. Misi Kabupaten Pohuwato Tahun 2025 – 2045
Bab V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH
5.1. Arah Kebijakan Daerah
5.2. Sasaran pokok
Bab VI PENUTUP

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1. Aspek Geografis

Kabupaten Pohuwato adalah kabupaten yang terbentuk dari hasil pemekaran Kabupaten Boalemo. Kabupaten Pohuwato di tahun 2022 memiliki jumlah penduduk sebanyak 149.297 jiwa, umumnya tersebar dan bermukim pada dataran rendah dan pantai dengan ketinggian 0 – 1800 dpl. Kabupaten Pohuwato merupakan kabupaten yang berada di ujung Barat Provinsi Gorontalo dengan letak Geografis antara 0,27° – 1,01° Lintang Utara 121,23° – 122,44° Bujur Timur dengan iklim 24,4 – 33,2° C. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Buol (Sulawesi Tengah), sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Tomini, sebelah Barat berbatasan dengan kabupaten Parigi Moutong (Sulawesi Tengah) dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Boalemo. Luas wilayah adalah 4.244,31 Km^2 atau 34,75 persen dari luas wilayah Provinsi Gorontalo dengan wilayah administrasi mencakup 13 kecamatan, 105 desa/UPT dan 3 Kelurahan. Nama kecamatan, jumlah desa dan Luas wilayah dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut.

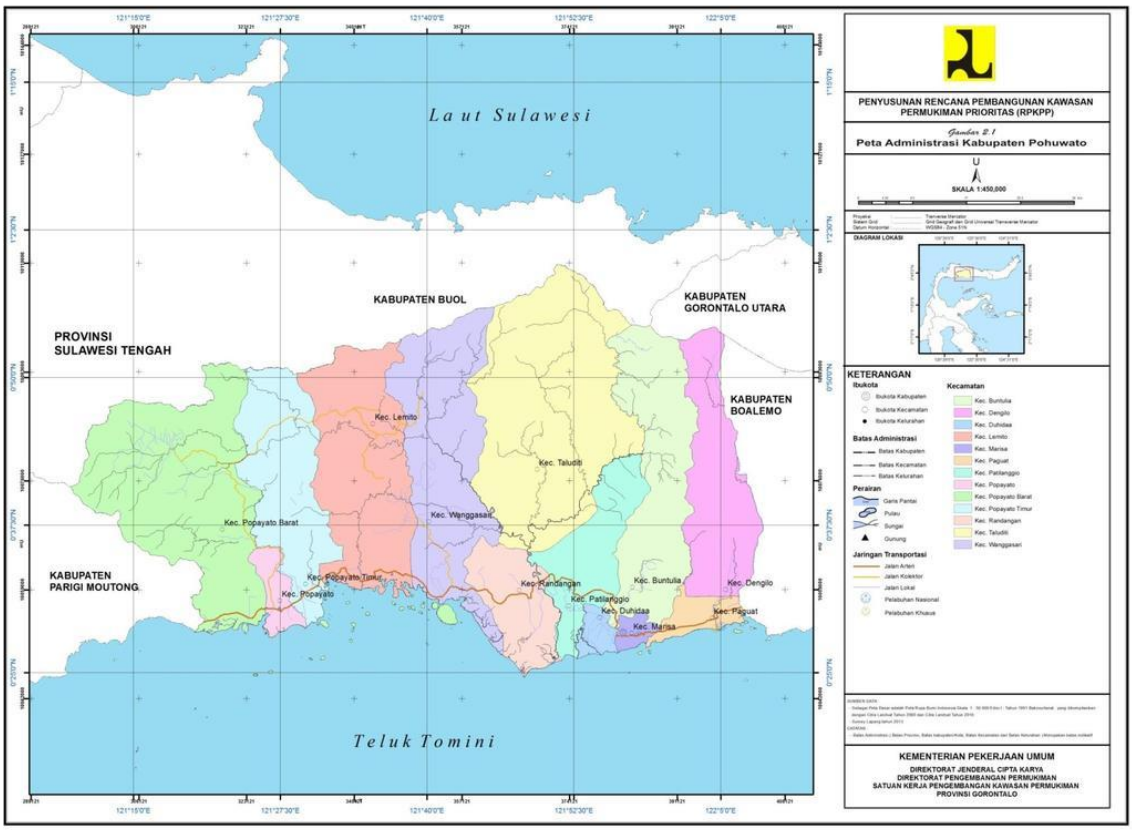
Tabel 2.1. Luas Wilayah Kecamatan dan Jumlah Desa Kabupaten Pohuwato, Tahun 2023

No	Nama Kecamatan	Luas (Km^2)	Jumlah Desa/Kel.	Keterangan
1	Paguat	560,93	11	Induk
2	Dengilo	242,39	5	Pemekaran 2008
3	Marisa	34,65	8	Induk
4	Buntulia	375,64	7	Pemekaran 2008
5	Duhiadaa	39,53	8	Pemekaran 2008
6	Taluditi	159,97	8	Pemekaran 2003
7	Lemito	619,5	8	Induk
8	Wanggarasi	188,08	7	Pemekaran 2008
9	Popayato	90,92	10	Induk
10	Popayato Barat	578,24	7	Pemekaran 2008
11	Popayato Timur	723,74	7	Pemekaran 2008
12	Randangan	331,9	13	Pemekaran 2003

13	Patilanggio	298,82	6	Pemekaran 2003
Jumlah		**4.244,31**	**105**	

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pohuwato, 2024.

Letak yang strategis Kabupaten Pohuwato yaitu berada di wilayah tengah dari Kawasan Teluk Tomini, berhadapan langsung dengan daerah wisata International yaitu Pulau Togian di Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah dengan waktu tempuh dari Kota Marisa sekitar 2 Jam melalui jalur laut *(speedboat).* Adanya pelabuhan ferry akan menjadikan Kabupaten Pohuwato mejadi daerah pendorong perkembangan daerah-daerah di kawasan Teluk Tomini. Selain itu, letak Kabupaten Pohuwato yang berada dijalan poros Trans Sulawesi yang dilintasi oleh jalur transportasi darat dari Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan, sangat menunjang percepatan perkembangan ekonomi daerah.



Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Pohuwato

Dari sisi geografi, ke depan Kabupaten Pohuwato dihadapkan pada beberapa tantangan, yakni, *pertama*, bagaimana menjadikan Pohuwato sebagai pusat agroindustri, perdagangan dan jasa di Kawasan Teluk Tomini; *kedua*, bagaimana mewujudkan Kabupaten Pohuwato menjadi lumbung pangan di

Provinsi Gorontalo dan menunjang pangan IKN. Salah satu hal yang perlu mendapatkan perhatian ke depan adalah pengembangan infrastruktur pelabuhan laut dan bandar udara untuk melayani sekaligus menjadi *fider* di wilayah Teluk Tomini, Indonesia Timur untuk ke timur jauh dan IKN.

A. Kondisi Topografi

Topografi Kabupaten Pohuwato umumnya adalah dataran rendah, sebagian kecil berbukit dan bergunung. Tingkat kemiringan, yakni 0 – 400, sedangkan ketinggiannya berkisar antara 0 – 1800 dari permukaan laut (dpl). Jika ditinjau dari elevasi di atas permukaan laut, Kecamatan Taluditi menjadi wilayah dengan ketinggian tertinggi, mencapai 180 mdpl. Sementara, Kecamatan Duhiadaa, Paguat dan Dengilo merupakan kecamatan dengan elevasi paling rendah, hanya mencapai 120 meter di atas permukaan laut.

Tabel 2.2 Tinggi Wilayah Per Kecamatan Tahun 2023

Kecamatan	Tinggi Wilayah (mdpl)
Popayato	140
Popayato Barat	140
Popayato Timur	140
Lemito	170
Wanggarasi	170
Marisa	150
Patilanggio	150
Buntulia	150
Duhiadaa	120
Randangan	120
Taluditi	180
Paguat	120
Dengilo	120

Sumber: Kabupaten Pohuwato Dalam Angka, 2024

B. Geologi

Secara regional, kondisi geologi Kabupaten Pohuwato termasuk dalam lembar Tilamuta yang masih merupakan bagian dari lengan utara Sulawesi. Secara fisiografis, pembagian zona bentang alam yang merupakan representasi batuan dan struktur geologi. Lembar ini mencakup empat zona fisiografis utama Gorontalo yaitu zona pegunungan utara Tilongkabila-Boliohuto, zona dataran interior Paguyaman-Limboto, zona pegunungan selatan Bone-Tilamuta-Modello, dan zona dataran pantai Pohuwato.

Zona dataran pantai Pohuwato terbentang dari Marisa di timur hingga Torosiaje dan perbatasan dengan Sulawesi Tengah di Bagian Barat yang merupakan aluvial pantai yang Sebagian besar tadinya merupakan daerah rawa dan zona pasang surut. Hingga saat ini, di bagian selatan masih didapati rawa-rawa bakau (mangrove) yang luas, yang menjadi rumah bagi burung endemis Wallacea, burung Maleo. Dapat dikatakan bahwa morfologi Pohuwato umumnya merupakan daerah pegunungan yang berrelief terjal. Batas-batas pegunungan terbentang sampai pantai.

Morfologi Pohuwato pada umumnya disusun oleh kontur yang relative rapat dengan ketinggian 40 – 700 mdpl. Bentuk morfologi yang ada berupa pegunungan dan perbukitan vulkanik dengan lereng landau sampai sangat terjal, serta Sebagian besar tertutup oleh vegetasi hutan tropis. Daerah Marisa mempunyai morfologi yang khas jika dibandingkan dengan daerah yang lain. Hal ini terlihat dari bentuk morfologi yang berbentuk pegunungan lereng terjal, perbukitan menggelombang dan dataran rendah. Statigrafi daerah ini sangat khas dan membentuk formasi yang beragam, serta struktur geologi pada daerah ini terdiri dari sesar dan lipatan.

C. Klimatologi

Kabupaten Pohuwato memiliki curah hujan yang cukup besar di bagian Kecamatan Popayato (259 milimeter) dan Kecamatan Dengilo (253 milimeter). Sementara wilayah dengan jumlah hari hujan paling intens adalah Kecamatan Taluditi, tercatat pada desember 2023 jumlah hari hujan di Taluditi mencapai 20 hari. Di sisi lain, Kecamatan Buntulia dan Kecamatan Duhiadaa adalah wilayah dengan curah hujan yang paling sedikit bahkan selama periode 2023. Hal ini menunjukkan bahwa kecamatan-kecamatan tersebut rentan terhadap risiko banjir dan longsor yang disebabkan oleh curah hujan yang tinggi. Di sisi lain, wilayah-wilayah dengan curah hujan rendah seperti Buntulia dan Duhiadaa memerlukan strategi untuk mengatasi masalah kekeringan, seperti pengelolaan air yang lebih efisien dan diversifikasi sumber air. Selain dampak buruk, curah hujan yang tinggi juga memiliki efek positif khususnya dalam meningkatkan kesuburan tanah dan memberikan peluang bagi pertanian untuk menghasilkan tanaman yang lebih baik dan hasil yang lebih besar.

Kondisi suhu di Kabupaten Pohuwato, berdasarkan data yang dilansir dari BMKG rata-rata suhu maksimal hingga desember 2023 adalah 30 derajat celcius dengan suhu terendah mencapai 26 derajat celcius. Data menunjukkan bahwa Kabupaten Pohuwato cenderung memiliki iklim yang hangat. Suhu yang relatif tinggi ini mengindikasikan bahwa dalam jangka panjang, Kabupaten Pohuwato akan sangat cocok menjadi daerah dengan pengembangan kawasan wisata yang potensial dalam menarik minat kunjungan wisatawan khususnya yang mencari tempat dengan cuaca hangat untuk berlibur.

D. Hidrologi

Provinsi Gorontalo terbagi menjadi tiga Daerah Aliran Sungai (DAS) utama, dua di antaranya melintasi wilayah Kabupaten Pohuwato yaitu DAS Randangan dan DAS Paguyaman. Selain kedua DAS utama tersebut, terdapat juga Daerah Aliran Sungai Kecil lainnya yang umumnya tersebar di wilayah Pohuwato. Daerah aliran sungai (DAS) Randangan merupakan DAS terluas di wilayah Pohuwato yang masuk ke Wilayah Sungai (WS) Randangan seluas 2.575 km² meliputi delapan kecamatan di Kabupaten Pohuwato. Sungai ini mengalir dari utara ke selatan berhulu di Gunung Tentolomatinan (2207 m) di bagian timur Pegunungan Paleleh dan bermuara di Teluk Tomini.

Tabel 2.3 Wilayah Sungai Kabupaten Pohuwato

Nama Wilayah Sungai	Kode	Luas (Km^2)
Wilayah Sungai Paguyaman	WS No. 05.05.A3	3,485.65
Wilayah Sungai Randangan	WS No. 05.06.A2	3,945

Sumber: BWS Sulawesi II Provinsi Gorontalo, 2022

Tabel 2.4 Daerah Aliran Sungai Kabupaten Pohuwato

WS Paguyaman	WS Randangan
1. DAS Bumbulan 2. DAS Libuo 3. DAS Marisa	1. DAS Randangan 2. DAS Beringin 3. DAS Dingamotolohu 4. DAS Patihu 5. DAS Sidorukun 6. DAS Sukadamai 7. DAS Wonggarasi 8. DAS Lemito 9. DAS Lomuli 10. DAS Milangodaa 11. DAS Popayato 12. DAS Dudeulo 13. DAS Molosipat

	14. DAS Moutong

Sumber: BWS Sulawesi II Provinsi Gorontalo, 2022

E. Penggunaan Lahan

Secara umum penggunaan lahan di Kabupaten Pohuwato meliputi;

1. Kawasan lindung cagar alam Panua
2. Kawasan hutan lindung
3. Kawasan budidaya andalan Marisa dengan sektor unggulannya pertanian, perkebunan dan perikanan
4. Kawasan hutan produksi
5. Kawasan hutan produksi terbatas
6. Kawasan hutan produksi konservasi

Berikut adalah luas kawasan hutan di Kabupaten Pohuwato sampai dengan tahun 2021;

Tabel 2.5 Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Kabupaten Pohuwato, 2021

Hutan Lindung	Suaka Alam dan Pelestarian Alam	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Dapat Dikonversi	Jumlah Luas Hutan dan Perairan
136.582,81	39.707,97	83.304,44	41.476,29	10.522,52	311.594,03

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2023

F. Potensi Pengembangan Wilayah

1). Potensi Pertanian dan Perkebunan

Potensi wilayah pengembangan tanaman pangan di wilayah Kabupaten Pohuwato umumnya sesuai untuk pengembangan tanaman pangan pada lahan kering yang spesifik untuk dataran rendah dan tinggi. Pengembangan tanaman pangan dapat dikembangkan pada hampir semua semua kecamatan. Kabupaten Pohuwato memiliki luas 4,244,31 km^2, atau sebesar 424.431 ha, 34,75 persen dari total luas Provinsi Gorontalo. Sampai Tahun 2022. Penggunaan lahan tersebut diperuntukan untuk; kegiatan sawah yang diolah 5.720 ha, sementara luas lahan kegiatan kebun dan ladang masing-masing 45.524,50 ha dan 17.462,00 ha serta yang tidak diusahakan mencapai 20.846,00 ha, Kabupaten Pohuwato termasuk penghasil terbesar jagung di Gorontalo. Untuk pengembangan tanaman padi, potensi pengembangan sawah paling besar berada di Kecamatan Duhiadaa,

sedangkan tanaman jagung lahan dan produksi paling besar berada di Kecamatan Randangan. Sub kelompok tanaman perkebunan seperti kelapa paling luas berada di Kecamatan Patilanggio, tanaman kelapa cukup banyak dan luas lahan perkebunan kelapa sekitar 19.886 Ha. Kondisi eksisting menunjukkan belum adanya pengelolaan tanaman perkebunan secara komersil di kabupaten ini.

2). Potensi Perikanan dan Kelautan

Kabupaten Pohuwato berhadapan langsung dengan Teluk Tomini yang memiliki keanekaragaman jenis ikan di dalamnya, potensi perairan Teluk Tomini sampai dengan Laut seram sebesar 595.620 ton per tahun dan yang telah termanfaatkan baru sekitar 10 persen, demikian halnya potensi budidaya perikanan cukup terbuka dikembangkan termasuk di dalamnya perikanan darat (tambak) yang saat ini luasnya mencapai 3.898 ha, kolam/tobat/empang 1.582 ha. Untuk subsektor perikanan, perikanan tangkap di tahun 2021 sebanyak 27.084 ton terbesar diantara enam daerah lainnya, dengan nilai sebesar Rp. 867.699.280.000,- didominasi oleh ikan pelagis. Untuk sub sektor perikanan budidaya, Kabupaten Pohuwato menghasilkan 22.795 ton, untuk kegiatan pembenihan sebanyak 31.500 ton, dan jaring apung menghasilkan 85 ton, serta hasil tambak sederhana sebesar 22.683 ton.

Sementara untuk potensi kelautan, wilayah Kabupaten Pohuwato memiliki 51 pulau-pulau kecil, panjang garis pantai 86 mil atau 164 Km, luas perairan teritorial ± 3.292,71 KM², luas ekosistem mangrove 9.083 ha, luas kawasan terumbu karang 2.747,81 ha dan luas padang lamun 975,92 ha. Potensi diperairan teritorial 10.200 ton pertahun, termanfaatkan baru sekitar 67,90 persen. Sementara kekayaan laut yang berada di Kawasan Teluk Tomini yang menjadi bagian dari kewenangan Kabupaten Pohuwato dapat dikembangkan budidaya kerang mutiara.

3). Potensi Pariwisata

Potensi pengembangan pariwisata di Kabupaten Pohuwato masih memerlukan peningkatan infrastruktur penunjang seperti akses jalan dan akomodasi serta kesadaran masyarakat tentang pengembangan industri

pariwisata. Potensi pengembangan wisata budaya, wisata bahari dan wisata agro sangat besar di wilayah ini. Toluk Tomini dikenal sebagai teluk yang permukaan airnya relatif tenang serta memiliki keanekaragaman hayati dapat menjadi tujuan destinasi wisata, demikian juga pantai yang dimiliki oleh Kabupaten Pohuwato sangat potensial dikembangkan sebagai wisata bahari maupun *diving*. Data statistik menunjukkan pada tahun 2022 terdapat 30 hotel/penginapan dengan 355 kamar, sementara rumah makan mencapai 87 buah hingga tahun 2022. Sebaran hotel/penginapan di Kabupaten Pohuwato menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.6. Jumlah Hotel/Penginapan dan Kamar di Kabupaten Pohuwato

Kecamatan	Jumlah	
	Hotel/Penginapan	Kamar
Marisa	14	176
Duhiadaa	4	55
Buntulia	2	51
Popayato	4	30
Lemito	1	5
Paguat	2	26
Total	30	26

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kab. Pohuwato, 2024.

4). Potensi Pertambangan dan Energi

Pada sektor pertambangan dan energi, potensi yang ada mencakup sejumlah bahan tambang dan mineral yang mempunyai nilai ekonomi tinggi seperti emas, perak, tembaga, batu gamping *(lime stone)*, toseki, batu granit, sirtu, zeolit, kaolin, pasir kuarsa, feldspar dan lempung *(clay)*. Potensi ini mempunyai nilai ekonomis penting dalam peningkatan kemakmuran masyarakat Pohuwato. Secara geologis, potensi bahan tambang Kabupaten Pohuwato tersebar di seluruh kabupaten dengan jenis dan potensi yang beragam. Isu sentral dalam pertambangan adalah aktifitas *illegal mining*.

Dalam bidang energi, pasokan listrik di Kabupaten Pohuwato masih melalui PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang terdiri dari dua Unit Operasi, yakni PLTD Marisa dan PLTMG Maleo, 7 unit distribusi yakni Ranting Marisa, Sub Ranting Paguat, Sub Ranting Manunggal Karya, Sub Ranting Panca Karsa, Sub Ranting Iloheluma, Sub Ranting Lemito dan Sub Ranting Molosipat. Sampai saat ini PLN belum mampu melayani seluruh kebutuhan

listrik masyarakat Kabupaten Pohuwato, padahal, potensi sumber energi listrik cukup tersedia, antara lain potensi energi air skala besar (Sungai Randangan) dan air terjun di Malango Kecamatan Taluditi dan potensi PLTU (Marisa 2 x 15 MW). Data mengenai energi diperoleh dari PLN Unit Marisa untuk energi listrik dan PDAM Tirta Maleo untuk air bersih. Pada tahun 2020, jumlah pelanggan yang tercatat di PLN Unit Marisa adalah sebanyak 38.218 pelanggan. Jumlah ini mengalami kenaikan untuk setiap tahunnya. Untuk jumlah pelanggan air bersih yang terdaftar di PDAM Tirta Maleo tercatat sebanyak 19.931 pelanggan pada tahun 2022. Sebanyak 95 persen pelanggan air bersih di PDAM Tirta Maleo didominasi dari kalangan rumah tangga. Kecamatan Marisa merupakan kecamatan dengan jumlah pelanggan air bersih terbanyak di Kabupaten Pohuwato. Jumlah air yang disalurkan mencapai 181.092 M^3.

5). Potensi Kehutanan

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan SK No. 325/Menhut-II/2010 tanggal 25 Mei 2010 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Gorontalo, luas Kawasan hutan di Provinsi Gorontalo seluas 824.668 ha dan Kabupaten Pohuwato sendiri memiliki hutan paling luas di Provinsi Gorontalo, yakni 311.682,34 ha. Dibawah ini disajikan pekembangan hasil pengelolaan hutan serta luas kawasan hutan seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 2.7. Perkembangan Pengelolaan Kehutanan di Kabupaten Pohuwato

KSA/KPA (Ha)	HL (Ha)	HPT (Ha)	HP (Ha)	HPK (Ha)	APL (Ha)	Jumlah (Ha)	Luas Kawasan Hutan
39.707,97	136.581,92	83.304,88	41.476,29	10.611,28	124.624,43	436.306,76	311.682,34

Sumber: Dinas Kehutanan Kabupaten Pohuwato, 2024.

Pada tabel 2.3 di atas nampak bahwa Kawasan Suaka Alam atau Kawasan Pelestarian Alam (KSA/KPA) seluas 39.707,97 ha, Hutan Lindung (HL) di seluas 136.581,92 ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 83.304,92 Ha, Hutan Produksi (HP) seluas 41.476,29 Ha, Hutan Produksi Konversi (HPK) seluas 10.624,43 Ha, areal di luar kawasan hutan negara yang diperuntukkan bagi kegiatan pembangunan di luar bidang kehutanan (APL) seluas 124.624,43 Ha.

6). Potensi Industri, Perdagangan dan Investasi

Sektor industri kecil dan menengah merupakan urat nadi perekonomian yang senantiasa memperoleh perhatian pemerintah daerah. Salah satu pertimbangannya adalah sektor ini menyerap tenaga kerja yang cukup besar. Berdasarkan data BPS Pohuwato, jumlah perusahaan industri yang ada di Kabupaten Pohuwato pada tahun 2020 adalah sebanyak 3.042 perusahaan yang mampu menyerap tenaga sebanyak 5.480 orang. Nilai produksi yang diperoleh selama tahun 2020 mencapai Rp 99.108.470.000,00. Berdasarkan klasifikasinya, perusahaan industri yang paling banyak di Kabupaten Pohuwato adalah perusahaan industri kimia dan bahan bangunan dengan jumlah perusahaan/usaha sebanyak 324 perusahaan/usaha. Kabupaten Pohuwato memiliki beragam usaha/perusahaan baik kecil maupun besar yang menunjang perekonomian di kabupaten ini. Pada tahun 2021, data yang tercatat pada BPS Kabupaten Pohuwato sebanyak 3.828 perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Pohuwato.

Untuk menunjang kegiatan ekonominya, masyarakat Kabupaten Pohuwato menggunakan pasar sebagai sarana untuk melakukan kegiatan jual beli barang atau jasa. Pada tahun 2022, tercatat di Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kabupaten Pohuwato terdapat 36 pasar yang masih aktif dan tersebar di beberapa kecamatan.

Jumlah koperasi pada tahun 2022 mencapai 138 koperasi, 5 jenis koperasi dengan jumlah terbanyak adalah Koperasi Lainnya sebanyak 87 unit, kemudian Koperasi Unit Desa (KUD) dan Koperasi Pasar (Kopas) masing-masing sebanyak 15 unit, Koperasi Serba Usaha (KSU) sebanyak 35 unit dan Koperasi Pegawai Negeri RI (KPRI) sebanyak 9 unit, dan Koperasi Karyawan sebanyak 3 unit. Ke depan, industri kecil menengah, perdagangan dan investasi akan terus berkembang seiring dengan perkembangan Kabupaten Pohuwato menjadi pusat industri, jasa dan perdagangan di kawasan Teluk Tomini. Pada tahun 2045, Usaha/Industri kecil menengah akan berkembang antara 10 kali lipat dari saat ini, yakni antara 10.000 hingga 15.000 unit usaha.

G. Kondisi Kebencanaan

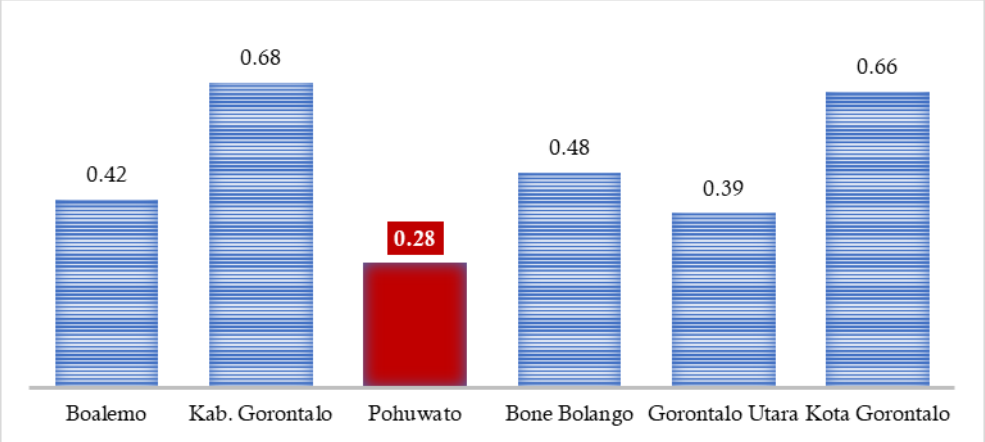
Memahami kondisi kebencanaan secara menyeluruh sangat penting untuk merumuskan strategi mitigasi dan penanggulangan yang efektif. Data yang dikumpulkan menunjukkan bahwa antara tahun 2015 hingga 2023, Kabupaten Pohuwato memiliki nilai indeks risiko bencana sebesar 161.60, yang menempatkannya dalam kategori risiko "tinggi". Kajian terhadap kondisi kebencanaan ini memberikan gambaran yang jelas tentang tingkat kerentanan dan eksposur Kabupaten Pohuwato terhadap berbagai bencana alam yang mungkin terjadi. Analisis lebih lanjut tentang faktor-faktor yang menyebabkan tingginya risiko bencana di wilayah ini dapat menjadi dasar untuk merancang langkah-langkah mitigasi yang tepat. Diperlukan peninjauan menyeluruh terhadap infrastruktur, pola penggunaan lahan, kondisi lingkungan, serta kebijakan dan praktik manajemen bencana yang ada.

Tabel 2.8 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Pohuwato

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kelas Risiko
161.60	161.60	161.60	161.60	161.60	161.60	161.60	161.60	161.60	Tinggi

Sumber: Buku IRBI Provinsi Gorontalo, 2023

Hasil kajian risiko bencana tahun 2022-2026 oleh Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana, menunjukkan bahwa Kabupaten Pohuwato memiliki potensi luasan multibahaya tertinggi 424.431 Ha, sehingga menjadi daerah dengan pengaruh bencana terbesar. Pohuwato juga menjadi kabupaten dengan potensi kerugian lingkungan tertinggi multibahaya dengan luas 152.869 Ha.



Gambar 2.2 Perbandingan Nilai IKD Kabupaten/Kota Di Provinsi Gorontalo Tahun 2023

Dari sisi ketahanan daerah, Kabupaten Pohuwato memiliki indeks ketahanan sebesar 0.28 atau dalam kategori rendah. Indeks ini diukur dengan beberapa indikator prioritas yang mencakup penguatan dari sisi kebijakan dan kelembagaan; pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; penanganan tematik kawasan rawan bencana; peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; pengembangan sistem pemulihan bencana. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di wilayah Provinsi Gorontalo, Kabupaten Pohuwato menjadi daerah dengan IKD terendah.

H. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Menjaga kelestarian lingkungan alam merupakan prasyarat penting bagi kelangsungan hidup yang berkelanjutan. Di Kabupaten Pohuwato, terdapat komponen vital dalam sistem dukungan dan daya tampung lingkungan hidup, terutama terkait dengan sumber daya air dan pangan. Ini mencakup perlindungan dan pengelolaan yang cerdas terhadap ekosistem yang memberikan pasokan air serta pengaturan tata air dan penanggulangan banjir. Upaya ini juga bertujuan untuk memastikan ketersediaan air yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.

1) Daya Dukung Lingkungan Hidup Penyedia Air

Sumber daya air merupakan aset yang terbatas dan penting bagi kehidupan manusia serta ekosistem. Dengan populasi yang terus bertambah dan kebutuhan akan air yang semakin meningkat, penting untuk memahami status daya dukung lingkungan agar dapat mengelola sumber daya air dengan efisien dan berkelanjutan. Data mencatat, bahwa dari total ketersediaan air di Kabupaten Pohuwato yang sebesar 2,607,144,422 m3/tahun kebutuhan air paling banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan untuk lahan yaitu sebesar 504,196,258 m3/tahun. Sedangkan untuk kebutuhan domestik hanya sebesar 13,300,157 m3/tahun. Data KLHS menunjukkan bahwa ambang batas jumlah penduduk yang dapat didukung oleh ketersediaan air secara alamiah adalah 48,679,379 jiwa, di sisi lain total jumlah penduduk Kabupaten Pohuwato saat ini sebanyak 160,187 jiwa.

Tabel 2.9 Status Daya Dukung Penyediaan Air Kabupaten Pohuwato

Model (Populasi Pergrid)	Indikator Penyediaan Air							
	Ketersediaan (Supply)	Kebutuhan Lahan (Demand)	Kebutuhan Domestik (Demand)	Total Demand	Ambang Batas	Selisih	Persentase Wilayah Masih Mendukung	Persentase Wilayah Tidak Mendukung
	m^3/tahun	m^3/tahun	m^3/tahun	m^3/tahun	Jiwa	Jiwa	%	%
160,187	2,607,144,422	504,196,258	13,300,157	517,496,414	48,679,378	48,519,191	32.76	2.51

Sumber: DDDTLH, Provinsi Gorontalo

2) Daya dukung Lingkungan Hidup Penyedia Pangan

Lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan adalah prasyarat utama bagi keberlangsungan produksi pangan yang memadai. Dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, dapat dinilai sejauh mana kebutuhan pangan domestik dapat dipenuhi dari produksi lokal sehingga dapat dipastikan pula bahwa sumber daya alam yang tersedia dapat memenuhi kebutuhan pangan seluruh populasi secara berkelanjutan. Suplai pangan oleh lingkungan di Kabupaten Pohuwato mencapai 1,164,590,991,104 kkal, sementara kebutuhan hanya berkisar 120,802,060,750 kkal. Dengan kondisi tersebut, daya dukung lingkungan untuk penyediaan pangan mampu mengakomodir hingga 1,483,097 jiwa. Di satu sisi, jumlah populasi hanya mencapai 160,187 jiwa sehingga disimpulkan bahwa ketersediaan pangan di Kabupaten Pohuwato masih bisa mencukupi kebutuhan lokal.

Tabel 2.10 Status Daya Dukung Penyediaan Pangan Kabupaten Gorontalo

Model (Populasi Pergrid)	Indikator Penyediaan Pangan					
	Ketersediaan (Supply)	Kebutuhan (Demand)	Ambang Batas	Selisih	Persentase Wilayah Masih Mendukung	Persentase Wilayah Tidak Mendukung
	kkal	kkal	Jiwa	Jiwa	%	%
160,187	1,164,590,991,104	120,802,060,750	1,483,097	1.322,910	35.06	0.20

Sumber: DDDTLH, Provinsi Gorontalo

I. Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks kualitas lingkungan diukur menggunakan 3 (tiga) dimensi yakni kualitas air, kualitas udara dan kualitas lahan. Indeks kualitas lingkungan Kabupaten Pohuwato hingga tahun 2023 berada pada kategori "baik" dengan skor indeks 80.07. Di satu sisi, indeks kualitas air sebesar 53.7 "cemar sedang" atau di bawah dari standar 54.55 "sedang". Sementara indeks kualitas udara sebesar 96.55 dan indeks kualitas lahan mencapai 94.88 atau "baik". Rendahnya kualitas air di

Kabupaten Pohuwato disebabkan oleh menurunnya debit air yang diakibatkan oleh kemarau. Selain itu, pencemaran air juga karena efek dari pembuangan limbah yang bersumber dari aktivitas pertambangan sehingga perairan sungai teridentifikasi mengandung logam merkuri.

Tabel 2.11 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Pohuwato Tahun 2023

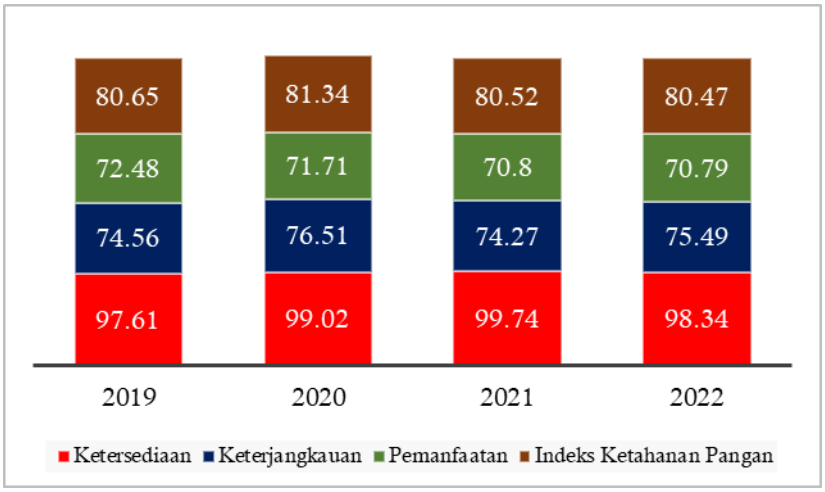
Indeks Kualitas Air	Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Lahan	IKLH
53.7	96.55	94.88	80.07

Sumber: Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

J. Kondisi Pangan

Kedudukan pangan dalam konteks ini tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat akan gizi dan nutrisi, tetapi juga memiliki dampak yang sangat luas terhadap pertumbuhan ekonomi, keamanan pangan, stabilitas sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Penyediaan pangan yang memadai dan berkualitas menjadi landasan bagi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

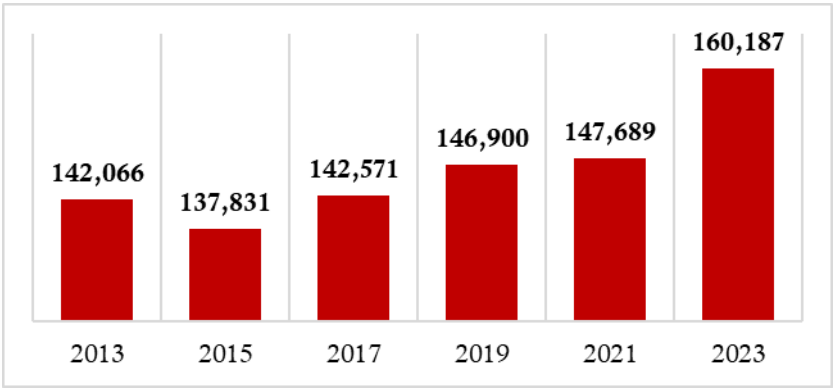
Indeks ketahanan pangan merupakan indikator penting dalam mengevaluasi kemampuan suatu daerah dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduknya secara berkelanjutan. Indeks ketahan pangan diukur berdasarkan tiga komponen yakni indeks ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Tren ketersediaan pangan selama periode 2019-2022 menunjukkan peningkatan yang stabil dari 97.61 pada tahun 2019 menjadi 98.34 pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa produksi pangan di Kabupaten Pohwutao cukup baik dan dapat memenuhi kebutuhan penduduk dengan baik. Meskipun mengalami fluktuasi kecil, indeks keterjangkauan pangan menunjukkan tren yang cukup stabil dari tahun 2019 hingga 2022. Keterjangkauan pangan yang relatif tinggi menunjukkan bahwa harga pangan di daerah tersebut masih dalam kisaran yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Sedangkan indeks pemanfaatan pangan cenderung menurun secara perlahan dari 72.48 pada tahun 2019 menjadi 70.79 pada tahun 2022. Hal ini dapat mengindikasikan adanya potensi masalah terkait dengan aksesibilitas atau pengetahuan tentang nutrisi di kalangan masyarakat.



Gambar 2.3 Kondisi Pangan Kabupaten Pohuwato, 2019-2022

2.1.2. Demografi

Penduduk Pohuwato Indonesia adalah semua orang yang berdomisili di wilayah territorial Pohuwato selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap. Berdasarkan data BPS, Penduduk Kabupaten Pohuwato tahun 2023 berjumlah 160,187 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,89. Penduduk Kabupaten Pohuwato tersebar di 13 Kecamatan. Kecamatan Marisa yang merupakan ibukota Kabupaten Pohuwato menjadi Kecamatan dengan persentase penduduk paling banyak sebesar 14,53 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Pohuwato. Berdasarkan data BPS Kabupaten Pohuwato jumlah penduduk dari tahun 2013 hingga tahun 2023 terus mengalami peningkatan karena didorong oleh dua hal, yaitu mortalitas dan penduduk pendatang, perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Pohuwato seperti pada grafik berikut ini:



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pohuwato, 2024.

Gambar 2.4 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Pohuwato, 2013 - 2023

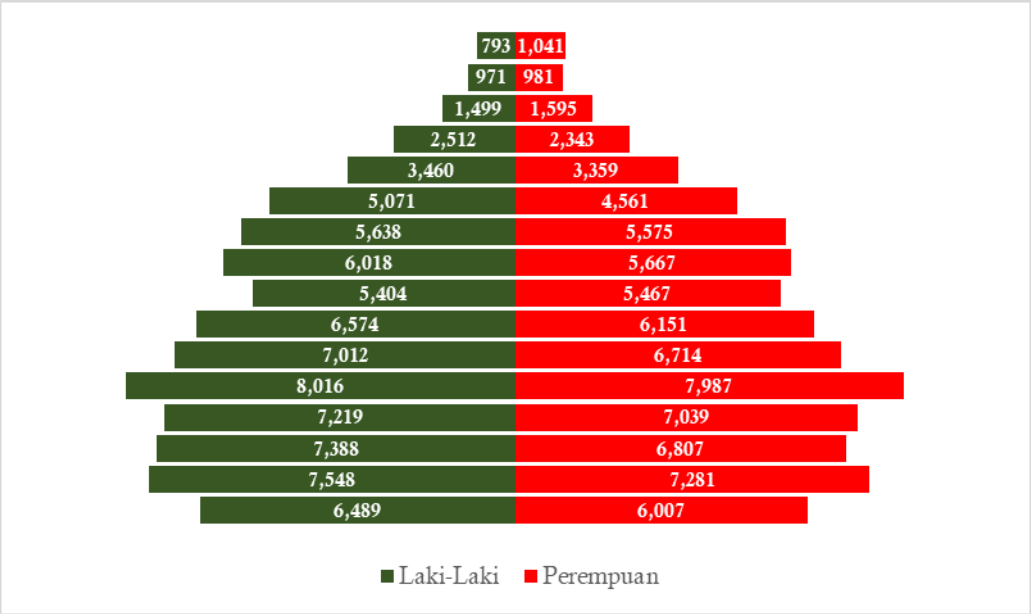
Data di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Pohuwato selama satu dekade terakhir mencapai 160.187 jiwa dengan distribusi menurut kecamatan sebagaimana tersaji pada Tabel 2.3. Tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Pohuwato rata-rata 37,74/km2, kepadatan tertinggi berada di Kecamatan Marisa (671,60/km2) dan yang terendah berada di Kecamatan Popayato Timur (12,62/km2). Setiap tahun terjadi peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Pohuwato. Faktor yang menyebabkan kenaikan jumlah penduduk ini adalah jumlah kelahiran dan migrasi penduduk. Pertambahan akibat migrasi penduduk diduga yang mendominasi peningkatan jumlah penduduk di kabupaten ini. Secara rinci jumlah penduduk Kabupaten Pohuwato berdasakan kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.12 Jumlah Penduduk Kabupaten Pohuwato Menurut Kecamatan

No	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Paguat	17.096
2	Dengilo	6.656
3	Marisa	23.271
4	Buntulia	13.199
5	Duhiadaa	14.150
6	Taluditi	9.299
7	Lemito	12.099
8	Wanggarasi	5.907
9	Popayato	11.367
10	Popayato Barat	8.328
11	Popayato Timur	9.132
12	Randangan	19.078
13	Patilanggio	10.605
Jumlah		**160.187**

Sumber : Badan Pusat Statistik Pohuwato, 2024.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa karakteristik demografi Kabupaten Pohuwato ditandai dengan penyebaran penduduk antar wilayah yang tidak merata, pertumbuhan penduduk yang melampaui angka nasional, struktur demografis yang berbentuk piramidal, dan angka ketergantungan (dependency ratio) yang cukup tinggi, serta rasio jenis kelamin sebesar 103.86.



Gambar 2.5 Piramida Kependudukan Kabupaten Pohuwato Tahun 2023

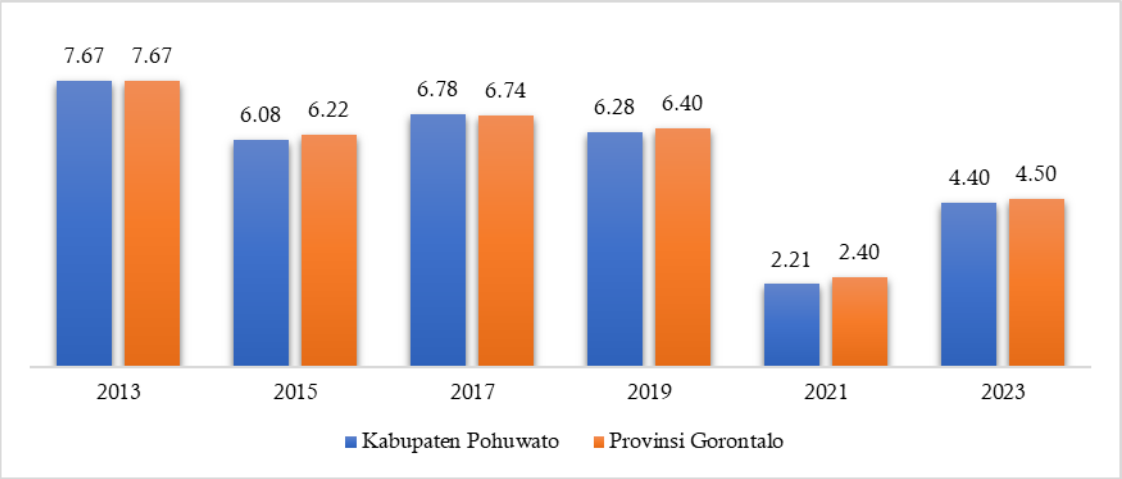
Melihat struktur piramida kependudukan yang meruncing, menandakan bahwa angka angka kelahiran relatif tinggi. Komposisi penduduk Kabupaten Pohuwato didominasi oleh usia produktif dengan rasio ketergantungan sebesar 43.29%. Di Kabupaten Pohuwato, setiap 100 penduduk usia produktif hanya bertanggung jawab terhadap 43 hingga 44 penduduk usia tidak produktif. Rasio ketergantungan yang rendah ini membawa tantangan dan peluang yang signifikan bagi daerah tersebut. Dari satu sisi, pertumbuhan jumlah penduduk usia produktif dapat menjadi kekuatan besar dalam sumber daya tenaga kerja, yang berpotensi mempercepat pertumbuhan ekonomi. Namun, ada risiko yang terkait, seperti kekurangan kualitas sumber daya manusia, kurangnya lapangan kerja, yang bisa memunculkan masalah sosial seperti pengangguran dan kemiskinan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk fokus pada penyediaan lapangan kerja yang memadai dan meningkatkan keterampilan serta produktivitas tenaga kerja agar dapat bersaing secara efektif di Kabupaten Pohuwato.

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1. Aspek Kesejahteraan Ekonomi

a) Pertumbuhan PDRB

Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilihat pada sejumlah indikator, antara lain: laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan, PDRB per kapita, serta tingkat kemiskinan.



Gambar 2.6 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pohuwato dan Provinsi, 2013-2023

Selama sepuluh tahun terakhir, perekonomian Kabupaten Pohuwato mengalami kontraksi dari 7.67% pada tahun dasar 2013 hingga 4.40% di tahun 2023. Setelah diperparah oleh pandemi hingga merosot -0.18%, secara perlahan ekonomi Kabupaten Pohuwato mulai merangkak naik namum belum mampu mencapai kondisi pada masa sebelum pandemi yakni di atas 6%. Ini mengindikasikan bahwa upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pohuwato untuk menstimulus pemulihan ekonomi cenderung berjalan efektif.

Tabel 2.13 Produk Domestik Regional Bruto ADHB dan ADHK Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)

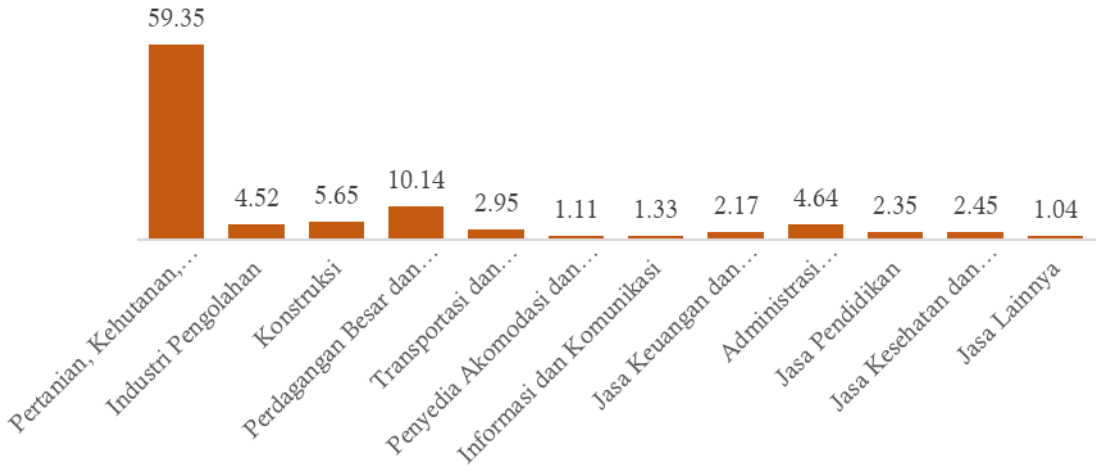
Sektor PDRB	ADHB				ADHK			
	2010	2015	2020	2023	2010	2015	2020	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,479,998.03	2,699,507.90	4,035,026.73	4,651,868.80	1,479,998.03	2,048,911.66	2,633,947.93	2,802,523.73
Pertambangan dan Penggalian	36,797.36	42,949.37	52,204.54	61,520.40	36,797.36	38,530.92	38,370.49	42,265.39
Industri Pengolahan	114,127.76	204,573.41	305,914.54	393,658.60	114,127.76	154,488.72	202,405.24	228,491.84

Pengadaan Listrik dan Gas	1,345.80	1,424.90	3,037.67	3,732.10	1,345.80	2,201.96	3,549.17	4,220.95
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	669.44	1,072.50	2,001.49	2,289.90	669.44	886.93	1,532.76	1,539.68
Konstruksi	178,294.19	303,092.92	377,854.69	545,229.90	178,294.19	238,714.67	269,735.01	325,984.03
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	212,201.09	414,829.11	719,927.49	989,279.10	212,201.09	344,246.08	513,443.79	642,302.47
Transportasi dan Pergudangan	66,778.37	144,272.81	189,658.89	235,500.70	66,778.37	120,149.77	145,364.00	159,462.84
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	30,682.47	49,403.90	75,807.28	91,855.40	30,682.47	39,986.89	55,050.98	64,283.87
Informasi dan Komunikasi	34,916.37	60,179.00	92,263.84	99,705.80	34,916.37	53,052.64	80,295.24	85,518.54
Jasa Keuangan dan Asuransi	44,519.88	88,719.04	156,092.65	172,882.90	44,519.88	67,740.41	106,199.43	100,901.34
Real Estate	22,513.37	37,145.54	52,941.76	55,951.90	22,513.37	32,662.32	42,631.07	43,591.18
Jasa Perusahaan	2,800.00	4,370.34	5,595.57	6,283.80	2,800.00	3,351.89	3,894.96	4,060.86
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	162,384.08	249,889.18	270,704.02	318,699.60	162,384.08	213,049.99	220,663.64	238,069.27
Jasa Pendidikan	51,881.14	104,063.81	169,702.96	197,756.60	51,881.14	85,198.35	115,947.28	126,098.22
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	63,160.78	111,316.34	163,456.50	211,255.00	63,160.78	89,439.34	119,301.88	139,727.42
Jasa lainnya	32,232.68	52,821.73	63,905.92	73,220.60	32,232.68	45,234.46	49,995.95	53,482.12
PDRB	**2,535,302.83**	**4,569,631.79**	**6,736,096.55**	**8,110,691.30**	**2,535,302.83**	**3,577,847.00**	**4,602,328.82**	**5,062,523.77**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pohuwato, 2024.

Kinerja ekonomi Kabupaten Pohuwato tercermin pada pertumbuhan nilai PDRB atas dasar harga berlaku dan harga konstan selama satu dekade terakhir. DI tahun dasar 2010, nilai PDRB ADHB sebesar Rp. 2,535,302.83 dan meningkat menjadi Rp. 8,110,691.30 di tahun 2023. Rata-rata distribusi PDRB Kabupaten Pohuwato selama 10 tahun terakhir menunjukkan bahwa perekonomian Pohuwato masih sangat bergantung pada sektor pertanian. Sektor pertanian juga menjadi

sektor yang paling konsisten pertumbuhannya selama sepuluh tahun terakhir, sedangkan sektor lainnya cenderung berfluktuasi.



Gambar 2.7 Rata-Rata Distribusi PDRB Kabupaten Pohuwato, 2013-2023

Kebergantungan yang tinggi pada sektor pertanian dapat menimbulkan risiko bagi keberlanjutan ekonomi Kabupaten Pohuwato. Ketergantungan yang berlebihan pada satu sektor membuat ekonomi daerah rentan terhadap fluktuasi harga komoditas dan risiko iklim. Selain itu, fokus yang terlalu besar pada sektor pertanian juga dapat menghambat diversifikasi ekonomi dan pengembangan sektor lain yang memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan. Oleh karena itu, meskipun pertumbuhan PDRB yang kuat adalah hal yang positif, Kabupaten Pohuwato perlu memperhatikan diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor pertanian. Diversifikasi ini dapat dilakukan melalui pengembangan sektor-sektor lain seperti industri, pariwisata, atau jasa yang memiliki potensi pertumbuhan yang lebih tinggi. Selain itu, investasi dalam peningkatan infrastruktur dan sumber daya manusia juga penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Pohuwato.

Tabel 2.14 Produk Domestik Regional Bruto ADHB dan ADHK Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)

Sektor PDRB	ADHB				ADHK			
	2010	2015	2020	2023	2010	2015	2020	2023
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1,447,199.09	2,605,578.67	3,839,107.25	4,525,525.52	1,447,199.09	2,077,580.52	2,712,823.81	2,921,641.51
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	13,194.53	25,043.08	39,026.36	45,101.42	13,194.53	19,579.77	27,428.66	29,260.46
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	434,654.56	813,370.77	985,070.58	1,103,877.11	434,654.56	581,909.57	636,571.41	664,694.60
Pembentukan Modal Tetap Bruto	534,200.02	977,883.88	1,309,725.13	1,543,657.00	534,200.02	801,178.70	954,143.30	1,015,092.61

Perubahan Inventori	69,049.23	92,551.96	126,769.88	124,531.84	69,049.23	71,068.26	66,962.82	59,529.41
Net Ekspor Barang dan Jasa	37,005.38	55,203.43	436,397.35	767,998.42	37,005.38	26,530.18	204,398.83	372,305.18
PDRB	**2,535,302.83**	**4,569,631.79**	**6,736,096.55**	**8,110,691.31**	**2,535,302.83**	**3,577,847.00**	**4,602,328.82**	**5,062,523.77**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pohuwato 2024

Dari sisi pengeluaran, PDRB Kabupaten Pohuwato paling besar disumbang oleh konsumsi rumah tangga dengan nilai PDRB mencapai Rp. 4,525,525.52. Selang sepuluh tahun terakhir, kontribusi PDRB dari sisi pengeluaran rumah tangga terus meningkat signifikan. Selain itu, net ekspor barang dan jasa juga terus mengalami kenaikan positif, yang berarti Kabupaten Pohuwato memiliki potensi ekspor yang lebih besar daripada impor. Kenaikan net ekspor ini memberikan dorongan tambahan bagi pertumbuhan ekonomi daerah karena ekspor seringkali merupakan salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi.

Tabel 2.15 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten/Kota Wilayah Provinsi Gorontalo, 2010-2023

Kabupaten/Kota	2010	2023	Rata-Rata Pertumbuhan
Kabupaten Boalemo	6.25	4.42	5.6
Kabupaten Gorontalo	7.69	4.51	5.93
Kabupaten Pohuwato	**7.3**	**4.40**	**5.71**
Kabupaten Bone Bolango	6.7	4.47	5.83
Kabupaten Gorontalo Utara	6.93	4.31	5.9
Kota Gorontalo	7.6	4.52	6.31

Sumber: Data BPS Provinsi Gorontalo, diolah (2024)

b). Inflasi

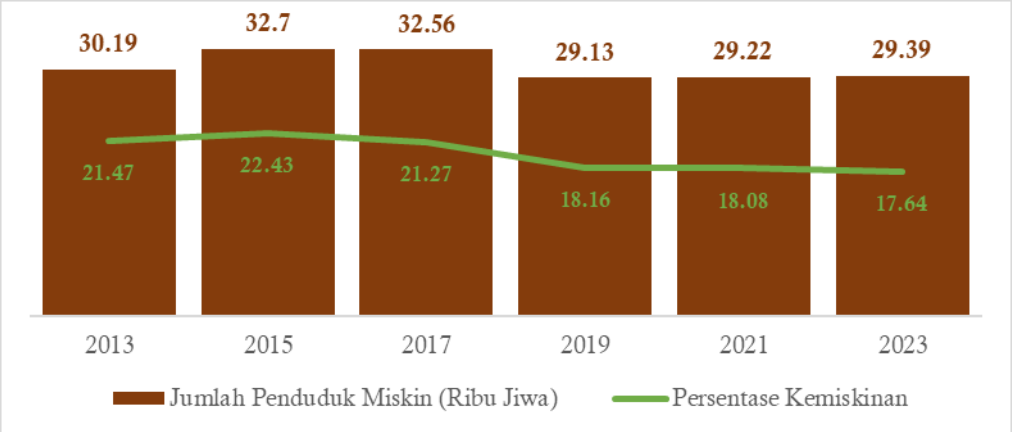
Inflasi adalah salah satu parameter yang digunakan untuk menilai kesehatan ekonomi suatu wilayah. Tingkat inflasi yang tinggi seringkali mengindikasikan perlambatan pertumbuhan ekonomi, sementara stabilitas inflasi menandakan perbaikan ekonomi. Berdasarkan data yang dikumpulkan dari Pohuwato dalam publikasi "Pohuwato dalam Angka 2024", terlihat bahwa tingkat inflasi Kabupaten Pohuwato pada tahun 2023 mencapai 3.88, menurun dari 5.15 pada tahun sebelumnya, 2022. Walaupun demikian, tingkat inflasi tahun 2023 masih lebih tinggi dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021 yang hanya mencapai 2.59.

Pengurangan tingkat inflasi dari tahun 2022 ke 2023 menunjukkan adanya upaya stabilisasi ekonomi di Kabupaten Pohuwato. Namun, perlu diperhatikan bahwa inflasi masih berada pada tingkat yang cukup signifikan, yang dapat menandakan

adanya tekanan harga dalam perekonomian daerah tersebut. Ini bisa menjadi sinyal untuk pemerintah dan pelaku ekonomi setempat untuk terus memantau dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjaga stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Terlebih lagi, perbandingan dengan tingkat inflasi pada tahun sebelumnya menunjukkan perlunya perbaikan lebih lanjut dalam mengelola faktor-faktor yang memengaruhi inflasi di Kabupaten Pohuwato.

c). Kemiskinan

Tren kemiskinan merupakan salah satu aspek krusial yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan daerah. Fenomena kemiskinan tidak hanya mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat, tetapi juga merupakan indikator penting dalam mengevaluasi keberhasilan program pembangunan. Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, pemahaman mendalam terhadap tren kemiskinan diperlukan agar strategi dan kebijakan yang diimplementasikan dapat secara efektif menangani akar penyebab kemiskinan serta mendorong inklusi sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

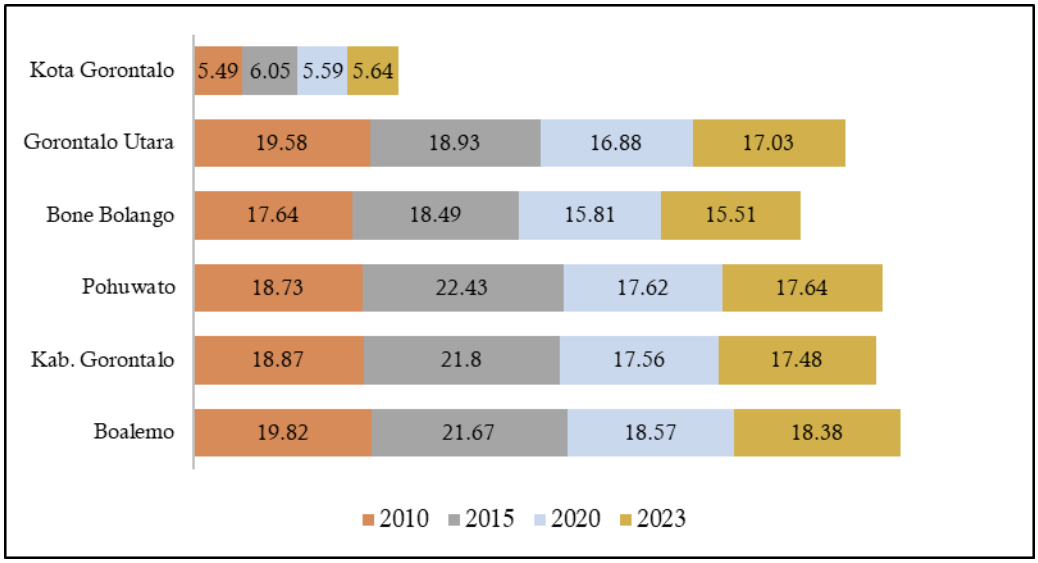


Sumber: Badan Pusat Statistik Pohuwato, 2024

Gambar 2.8 Perkembangan Persentase Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Pohuwato Tahun 2013 – 2023

Tren jumlah penduduk miskin Kabupaten Pohuwato menunjukkan fluktuasi selama periode sepuluh tahun terakhir. Meskipun demikian, ada kecenderungan penurunan yang dapat diamati dari tahun 2013 hingga 2023. Terdapat peningkatan yang signifikan antara tahun 2013 dan 2015, diikuti oleh penurunan kecil pada tahun 2017, dan penurunan yang lebih substansial pada tahun 2019. Permasalahan kemiskinan di Kabupaten Pohuwato terkait dengan tingkat kedalaman kemiskinan,

artinya kondisi ekonomi warga miskin cukup parah yang disebabkan oleh multi dimensi sehingga membutuhkan waktu dan strategi yang tepat dalam penanggulangannya. Kabupaten Pohuwato merupakan wilayah penyumbang kemiskinan terbesar kedua setelah Boalemo.



Gambar 2.9. Perbandingan Angka Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Gorontalo Tahun 2010 – 2023

Beberapa agenda pokok kebijakan pembangunan Kabupaten Pohuwato dalam rangka pengurangan kemiskinan di daerah antara lain percepatan pembangunan sektor pertanian sebagai sektor penyerap tenaga kerja terbesar di Pohuwato yaitu 95,30% tahun 2022, mendorong tumbuh kembangnya KUKM dan IKM, regulasi sektor ekonomi untuk mendorong peningkatan investasi di daerah, serta kegiatan padat karya melalui belanja modal pemerintah daerah. Dengan kebijakan ini diharapkan jumlah penduduk miskin Kabupaten Pohuwato akan terus berkurang, dan prediksi pada tahun 2045 jumlah penduduk miskin 5 persen.

c). Ketenagakerjaan

Data yang mencerminkan situasi ketenagakerjaan menjadi sangat penting sebagai pendukung dalam perumusan kebijakan, karena ketenagakerjaan merupakan isu sentral dalam proses pembangunan. Setiap tahap pembangunan yang diterapkan di suatu wilayah membutuhkan tenaga kerja sebagai pendorong utama. Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lapangan kerja yang cukup dan memadai, sehingga penduduk dapat mencapai tingkat kesejahteraan yang diharapkan.

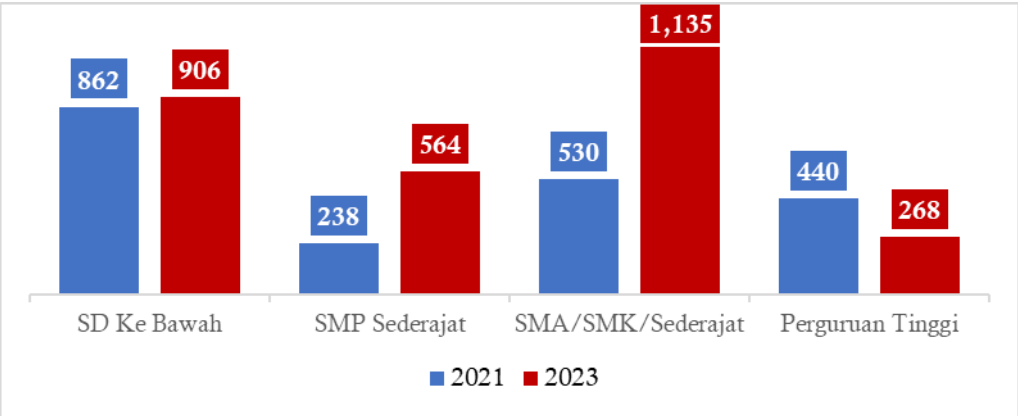
Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Pohuwato selang tahun 2010-2023 hanya mengalami sedikit penurunan dari 4.05% menjadi 3.46%. Meskipun terjadi sedikit penurunan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Pohuwato dari tahun 2010 hingga 2023, penurunan ini tidak signifikan. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam menciptakan lapangan kerja baru atau mengurangi tingkat pengangguran secara substansial di wilayah tersebut. Di level Provinsi, angka pengangguran Pohuwato berada pada urutan kedua tertinggi setelah Kota Gorontalo. Meski begitu, angka kemiskinan Kabupaten Pohuwato berfluktuasi dengan tren yang relatif datar jika dibandingkan dengan Kabupaten lainnya.

Tabel 2.16. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Di Provinsi Gorontalo Tahun 2010-2023

Kabupaten/Kota	2010	2015	2020	2021	2022	2023
Kab. Gorontalo	4.37	3.62	3.41	2.12	1.83	2.48
Boalemo	4.05	4.57	3.66	3.57	2.07	2.86
Pohuwato	**4.05**	**2.06**	**3.1**	**2.45**	**3.41**	**3.46**
Bone Bolango	8.28	6.76	4.48	3.45	3.29	3.39
Gorontalo Utara	1.99	5.61	5.21	2.3	2.02	2.77
Kota Gorontalo	7.92	6.14	6.52	4.55	3.5	4.06
Provinsi Gorontalo	5.16	4.65	4.28	3.01	2.58	3.06

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo, 2024

Berdasarkan jenjang pendidikan, pengangguran di Kabupaten Pohuwato disumbang oleh lulusan SMA sederajat sebanyak 1,135 jiwa meningkat dari tahun 2021 sebanyak 530 jiwa. Data menunjukkan adanya kesenjangan antara tingkat pendidikan yang dimiliki oleh individu dengan permintaan di pasar kerja lokal. Meskipun telah menyelesaikan pendidikan tinggi, masih ada kesulitan dalam menemukan pekerjaan yang sesuai. Tingginya tingkat pengangguran di kalangan lulusan SMA/SMK terutama disebabkan oleh kurangnya peluang kerja yang sesuai dengan keterampilan yang mereka miliki setelah menyelesaikan pendidikan menengah. Ini bisa disebabkan oleh minimnya industri atau usaha yang dapat menyerap lulusan SMA/SMK, terutama dalam bidang-bidang khusus yang diajarkan selama pendidikan menengah. Selain faktor kesesuaian kriteria pendidikan dengan permintaan di pasar kerja, penyebab tingginya angka pengangguran dari jenjang SMA juga diindikasikan karena adanya faktor gengsi atau stigma sosial yang membatasi pilihan mereka untuk mengejar pekerjaan tertentu yang dianggap layak.

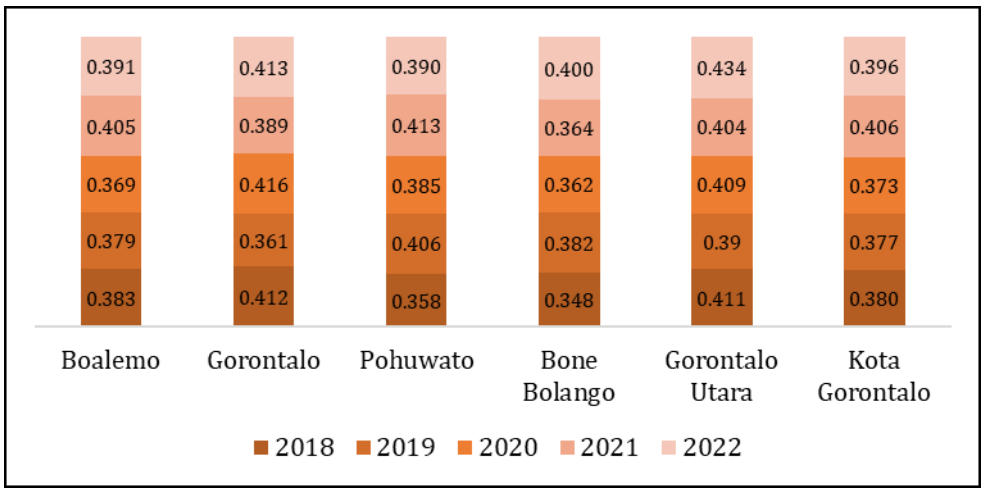


Sumber: BPS Kabupaten Pohuwato, 2024
Gambar 2.10. Jumlah Pengangguran Kabupaten Pohuwato Berdasarkan Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan Tahun 201-2023 (Ribu Jiwa)

c). Indeks Gini

Gini Ratio merupakan sebuah pendekatan statistik yang digunakan untuk mengevaluasi distribusi pendapatan atau kekayaan dalam suatu daerah. Karena berkenaan dengan kesenjangan ekonomi, indeks gini menjadi alat yang penting dalam merancang kebijakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

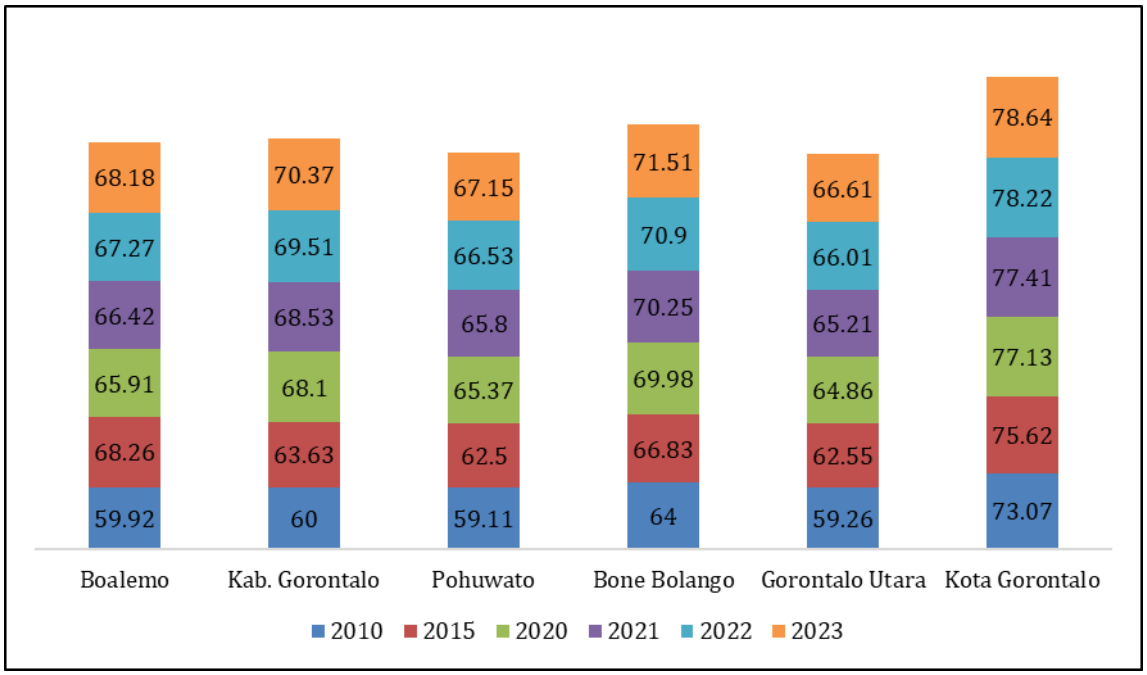
Seperti ditampilkan oleh gambar di bawah, gini ratio Kabupaten Pohuwato adalah terendah di regional Provinsi Gorontalo karena mengalami penurunan yang signifikasi dari 0.431 di tahun 2021 menjadi 0.390 di tahun 2022. Ini menunjukkan bahwa kesetaraan pendapatan di Kabupaten Pohuwato mengalami perbaikan pada tahun 2022. Artinya, distribusi pendapatan menjadi lebih merata di antara penduduknya.



Sumber: BPS Provinsi Gorontalo, 2024.
Gambar 2.11. Perbandingan Rasio Gini Kabupaten Pohuwato Dengan Kabupaten/Kota Di Provinsi Gorontalo, 2018-2022

e). Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak.



Sumber: BPS Provinsi Gorontalo, 2024.

Gambar 2.12. Komparasi IPM Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo, 2010-2023

Jika merujuk pada data di atas, IPM Kabupaten Pohuwato mengalami peningkatan sebesar 8,04 selama satu dekade terakhir dari baseline tahun 2010 (59.11) sedangkan tahun 2023 (67,15). Pada level daerah, IPM Kabupaten Pohuwato menempati urutan kelima dari daerah kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo. Sementara rata-rata IPM nasional sebesar 72,91 dengan demikian IPM Kabupaten Pohuwato jauh lebih rendah, yang memerlukan perhatian pemerintah daerah. Mengacu pada standar United Nations Development Program (UNDP), pembangunan manusia terdiri dari 4 kriteria, yakni IPM >80 kategori sangat tinggi, IPM 70-79 kategori tinggi. Serta IPM 60-79 kategori sedang. Selang tahun 2010 - 2023, status pembangunan manusia Kabupaten Pohuwato masih berada di level “sedang”.

Tabel 2.17. Capaian Dimensi IPM Kabupaten Pohuwato dan Provinsi Gorontalo, 2010-2023

Indikator IPM	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
IPM Kabupaten Pohuwato	**59.11**	**59.85**	**60.48**	**61.38**	**61.74**	**62.50**	**63.17**	**63.88**	**64.44**	**65.27**	**65.37**	**65.80**	**66.53**	**67.15**
Umur Harapan Hidup	61.37	61.62	61.86	62.09	62.33	62.43	62.65	62.86	63.25	63.83	64.07	64.30	64.62	64.95
Harapan Lama Sekolah	10.91	11.06	11.31	11.48	11.68	12.03	12.28	12.34	12.35	12.36	12.37	12.38	12.39	12.46
Rata-Rata Lama Sekolah	5.88	6.17	6.26	6.53	6.54	6.62	6.67	6.84	6.85	7.10	7.12	7.26	7.35	7.59
Pengeluaran Per Kapita	8,465	8,524	8,644	8,889	8,925	9,146	9,381	9,715	10,076	10,316	10,255	10,409	10,913	11,018
IPM Provinsi Gorontalo	**62.65**	**63.48**	**64.16**	**64.70**	**65.17**	**65.86**	**66.29**	**67.01**	**67.71**	**68.49**	**68.68**	**69.00**	**69.81**	**70.45**
Umur Harapan Hidup	66.41	66.59	66.76	66.92	67.00	67.12	67.13	67.14	67.45	67.93	68.07	68.19	68.51	68.83
Harapan Lama Sekolah	11.12	11.68	11.78	12.13	12.49	12.70	12.88	13.01	13.03	13.06	13.08	13.11	13.12	13.16
Rata-Rata Lama Sekolah	6.85	6.89	6.92	6.96	6.97	7.05	7.12	7.28	7.46	7.69	7.82	7.90	8.02	8.10
Pengeluaran Per Kapita	8,207	8,293	8,673	8,719	8,762	9,035	9,175	9,532	9,839	10,075	10,020	10,157	10,687	11,069

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo, 2024.

2.2.2. Aspek Kesejahteraan Sosial Budaya

Indikator-indikator yang dianalisis dalam fokus kesejahteraan sosial adalah mencakup dua indikator utama, yakni indikator pendidikan dan indikator kesehatan. Indikator pendidikan yang dicermati antara lain terkait dengan angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni. Sedangkan indikator kesehatan mencakup antara lain usia harapan hidup, dan persentase balita gizi buruk. Selain itu juga penting ditampilkan indikator lain yang menunjukkan kualitas Sumber daya Manusia (SDM) salah satu indikatornya adalah IPM.

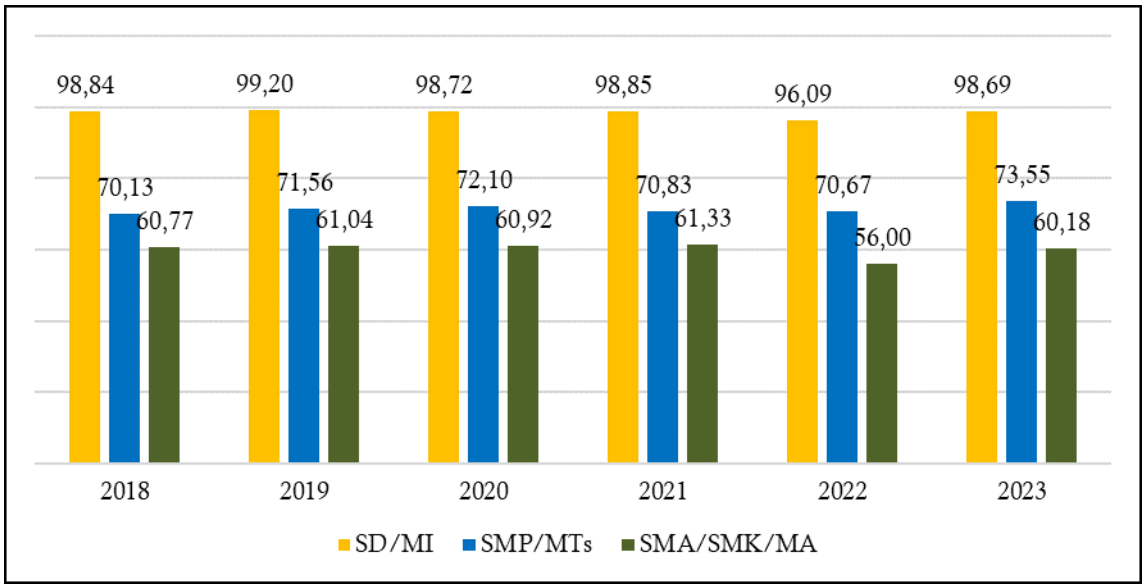
a). Pendidikan

Tabel 2.18. Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Pohuwato

Variabel	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Angka Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	6,85 Tahun	7,10 Tahun	7,12 Tahun	7,26 Tahun	7,35 Tahun	7,59 Tahun

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pohuwato, 2024.

Perkembangan kinerja pendidikan selama periode 2018 - 2022, meskipun tidak mengalami penurunan, tetapi juga tidak menunjukkan kinerja peningkatan yang menggembirakan. Dalam 5 tahun rata-rata lama sekolah hanya meningkat 0,3 persen per tahun, dari tahun 2018 hingga tahun 2023. Sementara dilihat dari Angka Melek Huruf (AMH) kinerjanya cukup baik peningkatannya, hingga pada tahun 2017 AHM Kabupaten Pohuwato telah mencapai 99,30 persen. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Pohuwato perlu memikirkan dengan fokus pada program peningkatan rata-rata lama sekolah, sebab perkembangannya tidak terlalu menggembirakan.



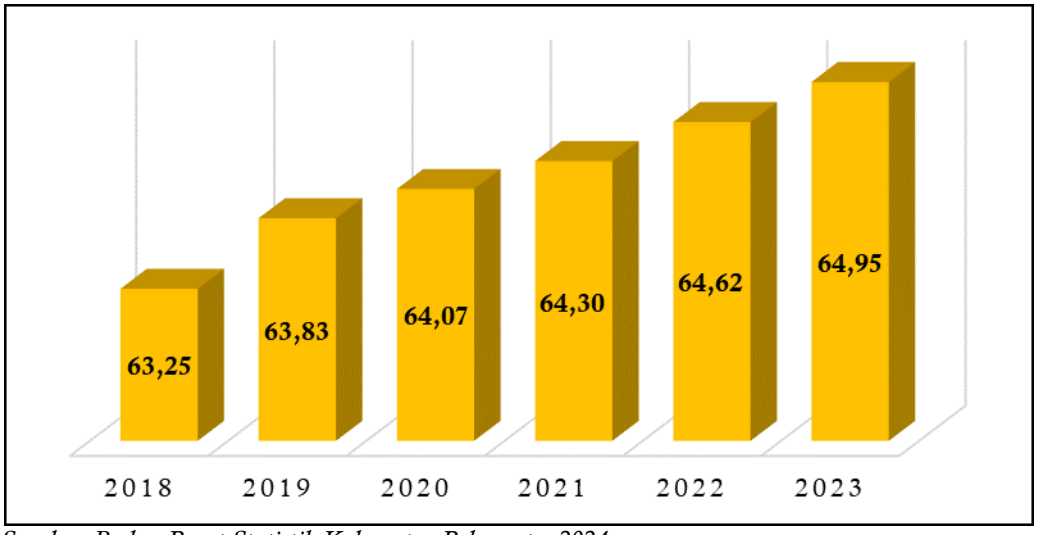
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pohuwato, 2024.

Gambar 2.13. Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kabupaten Pohuwato, Tahun 2018 – 2023

Secara keseluruhan angka partisipasi murni untuk setiap tingkatan pendidikan di Kabupaten Pohuwato terbilang cukup, sekalipun pada tahun 2022 tingkat pendidikan APM menurun, danmeningkat lagi di tahun 2023 untuk semua jenjang pendidikan. APM tingkat pendidikan dasar sejak awal terbentuknya Kabupaten Pohuwato sudah lumayan tinggi dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2018 telah melampaui 100 persen. Sementara angka partisipasi murni sekolah menengah pertama pada tahun 2018 mengalami kenaikan yang cukup signifikan, namun demikian APM SMP tetap cenderung meningkat, demikian pula halnya kinerja APM SMA terus membaik hingga tahun 2021 sebesar 61 persen. Sekalipun demikian bahwa angka partisipasi murni di Pohuwato pada tingkat SMA

masih menjadi isu penting dalam permasalahan pembangunan Kabupaten Pohuwato dalam jangka panjang.

b). Kesehatan



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pohuwato, 2024.

Gambar 2.14. Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Pohuwato, Tahun 2018-2023 (dalam tahun)

Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Pohuwato mencapai peningkatan signifikan selama periode 2018 - 2023, pada tahun tahun 2018 rata UHH 63,25, sedangkan pada tahun 2020 mencapai 64,07 dan tahun 2023 meningkat menjadi 64,95 tahun. Ke depan, kebijakan pembangunan kesehatan tetap harus diarahkan untuk menjaga tren peningkatan UHH tersebut.

Tabel 2.19. Jumlah Kasus Bayi Gizi Buruk (BGB) Kabupaten Pohuwato Tahun 2018-2022

Variabel	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bayi Gizi Buruk (BGB)	26	20	10	16	23	

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pohuwato, 2023.

Kinerja pembangunan bidang kesehatan juga nampak pada jumlah kasus bayi gizi buruk, bayi berat badang lahir rendah, dan kasus kurang energi kronis. Kasus bayi gizi buruk secara umum mengalami perbaikan dalam 20 tahun tahun terakhir, menurun dari 238 kasus pada tahun 2005 menjadi 78 kasus pada tahun 2017. Dan di tahun 2017 sebanyak 26 kasus, turun 10 kasus di tahun 2020 tetapi di tahun 2023 meningkat lagi sebanyak 23 kasus.

c). Kesetaraan Gender

Data kesetaraan gender memberikan pemahaman yang lebih baik tentang disparitas antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan keputusan politik. Dalam konteks perencanaan daerah, data kesetaraan gender menjadi landasan penting dalam merancang kebijakan dan program yang berpihak pada semua warga, memastikan bahwa kebutuhan dan kepentingan laki-laki dan perempuan diakomodasi secara adil dan merata.

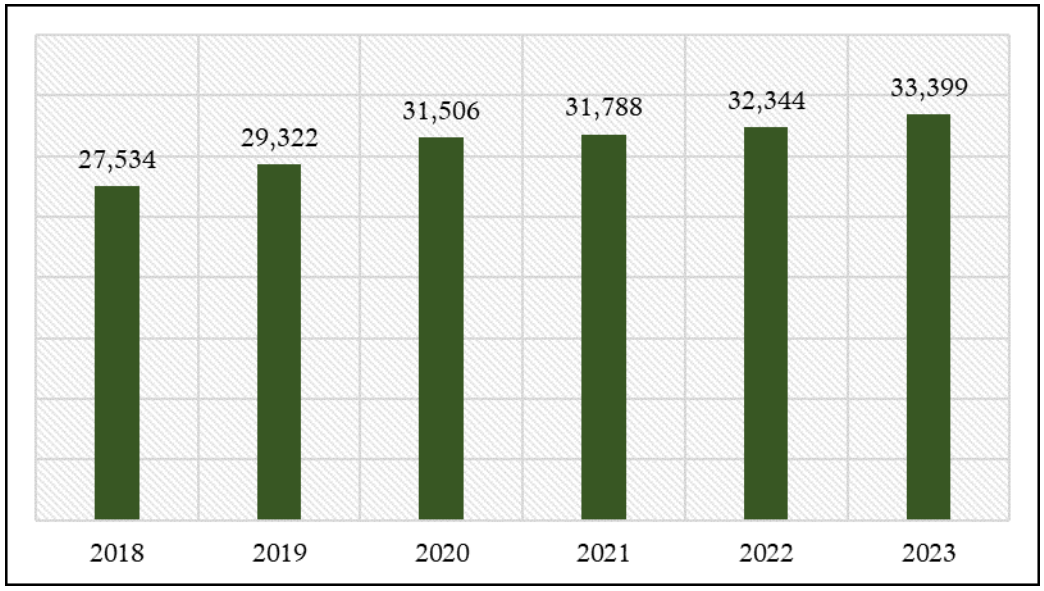
Di Kabupaten Pohuwato, tren positif pembangunan dan pemberdayaan perempuan tercermin melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang meningkat dari tahun 2021 hingga 2023, mencapai 92.39. Namun, meskipun Kabupaten Pohuwato memiliki IPG tertinggi di tingkat Provinsi, mencapai 73.66, namun Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di wilayah tersebut masih tinggi, dengan nilai 0.452, menunjukkan ketidakoptimalan dalam pencapaian pembangunan manusia karena ketidaksetaraan antara pencapaian pembangunan perempuan dan laki-laki. Hal ini menggambarkan bahwa meskipun terdapat kemajuan dalam pemberdayaan perempuan, masih ada kesenjangan struktural, sosial, dan budaya yang perlu diatasi secara menyeluruh di Kabupaten Pohuwato dan mungkin juga di wilayah lain di Provinsi Gorontalo.

2.3. Aspek Daya Saing Daerah

2.3.1. Daya Saing Ekonomi daerah

a). PDRB Per Kapita

Pendapatan per kapita adalah sebuah parameter yang sering dipakai untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi di suatu wilayah. Konsep ini menggambarkan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap individu dalam suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Analisis mengenai pendapatan per kapita memiliki signifikansi yang besar dalam konteks kesejahteraan ekonomi regional, karena tidak hanya mencerminkan tingkat pendapatan masyarakat, tetapi juga memberi gambaran tentang sebaran kekayaan, peluang ekonomi, dan standar hidup secara keseluruhan.



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2024.

Gambar 2.15. Perkembangan PDRB Per Kapita Berdasarkan Harga Konstan Kabupaten Pohuwato Periode 2018-2023 (dalam rupiah)

Dalam 4 tahun terakhir PDRB Per Kapita Kabupaten Pohuwato mengalami perkembangan yang cukup berarti, pada tahun 2018 PDRB perkapita sebesar Rp. 27.534,48 lalu kemudian meningkat pada tahun 2019 menjadi Rp. 29.321,52. Pada tahun 2020 melonjak menjadi Rp. 31.506,34 kemudian naik pada tahun 2021 menjadi Rp. 31.852,09, dan naik menjadi 33,399,00 di tahun 2023. Melonjaknya PDRB perkapita pada tahun 2018 sampai pada tahun 2023 mengindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat terus mengalami perbaikan.

b). Indeks Inklusi Keuangan

Inklusi Keuangan adalah sebuah konsep yang penting dalam upaya meningkatkan aksesibilitas dan pemanfaatan produk serta layanan keuangan oleh masyarakat. Hal ini tercermin dalam penggunaan Indeks Inklusi Keuangan (IKI), yang merupakan alat ukur yang komprehensif untuk menilai tingkat inklusivitas keuangan suatu daerah atau negara. IKI terdiri dari tiga dimensi utama, yaitu akses, penggunaan, dan kualitas layanan keuangan. Masyarakat yang dianggap inklusif secara keuangan adalah mereka yang menggunakan produk dan layanan keuangan dalam kurun waktu 12 bulan terakhir. Strategi inklusi keuangan memerlukan suatu metrik kinerja yang dapat memantau dan mengevaluasi kemajuannya dari waktu ke waktu.

Pentingnya inklusi keuangan tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi semata, tetapi juga berhubungan dengan aspek sosial dan keadilan. Inklusi keuangan dapat menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana keadilan dan pemerataan dalam akses terhadap layanan keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat. Tingkat inklusi keuangan yang tinggi tidak hanya menggambarkan tingkat kesejahteraan ekonomi, tetapi juga mencerminkan kemampuan jasa keuangan dalam mendukung pembangunan nasional secara menyeluruh. Namun, realitas di lapangan seringkali menunjukkan disparitas yang signifikan dalam capaian inklusi keuangan antar wilayah. Contohnya, berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2022, Provinsi Gorontalo menunjukkan capaian inklusi keuangan sebesar 52,21 persen, yang berada di bawah rata-rata nasional sebesar 85,10 persen. Hal ini menandakan perlunya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan aksesibilitas dan pemanfaatan layanan keuangan di wilayah tersebut. Dengan demikian, evaluasi terus menerus terhadap capaian inklusi keuangan perlu dilakukan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam memperkuat sistem keuangan yang inklusif di tingkat lokal.

c). Indeks Ekonomi Hijau

Indeks Ekonomi Hijau (GEI) merupakan sebuah alat untuk untuk mengukur efektivitas transformasi ekonomi menuju pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan. Di Indonesia, GEI mengadopsi tiga pilar utama, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang terdiri dari total 15 indikator untuk mencerminkan pembangunan ekonomi hijau. Pilar ekonomi mencakup indikator seperti intensitas emisi dan energi, serta pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita. Pilar sosial terdiri dari indikator seperti tingkat pengangguran, kemiskinan, angka harapan hidup, dan rata-rata lama sekolah. Sedangkan pilar lingkungan mencakup indikator seperti tutupan lahan, lahan gambut terdegradasi, penurunan emisi, pengelolaan sampah, dan energi baru terbarukan.

Dari hasil perhitungan Indeks Ekonomi Hijau Provinsi pada periode 2015-2021, Provinsi Gorontalo menunjukkan capaian nilai Indeks Ekonomi Hijau sebesar 54,25, yang termasuk dalam kategori baik tier 1. Meskipun demikian, terdapat fluktuasi nilai GEI setiap tahunnya, namun Provinsi Gorontalo tetap

berhasil mempertahankan posisinya dalam kategori baik tier 1, bahkan mengungguli Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara pada tahun 2021. Namun, analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa beberapa nilai komposit masih memerlukan intervensi yang lebih mendukung untuk meningkatkan performa. Intervensi tersebut terutama diperlukan dalam pilar lingkungan, seperti kualitas air dan udara, serta pilar ekonomi dan sosial, seperti intensitas emisi, energi, penanggulangan kemiskinan, dan tingkat pengangguran. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih masif dan terarah untuk memperbaiki indikator-indikator tersebut guna mencapai pembangunan ekonomi hijau yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Gorontalo.

2.4.2. Daya Saing SDM

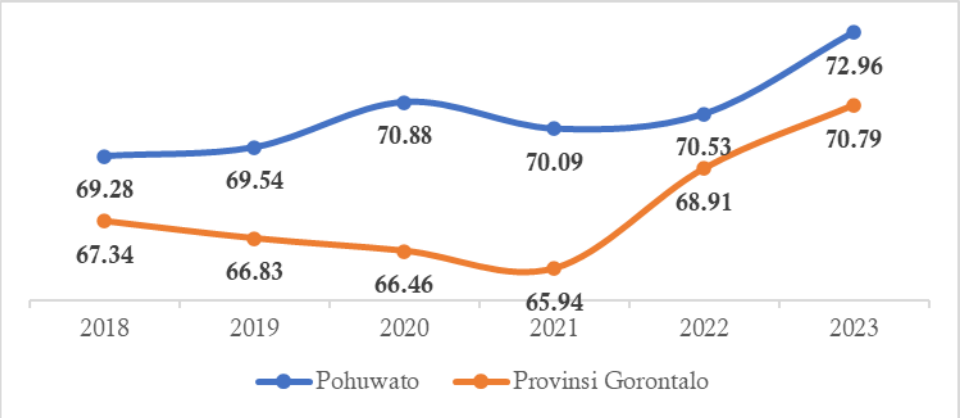
a). Pendidikan

Selama periode 2018-2022, kinerja pendidikan di Kabupaten Pohuwato tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan meskipun tidak mengalami penurunan yang signifikan. Rata-rata lama sekolah hanya meningkat sebesar 0,3 persen per tahun selama lima tahun terakhir. Meskipun Angka Melek Huruf (AMH) menunjukkan peningkatan yang baik, mencapai 99,30 persen pada tahun 2017, namun fokus perhatian perlu diberikan pada peningkatan rata-rata lama sekolah karena perkembangannya yang kurang memuaskan.

Secara keseluruhan, angka partisipasi murni untuk setiap tingkatan pendidikan di Kabupaten Pohuwato tergolong cukup baik. Meskipun terjadi penurunan pada tingkat pendidikan menengah pada tahun 2022, namun angka partisipasi murni kembali meningkat pada tahun 2023 untuk semua jenjang pendidikan. Angka partisipasi murni pendidikan dasar sudah mencapai tingkat yang memuaskan sejak awal berdirinya Kabupaten Pohuwato dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2018. Meskipun demikian, isu penting yang perlu diperhatikan adalah angka partisipasi murni pendidikan menengah atas (SMA) yang masih menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Pohuwato.

b). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja adalah salah satu indikator penting dalam mengukur daya saing sumber daya manusia suatu negara atau wilayah. Partisipasi angkatan kerja mencerminkan seberapa besar proporsi dari populasi usia kerja yang aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi, baik dalam sektor formal maupun informal. Kedudukan tingkat partisipasi angkatan kerja menjadi sangat relevan dalam konteks daya saing sumber daya manusia karena mencerminkan produktivitas, potensi ekonomi, dan kemampuan suatu wilayah dalam memanfaatkan tenaga kerja secara efisien.



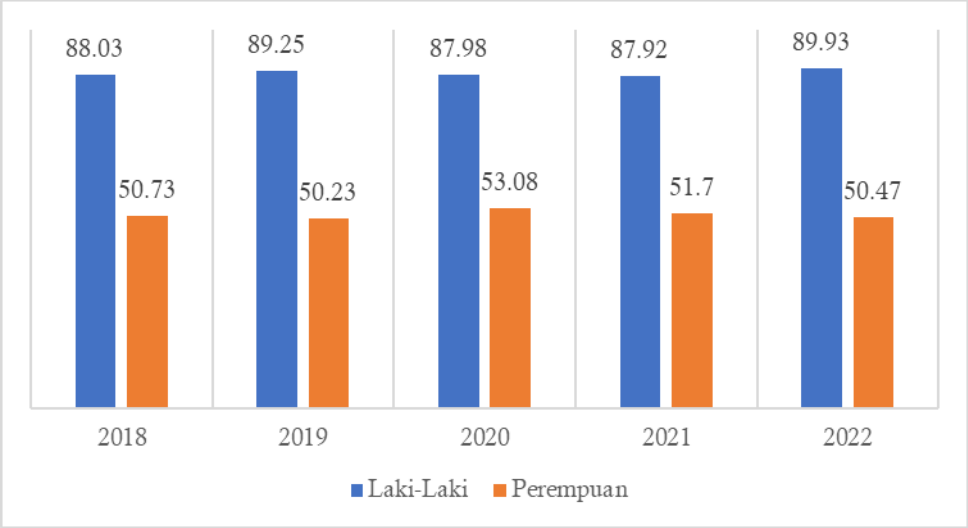
Sumber: BPS Provinsi Gorontalo, 2024

Gambar 2.16. Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Pohuwato dengan Provinsi Gorontalo, 2018-2023

Kurun lima tahun terakhir tingkat partisipasi angkatan kerja terus meningkat signifikan dari 69.28 persen pada baseline tahun 2018 menjadi 72.96 persen di tahun 2023. Pertumbuhan tingkat partisipasi angkatan kerja mencerminkan peningkatan jumlah orang yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, yang dapat menunjukkan peningkatan kemampuan kerja di masyarakat. Hal ini bisa berarti adanya peningkatan keterampilan, pendidikan, atau pelatihan yang diterima oleh penduduk setempat. Ada potensi dalam meningkatkan produktivitas ekonomi di Kabupaten Pohuwato. Dengan lebih banyak tenaga kerja yang tersedia, perusahaan dan sektor ekonomi lokal dapat memanfaatkan sumber daya manusia ini untuk meningkatkan output dan kinerja bisnis.

Capaian TPAK Kabupaten Pohuwato sedikit lebih tinggi dibandingkan capaian Provinsi Gorontalo yang hanya mencapai 70.79 persen. Meskipun Kabupaten Pohuwato mencatat tingkat TPAK yang lebih tinggi dibandingkan

dengan Provinsi Gorontalo, secara overall baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, menunjukkan adanya perluasan peluang kerja. Hal ini dapat menjadi indikator potensial untuk pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Pohuwato dan Provinsi Gorontalo secara keseluruhan.



Gambar 2.17. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Pohuwato, 2018-2022

Data menunjukkan bahwa TPAK laki-laki cenderung relatif stabil selama periode 2018-2022, dengan sedikit fluktuasi tetapi tetap tinggi, dengan kenaikan yang signifikan pada tahun 2022. Di sisi lain, TPAK perempuan menunjukkan fluktuasi yang lebih besar, dengan peningkatan yang cukup besar pada tahun 2020, tetapi kemudian turun pada tahun 2021 dan 2022. Selama periode tersebut, TPAK laki-laki jauh lebih tinggi daripada TPAK perempuan. Perbedaan ini terutama mencolok pada tahun 2018 dan 2019, di mana TPAK laki-laki hampir dua kali lipat TPAK perempuan. Meskipun ada peningkatan kecil dalam TPAK perempuan pada tahun 2020, perbedaan tetap signifikan. Data ini megindikasikan masih terdapat ketimpangan gender dalam TPAK yang dapat disebabkan oleh kurangnya akses terhadap pendidikan dan pelatihan, peran tradisional gender dalam masyarakat, akses terhadap pekerjaan yang layak dan sejajar dengan keterampilan, serta perbedaan dalam tanggung jawab rumah tangga dan perawatan keluarga.

2.4.3. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

a). Jalan dan Jembatan

Peningkatan ekonomi sangat dipengaruhi oleh pengembangan infrastruktur, yang memiliki dampak yang signifikan pada perekonomian suatu wilayah. Oleh

karena itu, Kabupaten pohuwato menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur sebagai salah satu prioritas pembangunan. Fokus utama adalah pada pembangunan dan perbaikan jaringan jalan dan jembatan, termasuk pembangunan infrastruktur transportasi yang strategis untuk menghubungkan pusat-pusat ekonomi, lembaga pendidikan, fasilitas kesehatan, dan area pemukiman.

Dengan total panjang jalan sebesar 1150,62 km, Kabupaten Pohuwato memiliki infrastruktur jalan yang cukup luas. Kehadiran jaringan jalan yang cukup panjang menjadi faktor penting dalam mendukung konektivitas antarwilayah dan mobilitas penduduk serta barang. Komposisi infrastruktur jalan yang terdiri dari jalan aspal, kerikil, tanah, dan jenis lainnya mencerminkan variasi dalam tingkat pengembangan dan perawatan infrastruktur jalan di wilayah tersebut. Keberadaan jalan aspal sepanjang 387,05 km menunjukkan upaya untuk meningkatkan kualitas jalan utama, yang dapat membantu dalam mempercepat mobilitas dan aksesibilitas. Di satu sisi, kondisi jalan di Kabupaten Pohuwato sepanjang 520,877 km mengalami rusak berat dan 9,713 km dalam kondisi rusak, sedangkan jalan dengan baik sepanjang 354,475 km.

Di tahun 2023, di pusat ibu kota Kabupaten Pohuwato, pemerintah meningkatkan kualitas jalan protokol bersamaan dengan pembangunan jalur drainase induk, dengan tujuan untuk menjawab persoalan genangan banjir di pusat kota pemerintahan. Untuk infrastruktur jembatan, pemerintahan telah membangun jembatan penghubung di Kecamatan Paguat dan di Kecamatan Buntulia. Saat ini Kabupaten Pohuwato juga telah ditunjang oleh infrastruktur bandar udara. Pembangunan Bandara Panua Pohuwato merupakan langkah positif yang mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pohuwato.

b). Sumber Daya Air dan irigasi

Kondisi infrastruktur sumber daya air dan irigasi Kabupaten Pohuwato mulai dioptimalkan dari segi kualitas infrastruktur bendungan irigasi. Berdasarkan informasi yang dilansir dari dinas PUPR Kabupaten Pohuwato, saat ini pemerintah menganggarkan kurang lebih 5 miliar untuk pembangunan drainase guna penyelesaian masalah genangan dan banjir. Di wilayah-wilayah penghasil pertanian padi sawah, pemerintah merenovasi sejumlah bendungan. Bahkan yang terbesar saat ini yaitu pembangunan bendungan di Kecamatan Taluditi, yang

diproyeksikan akan mengaliri ratusan hektare sawah dibawahnya. Pada tahun 2023 pemerintah mengalokasikan anggaran DAK irigasi sebesar 22 miliar untuk 3 daerah irigasi yakni Molosipat, Taluditi dan Bunuyo. Pemerintah juga mengupayakan pembangunan bendungan Puncak Jaya atau daerah irigasi Marisa 6. Mengaliri sawah 300 ha sawah yang ada di Kalimas dan Panca Karsa Dua.

c). Air Minum dan Sanitasi

Infrastruktur, termasuk penyediaan air minum dan sanitasi menjadi kebutuhan bagi kegiatan masyarakat. Infrastruktur erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi regional, peningkatan kualitas hidup penduduk dan lingkungan. Tersedianya air minum dan sanitasi sangat diperlukan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya dapat menekan angka kemiskinan dan stunting. Menyahuti hal tersebut untuk pengadaan air bersih oleh pemerintah sangat diperlukan lewat pembangunan sarana dan prasarana, pembangunan sarana air bersih mengalami peningkatan. Jangkauan layanan PDAM yang mendapatkan mandat dari pemerintah daerah menyediakan air bersih terhadap masyarakat terus bertambah. Akan tetapi dilihat dari jumlah pelanggan sebanyak 19,931 belum sebanding dengan jumlah kepala keluarga yang ada, terutama di daerah perdesaan. Terdapat tiga kecamatan jumlah pelanggan air bersih di bawah 1.000 KK, yakni Kecamatan Popayato Timur, Wanggarasi dan Taluditi. Maka dari itu, pemerintah memberikan perhatian serius terkiat pengadaan air bersih, disadari penyediaan air bersih dengan mengandalkan sistem pipanisasi oleh PDAM tentu jangkauannya terbatas hingga ke pelosok desa. Sekaitan dengan hal tersebut, pemerintah menekankan pembangunan sarana air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di perdesaan lewat Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (SPAMS).

d). Perumahan dan Permukiman

Rumah merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi karena berfungsi sebagai tempat perlindungan dan tolak ukur kesejahteraan. Idealnya, setiap keluarga, terutama yang berpenghasilan rendah dan tinggal di daerah padat penduduk, memiliki rumah yang layak dan terjangkau. Pemerintah bertanggung jawab melindungi warga negara dengan menyediakan perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan, sesuai Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2011. Kondisi perumahan mencerminkan tingkat kesejahteraan

masyarakat. Untuk menilai pembangunan perumahan di Kabupaten Pohuwato, indikator-indikator seperti kepemilikan, jenis atap dan dinding, luas lantai, serta fasilitas seperti sumber air minum, penerangan, dan sanitasi diperlukan, yang dapat diperoleh dari data Susenas.

Data mencatat bahwa hingga tahun 2023, sebanyak 87.93% rumah tangga di Pohuwato sudah memiliki tempat tinggal dengan status kepemilikan sendiri sedangkan yang bukan milik sendiri masih sebesar 12.07% rumah tangga. Dari aspek fasilitas BAB, masih terdapat 26.59% rumah tangga yang menggunakan MCK komunal atau MCK umum bahkan di antaranya tidak memiliki fasilitas BAB, sisanya 73.41% rumah tangga sudah memiliki fasilitas BAB. Hasil susenas juga menunjukkan bahwa masih ada 2.14% rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas pembuangan akhir tinja (IPAL).

Dari segi kualitas rumah, sebagian besar rumah di Kabupaten Pohuwato menggunakan atap seng, mencapai 95,21%. Setelah seng, genteng merupakan jenis atap terluas yang digunakan dengan persentase 2,25%, sementara atap bambu/kayu/sirap hanya digunakan oleh 0,13% rumah tangga. Selain jenis atap, jenis dinding juga mengindikasikan tingkat kesejahteraan rumah tangga. Sebanyak 69,41% rumah menggunakan dinding tembok, sedangkan jenis dinding lain seperti kayu/papan/batang kayu atau bambu/anyaman bambu digunakan oleh 30,59% rumah tangga. Indikator lain untuk kualitas rumah adalah luas lantai per kapita, di mana rumah dengan luas lantai per kapita kurang dari 10 meter persegi dianggap kurang layak sebagai tempat tinggal. Pada tahun 2022, sekitar 24,15% rumah tangga di Kabupaten Pohuwato memiliki luas lantai per kapita kurang dari 10 meter persegi.

2.4.4. Daya Saing Iklim Investasi

a). Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

Faktor keamanan merupakan hal yang sangat fundamental dalam menjalankan roda pembangunan dan kehidupan bermasyarakat. Kondisi keamanan Kabupaten Pohuwato dalam tahun-tahun terakhir memperlihatkan kondisi keamanan yang lebih baik. Seiring dengan perkembangan waktu dan dinamika pembangunan yang makin dinamis maka diperlukan pemantapan keamanan bukan hanya dalam bentuk penindakan namun juga dibutuhkan

prepentif, serta pembinaan kesadaran bagi masyarakat artinya penting keamanan dalam pembangunan. Maka Kepolisian Sektor dilingkungan Kepolisian Resort Pohuwato dikembang seiring bertambahnya jumlah kriminalitas hingga tahun 2022 berjumlah 351 laporan kejahatan. Namun demikian tindakan kriminalitas tetap ada, dimana angka kriminalitas dapat menggambarkan situasi tingkat keamanan masyarakat. Semakin rendah angka kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat berpengaruh terhadap iklim investasi yang kondusif. Faktanya bahwa angka kriminalitas dalam tahun-tahun terakhir menunjukkan kondisi keamanan yang sudah mulai membaik, walaupun tidak dipungkiri bahwa kejadian kriminalitas sewaktu-waktu terjadi tanpa alasan yang jelas/rasional. Situasi keamanan tahun terkahir di Pohuwato relatif membaik, kehidupan bermasyarakat sudah mulai berjalan dan kegiatan pemerintahan.

b). Indeks Daya Saing Daerah

IDSD, atau Index of Regional Competitiveness (Indeks Daya Saing Daerah), merupakan sebuah instrumen yang digunakan untuk menilai tingkat daya saing di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran komprehensif tentang produktivitas suatu daerah. Program ini pertama kali diperkenalkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi pada tahun 2017 dan berlangsung hingga 2021. IDSD 2022 menggunakan kerangka kerja yang terdiri dari empat komponen yang dibagi menjadi 12 pilar daya saing. Secara *overall,* indeks daya saing daerah Kabupaten/Kota Gorontalo masih di bawah capaian nasional. Kabupaten Pohuwato memiliki indeks daya saing daerah sebesar 2.73 poin.

Tabel 2.20. Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Lingkungan Pendukung				SDM			Pasar			Ekosistem Inovasi		IDSD
	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
Nasional	**4.14**	**2.91**	**3.57**	**3.05**	**3.76**	**3.73**	**2.68**	**3.73**	**2.66**	**1.31**	**5.00**	**2.62**	**3.62**
Provinsi Gorontalo	**4.25**	**2.40**	**3.22**	**2.58**	**3.58**	**3.58**	**3.98**	**4.38**	**2.41**	**0.11**	**5.00**	**2.32**	**3.15**
Boalemo	-	2.37	2.62	2.16	3.77	2.66	2.42	3.48	2.25	0.23	5.00	0.63	-
Kabupaten Gorontalo	**-**	**-**	**2.84**	**2.63**	**3.69**	**2.83**	**3.89**	**3.42**	**2.63**	**0.60**	**5.00**	**1.49**	**-**
Pohuwato	4.02	3.00	2.28	2.47	3.38	2.70	2.06	3.76	2.77	0.31	5.00	1.00	2.73

Bone Bolango	-	1.87	2.45	2.30	3.69	3.28	3.04	3.37	2.90	0.21	5.00	1.10	-
Gorontalo Utara	3.96	2.69	2.69	2.23	3.54	2.61	2.40	2.98	3.13	0.16	5.00	0.51	2.66
Kota Gorontalo	4.34	1.87	4.35	2.67	4.08	3.94	5.00	4.56	2.53	0.42	5.00	3.58	3.53

Sumber: Badan Riset Inovasi Nasional

Keterangan:
Pilar 1: Institusi
Pilar 2: Infrastruktur
Pilar 3: Adopsi TIK
Pilar 4: Stabilitas ekonomi makro
Pilar 5: Kesehatan
Pilar 6: Keterampilan
Pilar 7: Pasar produk
Pilar 8: Pasar tenaga kerja
Pilar 9: Sistem keuangan
Pilar 10: Ukuran pasar
Pilar 11: Dinamisme bisnis
Pilar 12: Kapabilitas inovasi

c). Indeks Inovasi Daerah

Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri, melalui Pusat Litbang Inovasi Daerah, mengukur tingkat inovasi di suatu wilayah dengan menggunakan indeks inovasi daerah. Saat ini, daya saing merupakan salah satu aspek penting dalam konsep pembangunan kota yang berkelanjutan. Tingkat daya saing suatu daerah juga menjadi indikator penting dalam menilai tingkat kesejahteraan masyarakat. Pemerintah, dalam beberapa kebijakan, menekankan pentingnya inovasi oleh kepala daerah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik, menciptakan nilai tambah, dan menjaga keterbukaan terhadap persaingan baik domestik maupun internasional. Pada tahun 2018, kinerja inovasi daerah diukur melalui Indeks Inovasi Daerah. Namun, dalam dokumen perencanaan dan kebijakan pemerintah terkait pengembangan inovasi, penciptaan nilai tambah, dan pemberdayaan masyarakat, terdapat program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target inovasi daerah.

Mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 002.6-5848 tahun 2021 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2021, tercatat bahwa IID Kabupaten Pohuwato tahun 2021 adalah 38.76 ‘‘inovatif’’ atau berada di urutan 197 nasional. Hasil pelaporan Indeks Inovasi Daerah (IID) Tahun 2022 (SK Mendagri Nomor 400.10.11-6301.A) IID IID Kabupaten Pohuwato merosot hingga 34.48 ‘‘kurang inovatif’’, meski begitu secara spasial inovasi di Kabupaten Pohuwato mengalami peningkatan dari aspek kuantitas. Kendati demikian, kualitas inovasinya masih rendah. Tahun 2023, berdasarkan SK Mendagri Nomor 400.10.11-6287 IID Kabupaten Pohuwato sebesar 48.59.

d). Penamanan Modal

Investasi merupakan salah satu indikator penting dalam meningkatkan pembangunan perekonomian. Investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru sehingga diharapkan akan mengurangi beban pengangguran dan kemiskinan. Masuknya investor baik untuk penanaman modal asing (PMA) ataupun penanaman modal dalam negeri (PMDN) ke suatu daerah, sangat tergantung dari kondisi keamanan dan politik daerah tersebut. Kondisi keamanan dan politik Kabupaten Pohuwato yang stabil merupakan modal penting dalam menarik minat investasi.

Target realisasi investasi kabupaten pohuwato pada renstra dinas penanaman modal di tahun 2022 adalah Rp. 294 Milyar dengan capaian realisasi sebesar Rp. 113 Milyar dari PMDN dan Rp. 324 Milyar dari PMA. Total realisasi investasi di pohuwato sampai pada tahun 2022 adalah Rp. 437 Milyar dan nilai realisasinya mencapai angka 148,6 persen dari target yang ada. Tahun 2023, total realisasi investasi Kabupaten Pohuwato mencapai Rp. 476,7 miliar. Berdasarkan data yang dirilis oleh Dinas Penamaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Gorontalo, Realisasi investasi Tahun 2023 berdasarkan kabupaten/kota, tertinggi adalah Kabupaten Pohuwato. Disusul oleh Kabupaten Gorontalo Rp160,5 miliar, Kota Gorontalo Rp93,7 miliar, Gorontalo Utara Rp79,4 miliar, Bone Bolango Rp18,5 miliar, serta Boalemo sebesar Rp8,2 miliar.

2.4. Aspek Pelayanan Umum

2.4.1. Tata Kelola Pemerintahan

Problem tata kelola pemerintahan juga perlu penguatan, sebab reformasi birokrasi yang selama ini telah direncanakan masih jauh dari harapan. Banyak indeks capaian kinerja nasional yang belum dapat diraih secara maksimal dikarenakan oleh tata kelola pemerintahan yang belum menemukan pola. Praktek tata kelola pemerintahan selama ini masih berbasis pada figur kepada daerah, belum berbasis pada sistem birokrasi yang kuat. Aparatur cenderung masih menunggu perintah dari atasan (kepala daerah), kurang inisiatif, bilamana kepala daerah tidak berada ditempat akan menghambat pelaksanaan pemerintahan. Apalagi bila terjadi pergantian kepala daerah akan menyebabkan jalannya

pemerintahan tidak berjalan optimal, karena tidak dipungkiri politik pemilihan kepala daerah kerapkali melibatkan ASN.

Politisisasi aparatur tidak jarang menciptakan kegalauan yang akan berdampak terhadap kinerja, pada akhirnya bukan fokus untuk bekerja tetapi menyelamatkan diri dengan melakukan pendekatan terhadap kepala daerah terpilih. Disaat yang sama kualitas SDM aparat pemerintahan tidak merata sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan, maka untuk menemukan aparatur pemerintah dengan prinsip *the right man, the right place* masih membutuhkan waktu yang cukup lama.

Keberhasilan tata kelola pemerintahan diukur menggunakan indeks reformasi birokrasi sebagai dasar untuk menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, efisien, dan pelayanan publik. Pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Pohuwato sejak tahun 2018 terus mengalami kenaikan dari 56.23 menjadi 62.03 dengan kategori "baik" namun masih rendah dari target RPJMD 80.00. Di sisi lain, capaian indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) tahun 2023, Kabupaten Pohuwato berada pada angka 2.41 dengan kategori "cukup" sedangkan target RPJMD adalah 2.50. Untuk Nilai Indeks berAKHLAK Kabupaten Pohuwato pada posisi 60,1 dengan predikat Cukup sehat kategori B. Untuk Survey Kepuasan Masyarakat Nilai yang diperoleh oleh pemerintah daerah adalah 85,74 yang menggabarkan bahwa pelayanan publik pemerintah daerah adalah baik dan pada tahun 2024 menargetkan pada RPJMD SKM 93,76 yang artinya meningkat ke kategori sangat baik.

2.4.2. Keuangan Daerah

Sistem otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, menegaskan bahwa pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, memiliki tanggung jawab untuk mengurus keuangan mereka sendiri. Pendapatan daerah mencakup semua dana yang diterima melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah kekayaan dana dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dikembalikan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pendapatan Daerah dibagi menjadi tiga kategori utama: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan

Pendapatan lainnya yang sah. PAD berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah. Pendapatan Transfer meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Penyesuaian. Optimalisasi pengelolaan PAD serta peningkatan kinerja pemerintah dalam perencanaan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat dapat mendorong peningkatan Pendapatan Daerah.

Tabel 2.21. Realisasi Penerimaan Daerah Menurut Jenis Penerimaan Kabupaten Pohuwato 2018-2023

Jenis Pendapatan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pendapatan Daerah	**904,691,929,792**	**970,534,277,246**	**955,946,119,926**	**898,394,864,106**	**902,175,682,605**	**916,494,810,734**
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	**52,151,698,921**	**62,337,943,760**	**50,953,585,078**	**71,987,067,694**	**65,049,926,012**	**86,170,265,470**
Pajak Daerah	8,880,247,117	9,648,779,242	8,244,259,730	11,488,765,524	13,369,109,447	19,704,379,261
Retribusi Daerah	5,322,895,756	5,593,069,349	3,974,757,033	4,983,487,715	5,342,733,160	8,101,719,400
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3,095,980,220	3,685,307,703	2,200,994,050	2,533,990,978	2,187,716,093	3,800,000,000
Lain-lain PAD yang Sah	34,852,575,828	43,410,787,466	36,533,574,265	52,980,823,477	44,150,367,312	54,564,166,809
Pendapatan Transfer	**702,676,142,423**	**740,354,936,381**	**723,282,363,424**	**804,350,112,053**	**823,124,340,181**	**812,626,445,000**
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	**149,864,088,448**	**167,841,397,105**	**181,710,171,424**	**22,057,684,359**	**14,001,416,412**	**17,698,100,264**

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Data menunjukkan bahwa kurun waktu 2018 hingga 2023 pendapatan daerah mengalami fluktuasi namun relatif meningkat dari 904 miliar rupiah menjadi 916 miliar rupiah, meski begitu kondisi fiskal Kabupaten Pohuwato masih sangat bergantung dari pendapatan transfer dengan rata-rata kontirbusi pertahunnya 89%. Sedangkan pendapatan asli daerah hanya mampu menyumbang 9.4%. PAD Kabupaten Pohuwato paling besar bersumber dari lain-lain PAD yang sah yang mencapai 54 miliar rupiah atau 63.32% dari total PAD, sementara pajak daerah hanya sebesar 19 miliar rupiah. Data tersebut mengindikasikan bahwa Kabupaten Pohuwato menghadapi tantangan dalam meningkatkan ketergantungan pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Ketergantungan yang tinggi pada pendapatan transfer meningkatkan risiko ketidakstabilan fiskal yang dapat terjadi jika ada perubahan dalam kebijakan transfer dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, penting bagi Kabupaten Pohuwato untuk meningkatkan diversifikasi sumber pendapatan daerah, terutama meningkatkan kontribusi dari PAD, termasuk pajak daerah.

2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2025-2025

Tata cara evaluasi RPJPD yang dilakukan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pohuwato berpedoman pada Pasal 251 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017, bahwa evaluasi dilakukan mencakup sasaran pokok, arah kebijakan dan penahapan untuk mencapai visi dan mewujudkan misi pembangunan jangka panjang daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pohuwato Tahun 2005-2025 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2005-2025. Kondisi Kabupaten Pohuwato yang ingin diwujudkan selang tahun 2005-2025 tergambar dalam Visi "***Kabupaten Pohuwato yang Maju Mandiri dan Harmonis Berdasarkan Nilai-nilai Religius***". Adapun misi untuk mewujudkan visi jangka panjang tersebut yakni, *Pertama* Mewujudkan Sistem ekonomi Pohuwato yang Handal, Berdaya Saing dan Berkelanjutan, *Kedua* Mewujudkan Sumberdaya Manusia Pohuwato yang Tangguh Cerdas dan Produktif, serta *Ketiga* Mewujudkan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pohuwato yang Berkualitas dan Amanah.

Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Pohuwato direncanakan bertahap lima tahunan sesuai dengan tujuan, strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Dalam pelaksanaan RPJPD dibagi menjadi empat RPJMD atau lima tahunan dengan RPJMD Tahapan Pertama (2005-2010) merupakan Tahap Penguatan, RPJMD Tahapan Kedua (2010-2015) merupakan Tahap Peningkatan, RPJMD Tahapan Ketiga (2015-2020) merupakan Tahap Pemantapan, dan RPJMD Tahapan Keempat (2020-2025) merupakan Tahap Usaha Peningkatan Berkelanjutan. Mengingat priode pemerintahan pada saat itu dilaksanakan dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2008, maka RPJMD tahap pertama tidak dimulai dari tahun 2005, melainkan tahun 2009.

RPJPD Kabupaten Pohuwato Tahun 2005-2025 yang sebentar lagi habis masa berlakunya telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaannya. Evaluasi tersebut menyimpulkan beberapa hal, yaitu:

1) RPJPD Kabupaten Pohuwato 2005-2025 disusun kurang mengikuti kaidah perundang-undangan yang berlaku yaitu UU 25 tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan. RPJPD yang disusun kurang mampu menjelaskan target capaian indikator kinerja yang ingin dicapai di akhir periode RPJPD.

2) RPJPD Kabupaten Pohuwato 2005-2025 ditetapkan melalui peraturan daerah (Perda) Nomor 01 tahun 2011 sehingga tidak sesuai dengan periode RPJPN yang dimulai 2005 hingga 2025. Selain itu, dokumen RPJMD yang tersedia hanya periode 2008-2013, 2013-2018 dan 2019-2023, sementara dokumen untuk periode sebelum 2008 tidak tersedia. Hal itu menyebabkan data untuk Evaluasi RPJPD ini sangat terbatas.
3) Strategi dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Pohuwato tidak dapat diukur dampaknya terhadap pembangunan Kabupaten Pohuwato dikarenakan tidak adanya *baseline* dan target capaian yang ditetapkan. Hasil evaluasi terhadap capaian indikator makro pembangunan dan Indikator Kinerja Pemerintah Daerah menunjukan adanya peningkatan dari nilai yang ditargetkan di awal.
4) Secara umum capaian Indikator Kinerja Makro Pembangunan dalam periode 2005-2022 mengalami tren positif, dengan beberapa indikator telah melampaui capaian kabupaten kota dan Provinsi Gorontalo. Kontribusi PDRB terhadap provinsi mencapai 15,89% atau posisi ketiga setelah Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo, sedangkan pendapatan perkapita mencapai 31,8 juta rupiah atau tertinggi diantara kabupaten kota.
5) Predikat capaian indikator pendapatan perkapita periode 2005-2022 adalah meningkat (*on the track*) dan perlu dipertahankan. Predikat Capaian indikator Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) periode 2009-2022 adalah menurun (atau membaik), tetapi angka kemiskinan masih lebih tinggi dibanding kabupaten/kota dan Provinsi Gorontalo. Sampai akhir tahun 2022, tingkat kemiskinan berada di angka 17,87% dan pengangguran 3,41%.
6) Predikat capaian indikator pertumbuhan ekonomi tahun 2023 mencapai 4,40%, meningkat dibanding tahun 2021 (2,21%) dan tahun 2022 (3,08%), tetapi masih dibawah pertumbuhan Kota Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pohuwato tertinggi 6,78% di tahun 2017.

Tabel 2.22. Indikator Ekonomi Kabupaten Pohuwato, Awal dan Akhir Periode RPJPD 2005-2025

No	Indikator	Capaian Awal (2007)	Capaian Akhir (2022)	Proyeksi Akhir Periode (2025)	Pertumbuhan / Penurunan (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	10,42%	66,53%	67,72%	0,01
2	Angka Kemiskinan	95,19%	17,87%	16%	0,21
3	Angka Pengangguran	83,58%	3,41%	2,75%	0,35
4	Pertumbuhan Ekonomi	83,24%	3,08%	5,5%	1,19
5	PDRB ADHB	98,45%	7.536.000	7.636.000	481.000,00
6	PDRB ADHK	93,06%	4.840.000	4.940.000	137.000,00
7	Ratio Gini	105,66%	0,39	0,39	0,01

Keterangan: Capaian Kinerja adalah Realisasi dibagi Target dalam RPJMD, selanjutnya untuk capaian adalah realisasi Tahun 2022. sedangkan Proyeksi adalah rencana Tahun 2024 dalam RPJMD merupakan Akhir Periode. Pertumbuhan adalah peningkatan pertumbuhan tahun 2021 ke Tahun 2022.

Kontribusi pengeluaran konsumsi terhadap PDRB Kabupaten Pohuwato selama lima tahun terakhir rata-rata sebesar 57,99 sedangkan kontribusi investasi (pembentukan modal tetap bruto) sebesar 21,82. Dari sisi trend pengeluaran, kecenderungan berkonsumsi oleh rumah tangga umumnya mengalami peningkatan sedangkan kontribusi investasi fluktuatif cenderung menurun. Artinya masyarakat secara keseluruhan belum mengubah dari pola yang konsumtif menuju investasi yang lebih bersifat produktif.

Tabel 2.23. Faktor Pendorong dan Penghambat RPJPD 2005-2025

	2005-2010	2011-2015	2016-2020	2021-2025
	Misi Pembangunan Pertama: Mewujudkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan			
	Sasaran Pokok pertama, mewujudkan Sistem Ekonomi Pohuwato Yang Handal, Berdaya Saing dan Berkelanjutan			
Faktor Pendorong	• Kondisi keamanan dan ketertiban yang stabil • Pemerintahan daerah yang kondusif • Pengelolaan APBD Transparan dan Akuntabel • Investasi yang berkembang • Partisipasi masyarakat yang tinggi • Pengelolaan APBDes yang terus membaik • Dukungan program lembaga donor • Dukungan program Organisasi Non Pemerintahan • Dukungan Program Perguruan Tinggi • Kerjasama Antardaerah	• Potensi Sumber Daya Alam • Dukungan Kebijakan pemerintah daerah dan desa • Dukungan kemitraan Lembaga • Akses Kredit perbankan • Infrastrktur yang mendukung • Kestabilan inflasi	• Perkembangan investasi • Penerimaan CPNS/P3K pemerintah setiap tahun • Penerimaan tenaga kontrak oleh pemerintah • Peneriaman tenaga kerja oleh BUMN dan BUMD • Perkembangan UMKM • Perkembangan wirausaha muda • Perkembagan pariwisata	• Pengelolaaan APBD yang fokus kepada pengembangan ekonomi rakyat • Iklim usaha yang semakin membaik
Faktor Penghambat	• Pertumbuhan ekonomi • SDM Rendah • Perubahan iklim • Wabah • Kerusakan infrastrkur **a. PDRB**	• Infrastruktur jalan jembatan yang belum memadai membuat sulitnya aksesibilitas desa terpencil yang menghambat	• Pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas Masyarakat • Kenaikan harga dan inflasi komoditas	• Keterbatasan dalam menciptakan lapangan kerja oleh karena kurangnya industri yang berkembang, serta rendahnya

	1) Iklim 2) Wabah 3) Akses permodalan 4) Daya saing UMKM **b. Kemiskinan** 1) Produktifitas pertanian semakin menurun 2) Tinggianya angka petani penggarap 3) Sistem bagi hasil pertanian yg belum berpihak kepada penggarap 4) Pemanfaatan Lahan belum maksimal 5) Harga komoditas pertanian yang tidak stabil 6) Daya saing UMKM yang lemah 7) Sistem upah yang belum sesuai standar 8) Teknlogi pertanian yang belum maksimal 9) Ketergantungan bantuan 10) Sistem Rentenir 11) Kegagalan panen 12) Kegagalan rumah tangga	Pembangunan • Keterbatasan sumber daya manusia yang terampil dan berkualitas. Kurangnya tenaga kerja yang terampil dan berpendidikan tinggi membuat pembangunan dan pengembangan sektor ekonomi sulit dilakukan secara optimal • Kurangnya investasi sektor strategis industri dan pariwisata menghambat kemajuan perekonomian daerah	melemahkan daya beli Masyarakat terutama rakyat miskin • Kapasitas dan kemandirian fiskal rendah sehingga sangat tergantung pada dana transfer Pusat	investasi dan pengembangan sektor ekonomi • Turunnya daya beli masyarakat akibat pandemi COVID-19 serta kondisi cuaca yang ekstrim, dan serangan hama penyakit
	Sasaran Pokok Kedua, Mewujudkan Sumberdaya Manusia Pohuwato yang Tangguh, Cerdas dan Produktif			
Faktor Pendorong	• Kebijakan yg berpihak pada sektor kesehatan • Kebijakan yang berpihak pada sektor pendidikan • Kebijakan yang berpihak pada sektor ekonomi • Infrastruktur kesehatan dan pendidikan terus membaik dan merata	• Kondisi ekonomi sosial, kesadaran orang tua pentingnya pendidikan serta budaya dan tradisi • Infrastruktur pendidikan yang baik dan memadai, program pemberantasan buta aksara dan pemberdayaan perempuan • Kurikulum yang relevan dengan kebutuhan siswa, sarana dan prasarana yang memadai, motivasi siswa serta pemantauan dan evaluasi sistematis • Komitmen pemerintah daerah untuk mengalokasikan sumber daya/anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan faskes	• Kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan lebih tinggi, ekonomi dan lapangan kerja serta teknologi dan akses informasi • Program pemberantasan buta aksara, pemberdayaan Perempuan serta peningkatan kualitas pengajaran • Keterampilan dan pelatihan profesional medis, pendidikan kesehatan dan kesadaran pentingnya perawatan dan pemenuhan nutrisi selama kehamilan dan persalinan	• Peningkatan kualitas pendidikan guru, lingkungan kerja yang positif, pengembangan karir, gaji dan tunjangan serta prestasi siswa • Ketersediaan pendidikan dan pelatihan kesehatan yang berkualitas di daerah • Gaji dan insentif yang kompetitif bagi tenaga kesehatan di daerah tertentu memikat mereka untuk tinggal dan bekerja di daerah • Kerjasama dengan Lembaga Internasional untuk meningkatkan ketersediaan sarana prasarana kesehatan di daerah
Faktor Penghambat	• Forest farming, praktek ladang berpindah • Illegal loging • Perambahan hutan	• Forest farming, praktek ladang berpindah • Illegal loging • Perambahan hutan	•Regulasi yang berubah setiap tahun •Praktek korupsi •Mutasi ASN	• Jumlah Desa Tanggap Bencana (Desatana) dan Kampung Siaga Bencana (KSB) masih minim • Pengelolaan limbah yang belum maksimal melalui prinsip Reduce, Reuse, Recycle
	Misi Pembangunan Kedua: **Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan fungsi dan daya dukung lingkungan**			
	Sasaran Pokok ketiga, mewujudkan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pohuwato yang Amanah			

Faktor Pendorong	• Potensi pertanian yang besar • Luas kawasan hutan besar	• UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan • Luas kawasan hutan besar • Peningkatan kesadaran terhadap pengelolaan lingkungan	• Pengelolaan kawasan hutan oleh pemerintah provinsi • Rintisan perkampungan iklim • Pengawasan dan penegakan hukum lingkungan	• Perbup 24 / 2007 Tentang Gerakan Tanam dan Pelihara Pohon • Perda 2 / 2017 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan • Potensi Desa Tanggap Bencana dan Kampung Siaga Bencana (KSB) • Pemanfaatan TPS 3 R
Faktor Penghambat	• AKI dan AKB 1) Edukasi Kesehatan yang belum maksimal 2) Pernikahan dini 3) Program Kesehatan antar kabupaten dan desa belum tersinergi dengan baik 4) Hidup bersih dan sehat belum jadi budaya	• Indeks Perencanaan Daerah: 1) Pengelolaan data yang belum maksimal 2) Sistem aplikasi perencanaan yang terus berubah-ubah 3) Rendahnya fiskal daerah 4) Hasil musrenbang dan reses DPRD yang belum semuanya dapat diakomodir	• Faktor Penghambat pertumbuhan ekonomi 1) SDM Rendah 2) Perubahan iklim 3) Wabah 4) Kerusakan infrastrkur • PDRB 5) Ikim 6) Wabah 7) Akses permodalan 8) Daya saing UMKM •Kemiskinan 13) Produktifitas pertanian semakin menurun 14) Tinggianya angka petani penggarap 15) Sistem bagi hasil pertanian yg belum berpihak kepada penggarap 16) Pemanfaatan Lahan belum maksimal 17) Harga komoditas pertanian yang tidak stabil 18) Daya saing UMKM yang lemah 19) Sistem upah yang belum sesuai standar 20) Teknlogi pertanian yang belum maksimal 21) Ketergantungan bantuan 22) Sistem Rentenir 23) Kegagalan panen 24) Kegagalan rumah tangga	• Faktor Penghambat 1) Regulasi yang berubah setiap tahun 2) Praktek korupsi 3) Mutasi ASN a. Ketepatan Pelaporan •Faktor Penghambat 1) SDM rendah 2) Pengelolaan data dan informasi belum baik 3) Kurangnya kepedulian dan pengawasan pimpina

Berdasarkan pencapaian kinerja dari masing-masing indikator pada tiga misi dan sasaran pokok yang telah dijelaskan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kinerja pencapaian RPJPD Kabupaten Pohuwato dengan nilai rata-rata 89,67% atau masuk pada kategori tinggi. Realisasi dari 16 indikator tersebut ada yang mencapai 100% bahkan melampaui, tetapi ada juga yang masih dibawah 50%. Faktor pendorong terwujudnya kinerja yang baik adalah kondisi keamanan dan ketertiban yang stabil, politik yang kondusif, tata kelola pemerintahan yang baik, partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan berkembangnya investasi.

Sementara itu yang menjadi faktor penghambat adalah perubahan iklim dan kerusakan lingkungan, adanya bencana banjir, adanya wabah/bencana non alam COVID19, kualitas sumberdaya manusia (SDM) yang belum merata di wilayah perkotaan dan perdesaan, kemiskinan masih cukup tinggi, kerusakan infrastruktur, serta sistem pertanian yang masih tradisional.

Berdasarkan uraian terkait faktor pendorong dan faktor penghambat, maka rekomendasi tindak lanjut adalah sebagai berikut:

1) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Kabupaten Pohuwato pada semua level pendidikan, pekerjaan dan keterampilan.
2) Melaksanakan pembangunan yang mengedepankan keseimbangan lingkungan, ekonomi dan sosial.
3) Mempertahankan kestabilan politik dan keamanan wilayah.
4) Menjaga trend perkembangan investasi yang mulai membaik pada akhir periode RPJPD pertama.
5) Meningkatkan produktifitas masyarakat melalui sistem pemberdayaan yang berorintasi memandirikan ekonomi rumah tangga.
6) Meningkatkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang baik (good governance)
7) Melaksanakan pemekaran desa, kecamatan bahkan kabupaten sebagai dinamika aspirasi politik warga.
8) Mengharmoniskan pelaksanakan perda adat dengan sistem pemerintahan.
9) Meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat
10) Meningkatkan sistem pengelolaan data dan informasi
11) Meningkatkan kemitraan dan networking

2.6. Tren Demografi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik

2.6.1. Analisis Tren Demografi

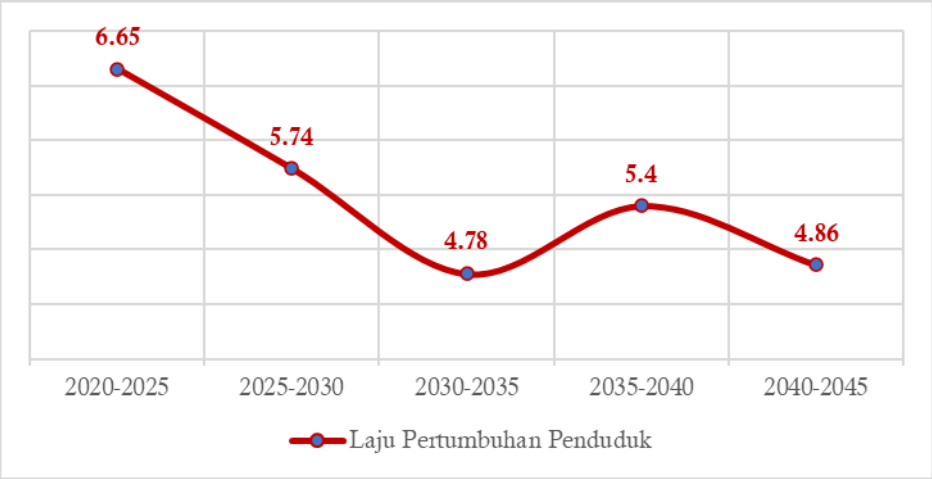
Proyeksi demografi memiliki peran yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan jangka panjang di suatu daerah. Hal ini disebabkan oleh kemampuannya dalam memberikan pandangan yang lebih akurat terhadap kebutuhan pelayanan publik dalam jangka waktu yang panjang. Proyeksi demografi memberikan estimasi tentang jumlah penduduk, distribusi usia, jenis kelamin, dan karakteristik demografis lainnya dalam periode waktu tertentu. Data

ini menjadi kunci dalam menentukan kebutuhan infrastruktur dan layanan publik di daerah, serta menjadi landasan untuk perencanaan kebijakan yang efektif. Dalam konteks perencanaan pembangunan jangka panjang, informasi dari tren proyeksi demografi menjadi sangat strategis karena digunakan untuk memproyeksikan pertumbuhan penduduk dan mengidentifikasi perubahan dalam struktur demografis.



Gambar 2.18. Tren Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pohuwato

Diproyeksikan bahwa hingga tahun 2045, jumlah penduduk di Kabupaten Pohuwato akan terus bertambah hingga mencapai 190.62 ribu jiwa, dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 5.48% per lima tahun. Dalam lima tahun pertama, yaitu 2020-2025, laju pertumbuhan diperkirakan akan mencapai 6.65%, dan melambat menjadi 4.86% pada periode 2040-2045. Tren pertumbuhan penduduk seperti ini tentu akan memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Semakin banyaknya penduduk akan menyebabkan peningkatan kebutuhan akan infrastruktur dan layanan dasar lainnya. Hal ini mengimplikasikan perlunya upaya yang lebih besar dalam mempersiapkan dan mengalokasikan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk infrastruktur seperti transportasi, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan lain-lain. Selain itu, pertumbuhan penduduk yang cepat juga dapat memengaruhi pasar tenaga kerja dan pola konsumsi masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan jangka panjang perlu memperhitungkan proyeksi pertumbuhan penduduk ini untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara efektif dan berkelanjutan.



Gambar 2.19. Proyeksi Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pohuwato

2.6.2. Analisis Kebutuhan Sarana Prasarana

a). Proyeksi Kebutuhan Rumah

Kebutuhan akan tempat tinggal adalah salah satu kebutuhan dasar manusia setelah makanan dan pakaian. Tingkat backlog dalam pemenuhan kebutuhan rumah di suatu wilayah terus meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi. Kebutuhan akan perumahan dapat dibagi menjadi dua aspek utama: pertama, berdasarkan tren pertumbuhan populasi secara alami, dan kedua, berdasarkan jumlah rumah yang memadai untuk ditinggali. Mengatasi backlog perumahan merupakan tantangan yang kompleks, namun juga merupakan kesempatan untuk membawa perubahan positif dalam masyarakat dan memastikan akses semua orang terhadap tempat tinggal yang layak. Diproyeksikan hingga tahun 2045 nanti, kebutuhan akan rumah layak huni di Kabupaten Pohuwato akan mencapai 1,634 unit.

Tabel 2.24. Analisis Kebutuhan Rumah Layak Huni Kabupaten Pohuwato

Uraian	Kondisi Existing (2023)	Proyeksi				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	160,187	155.67	164.60	172.46	181.78	190.62
Proyeksi Kebutuhan Rumah	1,300	1,337	1,413	1,480	1,559	1,634

Sumber: Data diolah, 2024

b). Proyeksi Kebutuhan Air Minum

Analisis proyeksi kebutuhan sarana penyediaan air minum memiliki signifikansi besar dalam perencanaan pembangunan wilayah, terutama dalam dokumen perencanaan jangka panjang seperti RPJPD, karena air minum

merupakan kebutuhan pokok yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Dengan menganalisis proyeksi kebutuhan air minum, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi potensi krisis air di masa depan, seperti kekurangan pasokan air atau infrastruktur yang tidak memadai. Dengan demikian, langkah-langkah pencegahan dapat diambil secara proaktif untuk menghindari dampak serius krisis air terhadap masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah dapat merencanakan pengelolaan sumber daya air yang lebih efisien, termasuk upaya pelestarian sumber daya air alamiah dan peningkatan efisiensi penggunaan air di berbagai sektor seperti rumah tangga, komersial, dan industri.

Tabel 2.25. Analisis Kebutuhan Air Minum Kabupaten Pohuwato

Ketersediaan Air (m^3)	Kebutuhan Air Minum						Status
	2020	2025	2030	2035	2040	2045	
1.343.057.524	245.883.200	259.630.400	274.145.600	289.473.600	305.657.600	322.745.600	Lebih

Sumber: KLHS Provinsi Gorontalo 2025-2045

Berdasarkan analisis data pada KLHS, status ketersediaan air di Kabupaten Pohuwato berada pada kategori "lebih" atau sebesar 1,343,057,524 m3 dan diprediksi hingga tahun 2045 kebutuhan akan air akan terus bertambah hingga 322,745,600 m3. Namun, perlu dilakukan pengelolaan dan pelestarian sumber daya air karena mengingat masih terdapat 18,61 persen rumah tangga di Kabupaten Pohuwato yang menggunakan sumber air utama yang dianggap kurang layak, seperti sumur/mata air tidak terlindung dan 068 persen menggunakan jenis sumber air dari mata air tak terlindungi.

c). Proyeksi Kebutuhan Listrik

Penggunaan energi listrik sangat penting bagi kehidupan masyarakat dan merupakan sumber daya yang paling efisien dalam berbagai kegiatan. Hampir semua aspek kehidupan manusia bergantung pada energi listrik. Hal ini karena energi listrik tidak hanya mudah diperoleh, tetapi juga efisien dalam penggunaannya dibandingkan dengan sumber energi lainnya. Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah dalam jangka panjang, penyediaan energi listrik menjadi salah satu poin krusial. Infrastruktur energi listrik yang memadai harus dipertimbangkan sebagai bagian integral dari perencanaan pembangunan daerah. Hal ini akan memastikan bahwa kegiatan ekonomi, industri, komersial, transportasi, dan rumah tangga dapat berjalan lancar dan efisien. Oleh karena itu,

pembangunan dan perluasan infrastruktur energi listrik harus menjadi prioritas dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah.

Tabel 2.26. Analisis Kebutuhan Listrik Kabupaten Pohuwato

Uraian	Kondisi Existing (2023)	Proyeksi				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	160,187	155.67	164.60	172.46	181.78	190.62
Jumlah Pelanggan	38,218	39,322	41,575	43,558	45,910	48,035
Daya Terpasang (kW)	1,530	1,574	1,664	1,743	1,836	1,920

Sumber: Data diolah, 2024

d). Proyeksi Kebutuhan Infrastruktur Pendidikan

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang handal dapat dicapai melalui peningkatan manajemen pendidikan. Kesetaraan dalam akses serta kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang merata menjadi faktor penting dalam proses belajar-mengajar. Dengan melakukan proyeksi yang tepat, pemerintah dapat menentukan kebutuhan infrastruktur pendidikan untuk mengakomodasi pertumbuhan jumlah siswa. Dengan memastikan ketersediaan infrastruktur pendidikan yang memadai, pemerintah daerah dapat memberikan peluang pendidikan yang lebih luas kepada semua orang dan meningkatkan standar pembelajaran.

Tabel 2.27. Analisis Kebutuhan Infrastruktur Pendidikan

Uraian	Kondisi 2023	Proyeksi				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah SD/MI	141	141	141	141	141	141
Jumlah SMP/MTs	60	62	64	65	66	66
Jumlah SMA/SMK/MA	28	28	28	28	28	28

Sumber: Data diolah, 2024

Hasil proyeksi menunjukkan bahwa selang 20 tahun ke depan, akan dibutuhkan penambahan jumlah SMP/MTs/Sederajat seiring dengan meningkatnya jumlah siswa SMP. Namun perlu diperhatikan bahwa makin tinggi tingkat jenjang pendidikan di Kabupaten Pohuwato maka nampak makin timpang ketersediaan sekolah.

e). Proyeksi Kebutuhan Infrastruktur Kesehatan

Kesehatan menjadi salah satu elemen krusial dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan mempertimbangkan estimasi pertumbuhan

populasi, pemerintah daerah dapat merencanakan pembangunan fasilitas kesehatan di area yang strategis dan mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, akses terhadap layanan kesehatan akan lebih merata dan terjangkau bagi semua orang, sehingga membantu menjaga dan meningkatkan kualitas hidup serta produktivitas penduduk. Upaya ini menjadi penting dalam memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang adil dan berkualitas terhadap pelayanan kesehatan yang diperlukan, sekaligus memperkuat fondasi kesejahteraan bersama dalam suatu wilayah.

Tabel 2.28. Analisis Kebutuhan Infrastruktur Kesehatan

Uraian	Kondisi Existing (2023)	Proyeksi				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	160,187	155.67	164.60	172.46	181.78	190.62
Jumlah Rumah Sakit	2	2	2	3	3	3
Puskesmas	16	16	18	20	22	24

Sumber: Data diolah, 2024

Pada tahun 2018 jumlah puskesmas di Kabupaten Pohuwato adalah 16 unit sedangkan rumah sakit ada 2 unit dan hingga tahun 2023 belum mengalami peningkatan yang tersebar di 13 kecamatan di luar puskesmas keliling. Kondisi di mana tingginya pertumbuhan jumlah penduduk dibandingkan jumlah puskesmas dan rumah sakit yang tersedia akhirnya mempengaruhi rasio puskesmas per 1000 penduduk. data tersebut menjelaskan perlunya penambahan jumlah puskesmas dan rumah sakit, apalagi wilayah Kabupaten Pohuwato cukup luas dan aksesibilitas ke pusat kota relatif jauh, ditambah jumlah rumah sakit yang tersedia di Pohuwato selama 20 tahun hanya ada dua.

f). Proyeksi Kebutuhan Infrastruktur Persampahan

Isu sampah merupakan masalah lingkungan yang terkait erat dengan pertumbuhan populasi dan tingkat ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan jumlah penduduk berdampak pada peningkatan volume sampah yang dihasilkan. Berdasarkan data dari KLHS RPJPD Provinsi Gorontalo tahun 2025-2045, dengan populasi yang diperkirakan mencapai 190.62 ribu jiwa pada tahun 2045, diperkirakan jumlah sampah yang dihasilkan mencapai 504.291 kilogram per tahun.

Gambar 2.29. Tren Perkembangan Timbulan Sampah Kabupaten Pohuwato

Uraian	Proyeksi					
	2020	2025	2030	2035	2040	2045
Timbulan Sampah (Kg)	384,193	495,672	428,353	452,302	477,590	504,291
Proyeksi Kebutuhan Tempat Pengelolaan Sampah (Unit)	13 TPSP 1 TPA	14 TPSP 1 TPA 1 ILBB	15 TPSP 1 TPA 1 ILBB	16 TPSP 1 TPA 1 ILBB	17 TPSP 1 TPA 1 ILBB	18 TPSP 1 TPA 1 ILBB

Sumber: KLHS Provinsi Gorontalo 2025-2045

Keberadaan 1 TPA dinilai cukup untuk menampung jumlah sampah yang diproyeksikan. Namun agar pelayanan pengelolaan persampahan dapat dioptimalkan, maka perlu dilakukan penambahan TPST masing-masing 1 unit per lima tahun. Hal ini karena TPST dapat menampung dan mengelola sampah dalam skala besar serta memberikan pendekatan yang terpadu dalam pengelolaan sampah. Pembangunan TPS3R juga perlu dipertimbangan dalam jangka panjang terutama pada kecamatan-kecamatan dengan populasi terbanyak, sebab rumah tangga merupakan penyumbang produksi sampah paling besar. Selain itu, perlu juga diupayakan pembangunan 1 unit fasilitas pengolahan Insinerator Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) yang difungsikan untuk mengolah limbah dari Fasilitas Layanan Kesehatan.

2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Kabupaten Pohuwato menguasai 37,7% wilayah daratan Provinsi Gorontalo atau tepatnya seluas 4.344,31 km^2. Daerah ini memiliki garis pantai sepanjang 109,63 km dari Kecamatan Paguat di timur hingga Kecamatan Popayato Barat, kemudian memiliki 48 buah pulau, tertinggi di Provinsi Gorontalo. Data BPS total luas kawasan hutan di tahun 2017 sebanyak 311.596 hektar, dengan luas hutan produksi sebesar 135.302 hektar, hutan lindung sebesar 136.584 hektar dan hutan konversi 39.709,7 hektar.

Kabupaten Pohuwato sangat strategis menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Provinsi Gorontalo. Secara geografis, letaknya di bagian leher Teluk Tomini yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Tengah. Secara sektoral, daerah ini memiliki dua sektor unggulan yang berkontribusi cukup signifikan terhadap pendapatan daerah dan masyarakat yaitu sektor pertanian (peternakan kehutanan perikanan) dan pertambangan (dan bahan galian). Secara sosio-kultural, daerah ini adalah miniatur Nusantara di Provinsi Gorontalo. Hampir semua etnis di Indonesia telah mampu beradaptasi dan berasimilasi dan

membangun tata kehidupan nan-damai dengan warga lokal. Transmigran asal Jawa, Bali dan Nusa Tenggara dapat berbaur dengan etnis Minahasa, Sangihe, Bolaang Mongondow, Bugis, Toraja maupun penduduk asli.

Beberapa tahapan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan Kabupaten Pohuwato sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Provinsi Gorontalo dalam rentang 10 hingga 20 tahun kedepan sebagai berikut:

1) Identifikasi Potensi Lokal, seperti sektor pertanian, perikanan, industri, pariwisata, atau sektor lain yang dapat menjadi basis pertumbuhan ekonomi masa mendatang
2) Infrastruktur Dasar, seperti jalan, listrik, air bersih, dan telekomunikasi menjadi landasan penting untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan
3) Pengembangan Sektor Pertanian, dengan konsentrasi pada peningkatan produktivitas pertanian, diversifikasi tanaman, akses ke pasar yang lebih baik, dan penerapan teknologi pertanian modern
4) Pengembangan Sektor Perikanan. Garis pantai dan ekonomi teluk adalah potensi sektor perikanan dan kelautan. Dukung nelayan lokal dengan infrastruktur perikanan yang memadai, akses ke pasar dan program pelatihan
5) Promosi Pariwisata: Identifikasi objek pariwisata yang menarik dan promosikan destinasi pariwisata Kabupaten Pohuwato. Dukung pengembangan infrastruktur pariwisata dan pelatihan untuk pelaku pariwisata
6) Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM), dengan memberikan pelatihan, akses modal, dan akses pasar yang lebih luas

Disamping enam tahapan yang diperlukan untuk mewujudkan Kabupaten Pohuwato sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru, patut memperoleh perhatian dan dukungan seluruh pemangku kepentingan pada aspek:

1) Pembangunan SDM: Tingkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan ekonomi lokal
2) Kemitraan dan Kolaborasi: Bangun kemitraan dengan sektor swasta, lembaga akademis, dan organisasi masyarakat untuk mendukung pengembangan ekonomi kabupaten

3) Penggunaan Teknologi Informasi: Manfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan akses pasar, efisiensi bisnis, dan konektivitas
4) Promosi Investasi: Lakukan promosi yang aktif untuk menarik investasi ke Kabupaten Pohuwato, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, terutama yang terkait dengan sektor unggulan daerah
5) Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam: Pastikan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam dilakukan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab
6) Dukungan Kebijakan Pemerintah: Pastikan terdapat kebijakan yang mendukung pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi, termasuk regulasi yang kondusif, insentif pajak, dan bantuan bagi pelaku usaha

Dalam RPJPD Provinsi Gorontalo 2025-2045 secara eksplisit telah disebutkan bahwa pengembangan Kabupaten Pohuwato sebagai berikut:

1) Pengembangan Kawasan strategis provinsi (KSP) Pertanian Berkelanjutan Randangan
2) Pengembangan pusat kegiatan lokal (PKL) Marisa dan Popayato
3) Pembangunan dan Peningkatan Jalan Provinsi di Wonggarasi-Taluditi-Randangan dan akses Bandara Imbodu
4) Fasilitasi Pengembangan Jaringan Tol, Jalur Kereta Api dan Stasiun Kereta Api
5) Pengembangan Terminal Tipe B (Terminal Marisa)
6) Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan (Pelabuhan Marisa)
7) Pengembangan Pelabuhan Pengumpan, Pelabuhan Terminal Khusus, Pelabuhan Perikanan
8) Fasilitasi Pengembangan Bandar Udara Pohuwato

Berdasarkan RPJPD Provinsi Gorontalo maka semua wilayah kecamatan di Kabupaten Pohuwato berpotensi memberi kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Marisa sebagai ibukota dan pusat pemerintahan berpotensi menjadi pelabuhan ekspor komoditas pertanian dan perikanan. Oleh karena itu daerah sekitar dapat didorong menjadi kawasan industri terpadu. Selanjutnya dengan pengoperasian bandar udara **Panua** di Desa Imbodu Kecamatan Randangan dari

penerbangan perintis menjadi penerbangan domestik maka lalu lintas orang dan barang semakin lancar.

Potensi ekonomi unggulan masyarakat nelayan untuk mendukung upaya pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Potensi unggulan perikanan ikan bobara, ikan kerapu, udang lobster dan vaname, gurita, teripang pasir dan budidaya rumput laut. Daerah Duhiadaa, Randangan, Wonggarasi dan Lemito dapat diproyeksikan menjadi kawasan lumbung perikanan budidaya udang atau ***Shrimp Estate*** dengan model *good aquaculture practices*. Sedangkan pusat kota Marisa sebagai daerah penunjang.

Garis pantai Kabupaten Pohuwato dimulai dari wilayah paling timur yaitu Kecamatan Paguat sampai Kecamatan Popayato Barat dengan panjang sekitar 109,63 km. Kabupaten Pohuwato memiliki lahan tambak yang cukup luas yaitu 3.284 ha dengan produksi 1.543,60 ton (DKP Kabupaten Pohuwato, 2010). Kalau dilihat dari luas tambak dengan produksi yang ada, tambak di Kabupaten Pohuwato produktivitasnya tergolong masih rendah, namun masih dapat ditinggalkan melalui pengelolaan tambak yang tepat dan penerapan teknologi yang sesuai dengan kesesuain lahan tambak Kabupaten Pohuwato dilihat dari hasil produksi perikanan tahun 2015-2016 sebesar 12.110,87 ton wilayah ini sangat berpotensi untuk perikanan daratnya, dimana banyak desa-desa yang masyarakatnya sebagai petani tambak. Di antaranya desa Mootilango Kecamatan Duhiadaa dimana desa ini memiliki jumlah luas lahan tambak sekitar 256,5 ha, dan untuk hasil produksi pertahun selama 1 kali panen sebesar 164.30 ton (DKP Kabupaten Pohuwato, 2016). Pada umumnya daerah pantai ini digunakan sebagai lahan tambak dan hutan mangrove.

Shrimp estate merupakan program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang menjadikan udang sebagai salah satu komoditas unggulan ekspor. Shrimp estate merupakan skema budidaya udang berskala besar dimana proses hulu hingga hilir berada dalam satu kawasan yang dibangun secara modern. Proses produksi di dalam program shrimp estate yaitu memanfaatkan teknologi supaya hasil panen lebih optimal, mencegah penyakit, serta ramah lingkungan yang sesuai dengan konsep budaya terintegrasi. Konsep tersebut diantaranya yaitu pendekatan konsep hulu hingga hilir, korporasi perikanan budidaya berbasis kawasan dan

bebas limbah (*zero waste*), hilirisasi produk perikanan budidaya, akuakultur modern 4.0, dan pengolahan kawasan budidaya tambak udang secara terintegrasi. Model budidaya dalam satu kawasan (*shrimp estate*) dapat dikelola secara modern dan baik. Selain itu, terdapat standar kualitas termasuk kualitas air, instalasi, kualitas kawasan pesisirnya, di depannya (lokasi shrimp estate) harus penuh dengan hutan mangrove agar tidak terjadi abrasi.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Pembangunan di Kabupaten Pohuwato dapat menghadapi berbagai permasalahan yang mempengaruhi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Beberapa permasalahan yang mungkin dihadapi meliputi:

1) Kesenjangan sosial dan pembangunan manusia: tantangan ekonomi juga dapat tercermin dalam kesenjangan sosial dan ketimpangan dalam pembangunan manusia. Kurangnya akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan yang berkualitas, dan kemiskinan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif
2) Ketergantungan pada sektor pertanian dan perikanan: ekonomi kabupaten ini mungkin cenderung bergantung pada sektor pertanian dan perikanan. Ketidakpastian cuaca, perubahan iklim, dan rendahnya teknologi modern dalam sektor ini dapat menjadi hambatan untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
3) Keterbatasan infrastruktur: salah satu tantangan utama dalam pengembangan ekonomi adalah infrastruktur yang terbatas, termasuk akses jalan yang kurang memadai, kurangnya jaringan listrik yang luas, dan infrastruktur pendukung lainnya seperti pelabuhan dan bandara
4) Keterbatasan lapangan kerja: daerah ini mungkin menghadapi tantangan dalam menciptakan lapangan kerja yang cukup bagi penduduknya, terutama untuk para pemuda. Keterbatasan lapangan kerja formal dapat mengakibatkan tingginya tingkat pengangguran
5) Kurangnya akses modal dan pendanaan: kurangnya akses terhadap modal dan pendanaan merupakan kendala umum yang dihadapi oleh pelaku usaha lokal dalam mengembangkan bisnis mereka
6) Pengembangan pariwisata: meskipun potensi pariwisata di pesisir Teluk Tomini besar, Kabupaten Pohuwato mungkin masih menghadapi kesulitan dalam mengembangkan industri pariwisata yang berkelanjutan, termasuk kurangnya fasilitas dan promosi yang memadai.

7) Konservasi sumber daya alam: sumber daya alam yang melimpah di sekitar wilayah ini memerlukan upaya konservasi yang kuat untuk memastikan keberlanjutan ekonomi jangka panjang

Dukungan program kebijakan dan penganggaran serta pelibatan seluruh komponen masyarakat diperlukan untuk:

a) Memperkuat akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas
b) Mendorong investasi dalam pengembangan infrastruktur yang memadai, seperti jaringan jalan, bandara, dan pelabuhan.
c) Memperkuat sektor pertanian dan perikanan melalui penerapan teknologi modern dan program pelatihan untuk petani dan nelayan.
d) Mengembangkan industri lain yang berpotensi untuk diversifikasi ekonomi dan penciptaan lapangan kerja
e) Mendorong program pengembangan usaha kecil dan menengah dengan menyediakan akses terhadap modal dan pelatihan.
f) Memanfaatkan potensi pariwisata dengan mempromosikan atraksi lokal dan meningkatkan infrastruktur pariwisata.
g) Menerapkan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan untuk menjaga sumber daya alam

3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

3.1.1. Bidang Pendidikan

Investasi pembangunan manusia tidak kalah pentingnya dibandingkan investasi fisik (kapital), saat ini banyak negara telah dapat membuktikan meskipun minim sumber daya alam (fisik) akan tetapi mengalami kemajuan diberbagai bidang karena fokus pada investasi pembangunan manusia. Pembangunan manusia transmisinya lewat pembangunan sektor pendidikan yang dapat meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, dengan sumber daya manusia yang berkualitas memiliki peranan penting mendorong pertumbuhan ekonomi. Kewenangan pengelolaan sektor pendidikan selain bersifat *mandatory,* pemerintah daerah juga menyadari sepenuhnya bahwa pendidikan merupakan modal penting untuk membangun. Oleh sebab itu pembangunan bidang pendidikan saat ini sedang

digalakkan oleh Pemerintah Kabupaten Pohuwato, yang dilakukan dengan cara memperluas dan pemerataan kesempatan masyarakat dalam memperoleh akses pendidikan dasar, menengah dan bahkan pendidikan tinggi. Ini dilakukan dikarenakan masih adanya penduduk yang tidak tamat sekolah, putus sekolah dan bahkan tidak sekolah.

Pemerintah Kabupaten Pohuwato berupaya agar tingkat pendidikan masyarakat terus mengalami peningkatan, mulai dari pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan formal hingga penyelenggaraan pendidikan luar sekolah. Pembangunan dan perbaikan fasilitas sekolah dasar dan menengah pertama serta sokongan dalam bentuk lain yang tersebar di semua 13 kecamatan. Sedangkan untuk sarana pendidikan setingkat SMA dan sederajat belum sepenuhnya terdapat di semua kecamatan, untuk pendidikan tinggi di Kabupaten Pohuwato baru tersedia satu perguruan tinggi, yakni Universitas Pohuwato. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah meningkatkan mutu sumber daya manusia dan pemenuhan sarana pendidikan, faktanya belum dapat mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia serta tingkat pendidikan masyarakat. Mutu sumberdaya manusia, misalnya diukur dari tingkat IPM di tahun 2022, diantara enam kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo rata-rata IPM Pohuwato sebesar 66,53 hanya lebih baik dari Kabupaten Gorontalo Utara dan lebih rendah dari rata-rata IPM Gorontalo (69,81), sementara APM di setiap jenjang pendidikan belum memperlihatkan kondisi ideal, misalnya APM jenjang pendidikan SD sudah di atas angka 95 persen, akan tetapi masih yang terendah dibanding dengan daerah lainnya di Provinsi Gorontalo, dan APM jenjang SLTA capaiannya sebesar 56,00 persen hanya lebih baik dibanding Kabupaten Boalemo, sementara APM jenjang pendidikan tinggi hanya mencapai 16,09 persen, paling rendah diantara enam kabupaten/kota.

Berdasarkan data-data kinerja pendidikan tersebut di atas, pembangunan yang sementara berjalan maupun kegiatan investasi dapat dipastikan bahwa kesiapan sumberdaya manusia di Kabupaten Pohuwato untuk berpartisipasi di pasar kerja tidak akan berjalan optimal, tidak dapat bersaing di pasar tenaga kerja. Akibatnya serapan tenaga kerja di luar sektor pertanian tetap minim, menyulitkan mempercepat penurunan angka kemiskinan.

3.1.2. Bidang Kesehatan

Kemajuan suatu negara (daerah) pada umumnya dilihat dari pendapatan nasional bruto, makin tinggi pendapatan nasional menunjukkan makin maju suatu perekonomian. Untuk mengukur kemajuan ekonomi dapat dilihat dari besarnya akumulasi modal (investasi) fisik dan pertambahan tenaga kerja. Namun dalam konteks pembangunan modern, percepatan output ekonomi terbukti modal fisik tidak cukup, harus dibarengi dengan investasi sumberdaya manusia. Dalam hubungan inilah peranan kesehatan dan pendidikan yang mempengaruhi kualitas sumberdaya manusia menjadi penting diberi perhatian oleh pemerintah, baik dari aspek anggaran maupun pengelolaannya. Selama ini Pemerintah Kabupaten Pohuwato telah memberikan perhatian yang memadai memperbaiki derajat kesehatan masyarakat. Sarana dan prasarana kesehatan terus bertambah demikianpun halnya tenaga kesehatan untuk melayani masyarakat mengalami perkembangan.

Sekalipun di Kabupaten Pohuwato sendiri rumah sakit yang tersedia hanya satu, dengan jumlah penduduk 149,300 jiwa dan Puskesmas sebanyak 16 unit dari 13 kecamatan yang ada, artinya setiap kecamatan telah tersedia Puskesmas, dan Puskesmas Pembantu sebanyak 27 unit. Namun jika dilihat dari luas wilayah yang ada, serta jumlah penduduk dibandingkan dengan tenaga medis masih kurang ideal. Di Kabupaten Pohuwato jumlah tenaga medis sebanyak 61 orang hanya lebih banyak dari Kabupaten Gorontalo Utara, tenaga kesehatan 64 orang berada posisi kedua dari bawah se Provinsi Gorontalo. Sementara penduduk Kabupaten Pohuwato yang memiliki keluhan kesehatan selama lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan, di tahun 2022 penduduk yang memiliki keluhan kesehatan sebanyak 45,72 persen paling tinggi dibandingkan dengan lima kabupaten/kota. Dilihat dari perlindungan kesehatan, penduduk Kabupaten Pohuwato yang tidak memiliki jaminan kesehatan masih cukup tinggi, yakni sebesar 21,68 persen dari total jumlah penduduk. Aspek lain yang menjadi tantangan sektor kesehatan di Kabupaten Pohuwato, yakni Indikator UHH saat lahir tertinggi dicapai Kota Gorontalo (72,88 tahun) dan terendah di Kabupaten Pohuwato (64,95 tahun), dengan kondisi itu menyebabkan tingkat IPM Kabupaten Pohuwato hanya lebih baik dari Kabupaten Gorontalo Utara.

Selain masalah sarana, prasarana dan jaminan kesehatan menjadi hambatan pembangunan di Kabupaten Pohuwato, stunting juga perlu mendapatkan perhatian serius. Di tahun 2021 prevalensi stunting hingga 28,2 persen, namun di tahun 2022 mengalami penurunan drastis menjadi 6,4 persen. Walaupun demikian prevalensi stunting masih akan meningkat jika masyarakat tidak menyadari pentingnya gizi seimbang, apalagi dengan melihat rata-rata tingkat pengeluaran perkapita yang terhitung masih rendah.

3.1.3. Bidang Sarana Prasarana Daerah

A. Energi Listrik

Salah satu indikator penting mengukur kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah dilihat dari penggunaan penerangan (listrik), makin luas jangkauan penerangan listrik menandakan daerah tersebut makin maju. Apalagi saat ini listrik merupakan kebutuhan utama bagi wilayah yang perekonomiannya sedang tumbuh, keberadaan listrik dapat menjamin keberlangsung produksi dan kegiatan ekonomi. Oleh karenanya pemerintah terus meningkatkan pasokan listrik dari berbagai sumber energi yang tersedia, artinya kebijakan pemerintah di bidang kelistrikan tidak hanya sekedar memberikan penerangan, akan tetapi ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong kegiatan ekonomi khususnya sektor industri.

Berdasarkan data BPS di tahun 2020 jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Pohuwato mencapai 38,218 dibandingkan dengan jumlah kepala keluarga sebanyak….., dengan demikian masih terdapat penduduk belum terlayani pasokan listrik, terutama di beberapa wilayah perdesaan. Disaat yang sama kebutuhan listrik di wilayah perkotaan dipastikan semakin meningkat, percepatan pembangunan jaringan memerlukan waktu dan biaya yang cukup besar. Karenanya kedepan perlu dirancang pemenuhan kebutuhan listrik tidak bisa hanya mengandalkan pasokan dari PLN, akan tetapi juga perlu dipertimbangkan pembangunan sumber energi listrik secara swadaya.

B. Air Bersih dan Sanitasi

Infrastruktur, termasuk penyediaan air minum dan sanitasi menjadi kebutuhan bagi kegiatan masyarakat. Infrastruktur erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi regional, peningkatan kualitas hidup penduduk dan

lingkungan. Tersedianya air minum dan sanitasi sangat diperlukan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya dapat menekan angka kemiskinan dan stunting. Menyahuti hal tersebut untuk pengadaan air bersih oleh pemerintah sangat diperlukan lewat pembangunan sarana dan prasarana, pembangunan sarana air bersih mengalami peningkatan. Jangkauan layanan PDAM yang mendapatkan mandat dari pemerintah daerah menyediakan air bersih terhadap masyarakat terus bertambah. Akan tetapi dilihat dari jumlah pelanggan sebanyak 19,931 belum sebanding dengan jumlah kepala keluarga yang ada, terutama di daerah perdesaan. Terdapat tiga kecamatan jumlah pelanggan air bersih di bawah 1.000 KK, yakni Kecamatan Popayato Timur, Wanggarasi dan Taluditi. Maka dari itu, pemerintah memberikan perhatian serius terkiat pengadaan air bersih, disadari penyediaan air bersih dengan mengandalkan sistem pipanisasi oleh PDAM tentu jangkauannya terbatas hingga ke pelosok desa. Sekaitan dengan hal tersebut, pemerintah menekankan pembangunan sarana air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di perdesaan lewat Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (SPAMS).

C. Jaringan Irigasi

Pembentukan ekonomi Kabupaten Pohuwato didominasi oleh sektor pertanian, lahan terbuka masih cukup luas, potensi untuk mengembangkan pertanian pangan terbuka lebar. Dengan potensi yang dimiliki Kabupaten Pohuwato dapat menjadi lumbung pangan di Kawasan Teluk Tomini, sekaligus menjadi penyanggah pangan di IKN. Selain itu lahan sawah yang ada di Kota Gorontalo maupun Kabupaten Bone Bolango luasannya makin menyusut akibat alih fungsi lahan, padahal selama puluhan tahun kedua daerah tersebut menjadi penyuplai beras di Provinsi Gorontalo.

Secara keseluruhan, hampir setengah lahan sawah irigasi yang ditanami padi di Provinsi Gorontalo berasal dari Kabupaten Gorontalo yaitu sebesar 11.584 Ha atau 43,48 persen. Setelah itu disusul oleh Kabupaten Gorontalo Utara dengan luas lahan sebesar 4.969 Ha atau 18,65 persen. Sedangkan Kabupaten Pohuwato baru mencapai 9,59 persen, dan sebaliknya sawah tadah hujan (non irigasi) justru paling luas, yakni 2,794 Ha, penggunaan lahan sawahpun untuk tanaman lainnya di Kabupaten Pohuwato terbilang luas (2,367 Ha). Meskipun selama ini pemerintah daerah fokus membangun sektor pertanian dan malahan menjadi sektor

unggulan, namun belum dapat dioptimalkan sektor pangan, termasuk pembangunan Bendungan Randangan juga dapat menunjang pertanian pangan, namun demikian lahan yang tersedia belum dapat dialiri air karena jaringan irigasi belum terbangun dan terhubung.

D. Jalan dan Jembatan

Infrastruktur jalan sangat berpengaruh pada kegiatan distribusi dan logistik yang merupakan urat nadi kehidupan ekonomi, politik, sosial-budaya dan pertahanan keamanan nasional, serta penghubung antar daerah sebagaimana kondisi geografis Gorontalo. Selain itu, infrastruktur jalan menopang sektor transportasi yang dapat memperlancar arus distribusi barang dan jasa, mobilisasi manusia, aksesibilitas antar wilayah, serta berperan dalam peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia. Pentingnya infrastruktur jalan, setiap tahun pemerintah daerah memberikan perhatian dan termasuk sebagai sektor prioritas *(mandatory spending)* untuk perbaikan dan pembangunan jalan dan jembatan baru.

Akan tetapi pada tahun 2022, panjang jalan negara di Provinsi Gorontalo tidak terjadi perubahan dari tahun sebelumya. Panjang jalan negara di Provinsi Gorontalo, yaitu 748,60 km, dan jalan provinsi sepanjang 467,17 km, sementara panjang jalan menurut kabupaten, di Pohuwato sepanjang 912,65 km jenis permukaan yang teraspal sepanjang 395,41 km, tidak teraspal sepanjang 516,15 km, kondisi jalan rusak sepanjang 111,38 km. Dengan demikian jalan yang tidak teraspal lebih panjang dibandingkan jalan yang beraspal, ditambah dengan kondisi jalan rusak dapat menghambat kegiatan distribusi dan logistik, sehingga mengganggu kegiatan ekonomi dan menurunkan daya saing daerah.

E. Sarana Angkutan Umum

Selain jalan, sarana angkutan umum juga sangat vital kehadirannya, karena angkutan umum merupakan sarana untuk memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain. Tujuannya membantu orang atau kelompok orang menjangkau berbagai tempat yang dikehendaki, atau mengirimkan barang dari tempat asalnya ketempat tujuannya. Prosesnya dapat dilakukan menggunakan sarana angkutan berupa kendaraan atau tanpa kendaraan (diangkut oleh orang). Di Kabupaten Pohuwato sendiri angkutan umum armadanya masih terbatas yang dapat menghubungkan antar wilayah, akibatnya mobilitas manusia dan barang

memerlukan waktu, dampaknya terhadap kegiatan ekonomi.

F. Telekomunikasi dan Informasi

Infrastruktur telekomunikasi menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya ekonomi digital yang perkembangannya makin massif di tengah terjadi proses transformasi digital. Proses tersebut berdampak pada semua aspek kehidupan saat ini, mulai dari cara hidup masyarakat hingga cara negara mengembangkan ekonominya. Minimnya infrastruktur telekomunikasi akan menghambat kegiatan ekonomi, termasuk kegiatan perkantoran maupun kegiatan pendidikan, artinya keberadaan infrastruktur telekomunikasi sudah menjadi kebutuhan dasar untuk memperlancar kegiatan dan aktifitas. Di Kabupaten Pohuwato sendiri, akses telekomunikasi di berbagai wilayah kecamatan hingga perdesaan telah tersedia, namun dari kualitas dan *coverage* masih ditemukan daerah *blank spot*.

3.1.4. Permasalahan Pembangunan Aspek Daya Saing Daerah

A. Kemiskinan

Tantangan terberat yang hadapi oleh bangsa Indonesia saat ini dalam pembangunan ekonomi, yakni kemiskinan. Malahan Provinsi Gorontalo merupakan daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi kelima secara nasional, sebesar 15,42 persen di tahun 2022. Kendati persentase ini terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun, akan tetapi penurunannya makin kecil. Kondisi serupa dialami oleh Kabupaten Pohuwato, diawal berdiri sendiri menjadi daerah otonom angka kemiskinan (P0) sekitar 32 persen, menurun menjadi sebesar 17,87 persen di tahun 2022. Sekalipun menurun drastis dibanding 20 tahun lampau, angka tersebut masih terhitung tinggi apalagi kondisi kemiskinan di Kabupaten Pohuwato hanya lebih baik dari Kabupaten Boalemo, padahal SDA yang dimiliki oleh Kabupaten Pohuwato paling besar dibanding dengan daerah lainnya yang ada di Provinsi Gorontalo bahkan di Kawasan Teluk Tomini.

Berbagai program pengentasan kemiskinan yang telah dijalankan oleh pemerintah berkolaborasi dengan pemerintah daerah, jelas memberikan hasil. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri dimana angka kemiskinan masih menjadi hambatan dalam proses percepatan pembangunan. Apalagi tenaga kerja menurut lapangan

usaha masih didominasi di sektor primer (pertanian) minim nilai tambah, yakni 43,53 persen dari total penduduk yang bekerja, sebagian besar diantara mereka merupakan petani penggarap. Selain karena terbatasnya peluang kerja di sektor non pertanian, tingkat pendidikan tenaga kerja didominasi lulusan SD ke bawah, rata-rata jam kerjanyapun sangat rendah di bawah 35+ jam per minggu, hal ini mengakibatkan tingkat produktivitas terbatas, berdampak terhadap rendahnya pendapatan.

Fokus pemerintah kedepan mengoptimalkan SDA untuk mendorong transformasi ekonomi agar terjadi percepatan perubahan struktur tenaga kerja ke sektor yang produktif. Tujuannya untuk mengakselarasi penurunan angka kemiskinan, khususnya kemiskinan perdesaan, sebab lokus tingkat kemiskinan paling tinggi ada di perdesaan. Perencanaan pembangunan senantiasa dikreasi agar pertumbuhan ekonomi bersifat inklusif dan *sustain*, penguatan pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan dana desa, pengembangan UMKM dan mengembangkan usaha-usaha produktif lainnya.

B. Ekonomi dan Keuangan Daerah

Perekonomian Kabupaten Pohuwato masih bercorak daerah agraris karena pembentukan PDRB didominasi dari sektor primer sebesar 58,50 persen di tahun 2022, dengan tingkat pertumbuhan 1,48 persen. Rendahnya pertumbuhan sektor pertanian, disaat yang sama paling besar menyerap tenaga kerja, apalagi nilai tambah sektor ini sangat rendah menjadi hambatan meningkatkan pendapatan para petani. Sementara sektor industri dianggap sebagai sektor produktif memberikan *multiplier effect* besar kontribusinya kecil, sebesar 4,87 persen. Kondisi serupa dialami oleh sektor atau lapangan usaha lainnya kontribusinya terhadap pembentukan ekonomi rata-rata di bawah 5 persen per tahun. Secara agregat, pasca pandemi Covid-19 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pohuwato di tahun 2022 mencapai 3,08 persen jauh di bawah rata-rata nasional dan provinsi.

Dominannya sektor pertanian menyumbang pembentukan ekonomi berdampak terhadap rendahnya pengeluaran per kapita, terdapat 52,22 persen penduduk Kabupaten Pohuwato golongan pengeluaran per kapitanya Rp. 300.000 – Rp. 750 perbulan. Rata-rata pengeluaran per kapita tersebut menunjukkan hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sementara untuk pengeluaran

kebutuhan pendidikan dan kesehatan terbatas. Akibatnya APM tingkat SLTA dan perguruan tinggi relatif rendah dan penduduk yang mengalami masalah kesehatan jumlah sangat banyak dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo.

Terbatasnya aktifitas ekonomi memberikan efek yang signifikan terhadap pendapatan daerah, dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Kabupaten Pohuwato di tahun 2022 sebesar Rp. 852,077,534.45 bersumber dari Pendapatan Asli daerah (PAD) hanya sebesar Rp. 112,262,060.97 atau 13,17 persen, artinya tingkat ketergantungan fiskal sangat tinggi. Itupun sumber PAD didominasi dari Lain-lain PAD yang sah. Demikian halnya dana transfer paling besar dari DAU bukan bagi hasil, sementara penggunaan DAU realitasnya paling besar digunakan untuk belanja pegawai dan peruntukan pada sektor *mandatory.* Padahal di tengah terbatasnya investasi, APBD atau belanja pemerintah merupakan komponen penting untuk menggerakkan roda perekonomian daerah. Menghadapi situasi seperti itu, pemerintah daerah kedepan harus dapat mengatasi hambatan agar pembangunan Kabupaten Pohuwato berjalan cepat dengan mengoptimalkan SDA yang tersedia, namun tetap menjaga kelestariannya.

C. Potensi SDA dan Degradasi Lingkungan

Problem lain adalah soal degradasi lingkungan baik pada kualitas udara, tanah dan air. Persoalan ini terjadi karena berkurangnya tutupan hutan yang semakin hari semakin berkurang yang dikarenakan oleh perluasan lahan pertanian dan perkebunan. Tidak itu saja, lahan di atas perbukitan dan tingkat kemiringan yang tinggi dimanfaatkan untuk tanaman jagung dan tanaman sereal lainnya. Begitu pula dengan berkurangnya jumlah luasan hutan mangrove yang bisa menjaga pesisir karena dijadikan lahan tambak. Hal ini berpengaruh pada mitigasi bencana di Kabupaten Pohuwato.

3.2. Isu Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi dan pemetaan permasalahan pembangunan di atas maka berikut ini dirumuskan sejumlah isu-isu pembangunan yang dinilai strategis dan berorientasi jangka panjang atas sejumlah permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Pohuwato. Bilamana permasalahan dan isu strategis

dijadikan acuan menyusun rencana pembangunan jangka panjang akan memiliki dampak besar untuk menyelesaikan masalah dan mempercepat pembangunan daerah. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa isu strategis adalah kondisi/hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah. Namun demikian memerlukan dukungan semua aktor *(stakeholders)* dan ditunjang sumberdaya yang cukup

Mengingat permasalahan pembangunan sangat banyak dan kompleks seperti diuraikan di atas, maka untuk menentukan permasalahan yang akan dijadikan bahan isu strategis perlu diidentifikasi terlebih dulu isu global, nasional, regional, dan lokal sesuai dinamika yang berkembang saat ini. Adapun isu strategis yang diidentifikasi, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 3.1 Identifikasi Isu-isu Strategis

Isu Strategis			
Dinamika Global	**Dinamika Nasional**	**Dinamika Regional**	**Dinamika Lokal**
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs): 1. Pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat; 2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan; 3. Memastikan kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan bagi semua orang di segala usia; 4. Memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang; 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan; 6. Menjamin akses atas air dan sanitasi	Arah Pembangunan Menuju Indonesia Emas; 1. Kesehatan untuk semua; 2. Pendidikan berkualitas yang merata; 3. Perlindungan sosial yang adaptif; 4. Iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi; 5. Penerapan ekonomi hijau; 6. Transformasi digital; 7. Integrasi ekonomi domestik dan global; 8. Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi; 9. Regulasi yang adaptif dan taat azas, serta tata kelola yang berintegitas, tangkas dan kolaboratif; 10. Hukum berkeadilan, ketahanan gentar kawasan, keamanan nasional tangguh dan demokrasi substansial; 11. Stabilitas ekonomi makro; 12. Ketangguhan	Prioritas Pembangunan Gorontalo dan Sulawesi *(Common Goals)*; 1. Ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat dalam bingkai kedaulatan NKRI; 2. Pembenahan Tata Kelola Pemerintahan; 3. Penguatan kapasitas SDM masyarakat Gorontalo; 4. Tingkat perekonomian Masyarakat Berbasis Potensi Lokal; 5. Pemenuhan infrastruktur dasar dan Konektivitas wilayah; 6. Mitigasi bencana dan Pengendalian Lingkungan Hidup;	Prioritas Pembangunan Tahap 2 dalam RPJPD: 1. Peningkatan mutu SDM dengan menyelenggarakan pendidikan merata, terjangkau dan berkualitas disemua tingkatan; 2. Pemenuhan kak-hak dasar masyarakat terhadap layanan kesehatan yang merata dan terjangkau; 3. Perlindungan sosial bagi masyarakat yang kurang mampu; 4. Keluarga berkualitas, pemuda produktif dan kesetaraan gender; 5. Ketahanan pangan dan pembangunan pertanian berkelanjutan; 6. Infrastruktur dasar yang handal dan merata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan wilayah; 7. Pertumbuhan ekonomi yang kuat, inklusif dan *sustain;* 8. Integrasi pembangunan sektor industri pengolahan dan UMKM yang berbasis potensi lokal;

untuk semua; 7. Memastikan akses pada energi yang terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua; 8. Mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, lapangan kerja dan pekerjaan yang layak; 9. Membangun infrastruktur kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan dan mendorong inovasi; 10. Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara-negara; 11. Membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan; 12. Mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya; 13. Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan; 14. Pelindungan dan penggunaan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan; 15. Mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati; 16. Mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif; 17. Menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan	diplomasi; 13. Beragama maslahat dan berkebudayaan maju; 14. Keluarga berkualitas dan kesetaraan gender; 15. Lingkungan hidup berkualitas; 16. Berketahanan energi, air dan kemandirian pangan; 17. Risilensi terhadap bencana dan perubahan iklim;		9. Iptek, inovasi dan transformasi digital untuk mendukung produktivitas; 10. Lingkungan berkualitas dan pemanfataan SDA yang berkelanjutan; 11. Regulasi yang mendukung iklim investasi, tata kelola pemerintahan yang bersih dan tangkas; 12. Inklusifitas beragama dan penguatan nilai budaya; 13. Risilensi terhadap bencana dan perubahan iklim; 14. Penguatan pembangunan wilayah perdesaan

berkelanjutan			

Berdasarkan permasalahan dan identifikasi isu-isu strategis yang terjadi di tingkat global, nasional, regional dan lokal, melalui pendekatan analisis keterkaitan *(linkages analysis)* maka isu strategis yang menjadi prioritas Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Pohuwato 2025 - 2045, adalah sebagai berikut:

1. Mendorong peningkatan mutu SDM dengan menyelenggarakan pendidikan merata disemua wilayah dan kalangan, terjangkau dari segi biaya dengan tetap memprioritaskan kualitas disemua tingkatan, termasuk memfasilitasi bagi penduduk mengakses pendidikan tinggi. Penyelenggaan pendidikan termasuk di dalamnya membangun sarana dan prasarana untuk menunjang proses belajar mengajar, serta peningkatan kualitas guru di semua wilayah dan tingkatan.
2. Mendorong pemenuhan kak-hak dasar masyarakat terhadap layanan kesehatan yang merata disemua wilayah dan kalangan dan terjangkau dari segi pembiayaan agar derajat kesehatan masyarakat terus mengalami peningkatan. Layanan kesehatan merata dimaksudkan agar seluruh kecamatan memiliki Puskesmas, Puskesmas Pembantu di setiap desa dan memiliki tenaga medis/tenaga kesehatan sesuai kebutuhan.
3. Memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat yang kurang mampu, agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar dan kualitas hidup.
4. Menciptakan keluarga berkualitas, pemuda produktif dapat berpatisipasi untuk pembangunan daerah dan kesetaraan gender.
5. Mewujudkan ketahanan pangan, serta dapat menunjang kebutuhan pangan IKN dan pembangunan pertanian berkelanjutan. Kabupaten Pohuwato memiliki lahan pertanian yang cukup luas selama ini belum dioptimalkan pemanfataatannya, termasuk potensi kelautan dan perikanan.
6. Membangun infrastruktur dasar yang handal dan merata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan wilayah intra dan antar kabupaten. Infrastruktur dasar dalam hal ini jalan, jembatan, listrik, drainase, pengairan, air bersih, pengolahan sampah dan telekomunikasi.
7. Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang kuat terhadap berbagai macam tantangan, pertumbuhan inklusif yang tidak hanya menciptakan peluang

ekonomi baru, tetapi juga memastikan kesempatan yang sama untuk semua lapisan masyarakat, khususnya yang miskin dan bersifat *sustain.*

8. Menciptakan integrasi pembangunan sektor industri pengolahan dan UMKM yang berbasis potensi lokal, artinya UMKM dapat menunjang kegiatan industri pengolahan yang memanfaatkan bahan baku berdasarkan potensi sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten Pohuwato.
9. Mengoptimalkan Iptek, melakukan inovasi untuk semua aspek dan mendorong transformasi digital dalam rangka mendukung produktivitas kegiatan ekonomi.
10. Menciptakan lingkungan berkualitas dan pemanfataan SDA yang berkelanjutan.
11. Menciptakan regulasi yang mendukung iklim investasi, tata kelola pemerintahan yang bersih dan tangkas dalam pelayanan.
12. Mewujudkan inklusifitas beragama, toleran dalam perbedaan, harmonis dalam kehidupan sosial dan penguatan nilai budaya yang menjadi falsafah hidup orang Gorontalo.
13. Menciptakan risilensi terhadap berbagai bencana dan perubahan iklim yang tidak menentu.
14. Mengoptimalkan potensi pertanian, perikanan dan kelautan, perkebunan serta peternakan sebagai penunjang percepatan pembangunan perdesaan, sebab selama ini daerah perdesaan menjadi kantong-kantong kemiskinan.

Sebagai rangkuman akhir dari hasil identifikasi isu-isu strategis dan analisis isu-isu strategis daerah di Kabupaten Pohuwato untuk Pembangunan Jangka Panjang Daerah hingga tahun 2045, maka dapat dirumuskan Grand Strategi pembangunan daerah sebagai berikut:

1) Pelaksanaan program pembangunan daerah yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi daerah (***Pembangunan Pro Growth***)
2) Pelaksanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada pemerataan hasil pembangunan (***Pembangunan Pro Equality***)
3) Pelaksanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup (***Pembangunan Pro Environment***)
4) Pelaksanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada pemberdayaan gender (***Pembangunan Pro Gender***)

5) Pelaksanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan (***Pembangunan Pro Poverty Alleviation***)

3.2.1. Penelaahan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*)

TPB atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2015-2030 adalah serangkaian komitmen pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, keberlanjutan lingkungan, inklusivitas tata kelola, dan melindungi kehidupan bagi generasi mendatang. Ini mencakup 17 tujuan yang berfokus pada meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat keberlanjutan sosial, melestarikan lingkungan hidup, mendorong tata kelola yang inklusif, dan mempertahankan kualitas hidup untuk generasi yang akan datang.

Tabel 3.2. TPB/SDGs

1	Tanpa Kemiskinan	7	Energi Bersih dan Terjangkau	13	Penanganan Perubahan Iklim
2	Tanpa Kelaparan	8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	14	Ekosistem Lautan
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	9	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	15	Ekosistem Daratan
4	Pendidikan Berkualitas	10	Berkurangnya Kesenjangan	16	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh
5	Kesetaraan Gender	11	Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab		

Sumber: Metadata SDGs

Dari total 17 goals dan 169 indikator yang terbagi pada empat pilar, untuk Kabupaten Pohuwato ada 10 goals dan 22 indikator yang dapat diidentifikasi ketersediaan data sehingga dapat diproyeksi capaiannya. 10 (sepuluh) indikator SDGs Kabupaten Pohuwato yang proyeksinya diramalkan dapat memenuhi bahkan melampau target atau berada pada kategori A. Sementara indikator yang proyeksinya berada pada kategori B terdapat 4 (empat) indikator, 1 (satu) indikator berada pada kategori C, dan masing-masing 2 (dua) indikator berada pada kategori D dan E. Sedangkan sisanya tidak dapat dikategorikan. Ini menunjukkan bahwa setidaknya ada 4 (empat) indikator yang membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah Kabupaten Pohuwato.

Tabel 3.3. Pemetaan Capaian Indikator SDGs Kabupaten Pohuwato

Pilar	Goal	Indikator	Target	Capaian	Proyeksi	Kategori
Sosial	1	1.1.1 Kemiskinan ekstrem	7	28.92	23.2	E
		1.2.1 Penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	7	17.62	10.21	D
		1.2.2 Imunisasi dasar	90	81.2	90.22	B
		1.2.2* Harapan lama sekolah	99	13.57	12.55	A
		1.2.2* Rata-Rata lama sekolah	98	7.12	8.3	B
	2	2.2.1* Prevalensi stunting	14	23.6	11.65	A
Ekonomi	8	8.1.1* Laju pertumbuhan PDB per kapita	7	3.84	6.41	B
		8.1.1 (a) PDB per kapita (USD)	6000 (USD)	10,038	10,973	A
	9	9.2.1 (a) Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur	8.1	4.7	6.89	C
	10	10.1.1 (a) Penduduk di bawah garis kemiskinan menurut JK dan KU	9	18.08	15.17	D
	17	17.1.1* Rasio total pendapatan terhadap PDB	12	13.16	10.09	B
		17.1.1 (a) Rasio pajak terhadap PDB	8.87	0.15	0.13	E
		17.1.2* Rasio belanja yang didanai pajak	Meningkat	1.19	1.31	
Lingkungan	6	6.1.1* Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum	100	98.5	100	A
		6.2.1c Persentase rumah tangga yang mempraktikan buang air besar sembarangan	0	1.55	0	A
		6.2.1d Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap SPALD-T	100	98.45	100	A
		6.4.2a Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan	131.36 m3/dtk	218	218	A
	11	11.1.1a Persentase rumah tangga memiliki akses hunian layak dan terjangkau	80	92.97	87.89	A
	12	12.3.1a Persentase sisa makanan	339,4jt ton	27.15	-35.26	A
		12.4.2*(a) Limbah B3 yang dihasilkan per kapita	539.8jt ton	21,441.90	21,629.70	
		12.5.1(a) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	339.4jt ton	2,540.01	1,705.04	
	13	13.1.1* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak langsung bencana	0.2/100,000	0.08	0.001	A
Hukum	Data Tidak Tersedia Untuk Pilar Hukum					

Sumber: Data diolah (2024)

3.2.2. Penelaahan Terhadap Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 bertujuan untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Meskipun Indonesia telah mengalami kemajuan signifikan dalam pembangunan selama dua dekade terakhir, tantangan ke depannya adalah menuju status sebagai negara maju. Beberapa isu dan tantangan yang dihadapi mencakup rendahnya tingkat produktivitas di tengah persaingan global yang meningkat, kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam penelitian, serta deindustrialisasi awal dan produktivitas rendah dalam sektor pertanian. Selain itu, pemanfaatan potensi pariwisata dan ekonomi laut masih belum optimal, kontribusi UMKM dan koperasi terhadap penciptaan nilai tambah ekonomi masih rendah, produktivitas tenaga kerja Indonesia masih tertinggal, dan pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip berkelanjutan. Masalah lainnya meliputi rendahnya penggunaan energi baru dan terbarukan serta efisiensi energi, kualitas pendidikan yang masih rendah, ketidakmerataan akses jaminan sosial, disharmoni dalam regulasi dan kelembagaan, rendahnya kualitas pelayanan publik, dan tingginya tingkat kehilangan serta rendahnya pemanfaatan keanekaragaman hayati.

3.2.3. Penelaahan Terhadap RPJPD Provinsi Gorontalo 2025-2045

Visi Gorontalo 2045 adalah: "***Gorontalo Provinsi Madani yang Maju dan Berkelanjutan***". Visi pembangunan Provinsi Gorontalo tahun 2025-2045 diarahkan pada pencapaian tujuan dan harapan masyarakat Gorontalo sebagai Provinsi Madani 2045. Penyebutan Provinsi Madani berdasarkan kultur dan falsafah hidup masyarakat Gorontalo yang memiliki adab dalam membangun, memaknai dan menjalankan kehidupannya.

Tabel 3.4. Sasaran Visi, Gorontalo Provinsi Madani yang Maju dan Berkelanjutan 2045

Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
Peningkatan Pendapatan Perkapita Mendukung Pendapatan Negara Setara Negara Maju	1. PDRB Perkapita (Rp. Juta)	45,78-45,84	177,62-223,84
	2. Indeks Ekonomi Biru (IBEI)	47,55	98
	3. Kontribusi PDB Manufaktur (%)	4,40-4,42	5,92-6,26
Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang	4. Tingkat Kemiskinan (%)	13,13-13,63	0,35-0,85
	5. Rasio Gini (Indeks)	0,411-0,415	0,349-0,40
	6. Kontribusi PDRB	0,25	0,18-0,6

	Provinsi (%)		
Meningkatkan peran daerah dalam Skala Regional dan Nasional	7. Indeks Daya Saing Daerah	0,55	0,71
Daya saing sumberdaya manusia meningkat	8. Indeks Modal Manusia	0,55	0,71
Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emisi	9. Penurunan intensitas emisi GRK (%)	68,19	98,77

Adapun delapan misi pembangunan adalah:

a) Mewujudkan transformasi sosial
b) Mewujudkan transformasi ekonomi
c) Mewujudkan transformasi tata kelola
d) Memantapkan keamanan daerah tangguh demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah
e) Memantapkan ketahanan sosial, budaya dan ekologi
f) Pembangunan wilayah yang merata dan berkeadilan
g) Dukungan sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
h) Kesinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas

3.2.4. Penelaahan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah

RTRW Kabupaten Pohuwato merupakan implementasi dari RTRWN dan RTRW Provinsi Gorontalo ke dalam praktik pemanfaatan ruang wilayah di Kabupaten Pohuwato. Ini mencakup tujuan, kebijakan, dan strategi untuk pengaturan ruang wilayah kabupaten, serta rencana struktur ruang wilayah yang termasuk sistem perkotaan dan jaringan prasarana wilayah. Selain itu, mencakup rencana pola ruang wilayah yang menetapkan kawasan lindung dan budidaya, penetapan kawasan strategis, arahan untuk penggunaan ruang wilayah yang mencakup program utama dalam lima tahun ke depan, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah, termasuk aturan zonasi, izin, insentif, disinsentif, serta sanksi.

Rencana pengembangan sistem perkotaan wilayah Kabupaten Pohuwato menggambarkan suatu upaya yang sangat terstruktur dan terinci dalam mengorganisir ruang perkotaan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal. Berdasarkan dokumen RTRW, susunan hirarki sistem perkotaan Kabupaten Pohuwato sebagai berikut:

1. **Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp):** Kota Marisa merupakan PKWp dengan cakupan pelayanan untuk wilayah Kabupaten Pohuwato dan sekitarnya. Ini mencakup wilayah administratif Kecamatan Marisa, sebagian Kecamatan Duhiadaa, dan sebagian Kecamatan Buntulia. Kota Marisa direncanakan untuk memiliki interkoneksi dengan simpul transportasi regional dan nasional seperti Terminal angkutan darat Marisa, Pelabuhan Laut Paguat, Bandar Udara Imbodu-Randangan, dan keterhubungan dengan Bandar Udara Djalaluddin di Kabupaten Gorontalo, serta Pelabuhan Anggrek dan Pelabuhan Kwandang di Kabupaten Gorontalo Utara.
2. **Pusat Kegiatan Lokal (PKL):** Kota Paguat dan Kota Popayato merupakan PKL dengan cakupan pelayanan sub-wilayah Kabupaten Pohuwato. Kota Paguat melayani bagian timur dan berbatasan dengan Kabupaten Boalemo, sedangkan Kota Popayato melayani bagian barat dan berbatasan dengan Kabupaten Parigimoutong (Provinsi Sulawesi Tengah).
3. **Pusat Pelayanan Kawasan (PPK):** Terdiri dari dua kota kecamatan, yaitu Kota Lemito (melayani Kecamatan Lemito dan Wanggarasi) dan Kota Motolohu (melayani Kecamatan Randangan dan Taluditi). Ini bertujuan untuk efektivitas cakupan pelayanan ke wilayah-wilayah sekitarnya dan mendorong percepatan pengembangan kawasan.
4. **Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL):** Merupakan pusat permukiman untuk melayani kegiatan skala antar desa. Direncanakan terdiri dari tiga kota, yaitu Kota Panca Karsa II di Kecamatan Taluditi, Kota Molosipat Utara di Kecamatan Popayato Barat, dan Kota Wanggarasi Timur di Kecamatan Wanggarasi.

Rencana pengembangan sistem jaringan jalan di Kabupaten Pohuwato mengikuti penjabaran dari RTRWN dan RTRW Provinsi Gorontalo. Ini mencakup:

1. **Jaringan Jalan Arteri Primer:** Terdiri dari jalan lintas timur Sulawesi yang menghubungkan Provinsi Gorontalo dengan Provinsi Sulawesi Tengah, melalui Marisa dan Paguyaman, serta pembangunan jalan by pass Isimu-Marisa-Molosipat-Sulawesi Tengah untuk memudahkan akses dari/ke Kota Gorontalo dan Bandar Udara Djalaluddin.

2. **Jaringan Jalan Kolektor Primer:** Berfungsi sebagai penjabaran dari jaringan jalan provinsi, dengan menghubungkan Kabupaten Pohuwato dengan Kabupaten Gorontalo Utara. Jalan ini mengakses Bandar Udara Imbodu di Randangan, melalui beberapa kecamatan di Pohuwato hingga ke wilayah Gorontalo Utara, dengan panjang ruas sekitar 85 km.
3. **Jaringan Jalan Lokal Primer:** Merupakan jalan internal yang menghubungkan Kota Marisa (PKWp) dengan kota-kota yang menjadi Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) di Kabupaten Pohuwato. Ada dua poros utama, yaitu poros Marisa-Molosipat Utara sepanjang sekitar 55 km, dan poros Marisa-Wanggarasi Timur sepanjang sekitar 10 km. Tujuan utamanya adalah mendorong pertumbuhan dan perkembangan kota-kota kecamatan serta pusat-pusat desa, dan mengurangi kesenjangan pertumbuhan antar kawasan dalam wilayah Kabupaten Pohuwato.

Rencana pengembangan terminal angkutan darat di Kabupaten Pohuwato mengacu pada lokasi yang ada saat ini di Kota Marisa. Lokasi ini dipilih karena secara geografis berada di tengah, memudahkan aksesibilitas ke berbagai wilayah dalam dan luar kabupaten. Terminal Marisa, selain melayani wilayah Pohuwato, juga berpotensi menjadi terminal regional, dengan kemungkinan meningkat menjadi terminal tipe A dalam 5-10 tahun mendatang. Terminal ini akan terhubung dengan terminal lain dalam Provinsi Gorontalo, membentuk jaringan yang terintegrasi. Terdapat beberapa trayek angkutan umum yang beroperasi dari dan menuju Terminal Marisa, termasuk trayek ke berbagai kota kecamatan di Pohuwato dan sekitarnya. Selain itu, dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, terdapat pengembangan jaringan kereta api nasional yang melintasi wilayah Gorontalo, termasuk Kabupaten Pohuwato. Jaringan ini berfokus pada angkutan barang, dengan stasiun utama di Kota Gorontalo dan stasiun lainnya di Popayato dan Marisa di Pohuwato, serta beberapa kota lain di sekitarnya.

BAB IV
VISI DAN MISI DAERAH

4.1. Visi Kabupaten Pohuwato Tahun 2025 - 2045

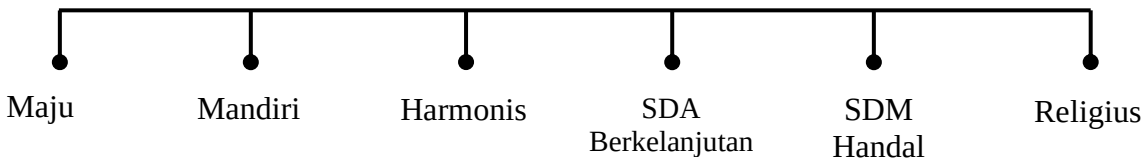
Visi pembangunan Kabupaten Pohuwato 2045 mengacu pada uraian tentang kondisi yang ada, tantangan dan modal dasar pembangunan daerah yang dimiliki, serta mengacu pada pencapaian tujuan nasional yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, dan tidak terlepas dari Visi Indonesia Emas 2045, yaitu **Negara Nusantara** sebagai negara kepulauan yang **Berdaulat, Maju,** dan **Berkelanjutan**. Membangun Indonesia Emas 2045 merupakan cita-cita besar bangsa Indonesia yang tercermin dalam RPJPN 2025 – 2045. Ketercapaian Visi RPJPN 2025-2045 diukur dengan 5 (lima) sasaran utama Visi Indonesia Emas 2045, diantaranya; 1) Pendapatan Perkapita Setara Negara Maju (GNI Perkapita, Kontribusi PDB Maritim, Kontribusi PDB Manufaktur), 2) Kemiskinan Menuju 0 persen dan ketimpangan berkurang, 3) Kepemimpinan dan Pengaruh Dunia Internasional Meningkat *(Global Power Index),* 4) Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat *(Human Capital Index),* dan 5) Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju *Net Zeo Emission* (Penurunan Emisi GRK).

Pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 dilakukan melalui 8 (delapan) misi (agenda) pembangunan, yaitu Transformasi Sosial; Transformasi Ekonomi; Transformasi Tata Kelola; Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Ketangguhan Diplomasi; Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi; Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan; Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; serta Kesinambungan Pembangunan. Berdasarkan dari kondisi tersebut, maka visi Kabupaten Pohuwato tahun 2025 – 2045 adalah : **"Pohuwato yang Maju, Mandiri, Harmonis Berbasis SDA Bernilai Tambah dan Berkelanjutan yang Ditunjang SDM Handal Berlandaskan Nilai-Nilai Religius**"
Visi ini meletakkan keberhasilan pembangunan di Kabupaten Pohuwato dapat diukur berdasarkan indikator kemajuan, kemandirian dan keharmonisan dengan mengandalkan pada potensi sumber daya alam, dalam hal ini pertanian dan pertambangan yang memiliki nilai tambah, dimana potensi sumber daya yang tersedia dapat dikelola oleh sumber daya manusia yang handal, dengan tidak

mengesampingkan nilai-nilai religius dalam rangka menjamin terciptanya keseimbangan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan.



Kabupaten Pohuwato



Maju, menunjukkan cita-cita pemerintah daerah dan masyarakat Pohuwato yang menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), serta mampu beradaptasi dengan kemajuan zaman. Ini dicerminkan dengan makin berkembangnya penggunaan IPTEK dalam segala aktivitas, sehingga makin meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ketahanan ekonomi berbasis pengetahuan. Beberapa indikator kemajuan juga dapat diukur dari makin meningkatnya derajat pendidikan dan kesehatan, aksesibilitas antar wilayah makin lancar, makin berkurangnya disparitas antar wilayah, sikap demokratis makin tumbuh subur, investasi yang makin meningkat yang didukung oleh sistem hukum dan pemerintahan yang memiliki integritas dan berorientasi pelayanan.

Mandiri, menunjukkan cita-cita pemerintah daerah untuk membangun masyarakat dan pemerintahan berdasarkan kemampuan sendiri dengan menggunakan segala potensi dan kemampuan yang dimiliki. Setiap daerah pasti memiliki tantangan dan permasalahan yang berbeda, dalam menyelesaikannya sedapat mungkin diatasi sendiri. Pemerintah daerah dan masyarakatnya memiliki kemampuan mengendalikan dinamika lingkungan strategis, serta keotonomian dalam pengambilan keputusan dan tindakan untuk kepentingan masyarakat, daerah dan bangsa.

Harmonis, menunjukkan cita-cita pemerintah daerah untuk menjaga dan menjamin keharmonisan dalam bidang sosial, ekonomi, politik, budaya dan keagamaan yang dilakukan secara internal maupun ekternal serta horizontal maupun vertikal. Perilaku harmonis yang dimaksud dalam kehidupan bermasyarakat adalah saling peduli serta menghargai perbedaan (keragaman), karena perbedaan merupakan keniscayaan.

Berbasis SDA, menunjukkan cita-cita pemerintah daerah ingin membangun dengan mengoptimalkan potensi SDA yang dimiliki, sebab potensi SDA yang tersedia di Kabupaten Pohuwato cukup besar untuk kegiatan pertanian dan sumber daya mineral. Namun selama ini belum termanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat, pengelolaan pertanian cenderung masih subsisten dan tidak dilakukan pengolahan. Kegiatan pertambangan ditemukan masih bersifat tradisional, selain merusak lingkungan juga tidak efisien pengolahannya sehingga terjadi kehilangan potensi nilai ekonomi. Agar memberikan manfaat ekonomi secara optimal, potensi sektor pertanian dikembangkan lewat agroindustri (hilirisasi) dan sumber daya mineral dikelola dengan bersifat industrial (pengolahan) sehingga memiliki nilai tambah untuk menciptakan dampak ekonomi yang luas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berkelanjutan, menunjukkan cita-cita pemerintah daerah untuk memajukan perekonomian dengan mengandalkan dan mengoptimalkan SDA yang tersedia. Dan pemerintah daerah berkomitmen dalam membangun menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pengelolaan SDA yang berkelanjutan. SDA yang tersedia diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dalam mencapai kesejahteraan dan kemakmuran generasi sekarang tanpa mengorbankan generasi mendatang.

SDM Handal, menunjukkan cita-cita pemerintah daerah menciptakan manusia yang memiliki moral dan intelektual, peduli terhadap daerah, kemampuan beradaptasi terhadap perubahan zaman dan kemajuan IPTEK, tingkat pendidikan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, produktivitas yang tinggi dalam menghadapi persaingan global di era masayarakat 4.0 dan *society 5.0.*

Relegius, menunjukkan cita-cita pemerintah dan masyarakat Pohuwato untuk selalu mencerminkan dan tidak meninggalkan norma keagamaan dalam perilaku

dan tindak pada berbagai aktivitas pembangunan untuk mengahadapi perubahan tatanan global yang begitu dinamis dan cepat.

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Pohuwato yang **Maju, Mandiri, Harmonis Berbasis SDA Bernilai Tambah dan Berkelanjutan yang Ditunjang SDM Handal Berlandaskan Nilai-Nilai Religius** yang selaras visi **Gorontalo Provinsi Madani yang Maju dan Berkelanjutan**, dan mendukung **Visi Indonesia Emas 2045**, maka ditetapkan sasaran pembangunan untuk periode jangka panjang 2025 - 2045, sebagai berikut :

Tabel 4.1. Sasaran Visi, Kabupaten Pohuwato Maju, Mandiri, Harmonis Berbasis SDA Bernilai Tambah dan Berkelanjutan yang Ditunjang SDM Handal Berlandaskan Nilai-Nilai Religius

RPJPD Kabupaten Pohuwato 2025 - 2045				
Visi	**Sasaran Visi**	**Indikator**	**Baseline 2025**	**Target 2045**
MAJU, MANDIRI, HARMONIS BERBASIS SDA BERNILAI TAMBAH DAN BERKELANJUTAN YANG DITUNJANG SDM HANDAL BERLANDASKAN NILAI-NILAI RELIGIUS	Pendapatan Perkapita Setara Daerah Maju	1. PDRB Perkapita (Rp. Juta)	35.000	75.000 – 100.000
		2. Kontribusi PDRB Maritim (%)		
		3. Kontribusi PDRB Manufaktur %)	5	15 – 20
	Kemiskinan menuju 0 % dan ketimpangan berkurang	4. Tingkat Kemiskinan (%)	16	3 - 8
		5. Rasio Gini (Indeks)	0.406	0.200
		6. Kontribusi PDRB Pohuwato Terhadap Gorontalo (%)	16.35	16.95
	Kepemimpinan kepemimpinan daerah yang efektif yang memberikan pengaruh global	7. Indeks Daya Saing Daerah	2.73	9.94
	Daya saing sumber daya manusia meningkat	8. Indeks Pembangunan Manusia	67.15	78.19
	Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emissio	9. Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)		

Sasaran Pertama, Pendapatan Perkapita Kabupaten Pohuwato setara daerah maju sekitar 75.000 – 100.000 (ribu rupiah), dimana peningkatan per kapita utamanya didorong oleh kontribusi PDRB Sektor Industri Manufaktur sekitar 20 persen dan PDRB Sektor Kelautan sekitar 5 persen. Dalam rangka meningkatkan peranan kedua sektor tersebut dikembangkan dengan berbasis inovasi dan teknologi modern untuk meningkatkan produktivitas, selain itu bersifat *labor intensive* sehingga dapat menyerap

tenaga kerja yang banyak untuk mempercepat pergeseran struktur tenaga kerja, dan penduduk Kabupaten Pohuwato jumlah kelas menengah meningkat hingga 50 persen.

Sasaran Kedua, sejalan peningkatan ekonomi yang makin tinggi, kesempatan kerja terbuka lebar dan pendapatan kelas menengah meningkat sehingga berdampak terhadap menurunnya angka kemiskinan hingga *single digit* (3 – 8 %), yang diikuti secara signifikan penurunan jumlah penduduk rentan miskin. Secara bersamaan ketimpangan distribusi pendapatan antar penduduk makin kecil 0.20 dan ketimpangan antar wilayah menurun drastis dengan peningkatan kontribusi Pohuwato terhadap pembentukan ekonomi Gorontalo dan regional Sulawesi meningkat menjadi 16.95 persen.

Sasaran Ketiga, sejalan dengan makin majunya perekonomian Kabupaten Pohuwato, tingkat pendapatan masyarakat meningkat dan kelas menengah bertambah akan berkontribusi terhadap pembentukan ekonomi nasional. Kemajuan yang diraih oleh Indonesia yang diukur dengan penghasilan tinggi setara dengan negara maju, dengan sendirinya Indonesia makin memiliki pengaruh yang kuat di dunia internasional, diplomasi dan kepemimpinan global serta pengaruh budaya dan peran aktif dalam kerjasama dengan organisasi internasional serta berkontribusi dalam isu-isu global.

Sasaran Keempat, meningkatnya daya saing SDM Kabupaten Pohuwato dengan produktivitas yang makin tinggi akan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan secara keseluruhan. Meningkatnya daya saing sumber daya manusia melalui perbaikan akses pendidikan yang merata disemua tingkatan, kegiatan pelatihan dan pengembangan etos kerja, produktif, mendorong inovasi dan kreatifitas masyarakat, serta memperbaiki derajat kesehatan untuk seluruh lapisan masyarakat.

Sasaran Kelima, untuk mewujudkan Kabupaten Pohuwato menjadi daerah maju dengan mengandalkan potensi SDA, pemerintah daerah berkomitmen melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pembangunan ramah lingkungan dengan mengembangkan ekonomi hijau agar intensitas emisi GRK menurun menjadi ….. di tahun 2045.

4.2. Misi Kabupaten Pohuwato Tahun 2025 – 2045

Berangkat dari visi yang telah dijelaskan sebelumnya untuk mewujudkan **Pohuwato Maju** dan menunjang **Indonesia Emas 2045**, maka ditetapkan 8 (delapan) misi pembangunan daerah dengan uraian sebagai berikut :

1. **Mewujudkan Transformasi Sosial,** yaitu membangun sumberdaya manusia Pohuwato yang sehat, cerdas, terampil, produktif dan sejahtera. Hal ini akan dicapai melalui; peningkatan, perluasan dan pemerataan akses pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat, peningkatan penguasaan dan pemanfaatan Iptek melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan, peningkatan kesadaran emosional dan spritual, peningkatan kualitas peran masyarakat di bidang keagamaan, seni, sosial budaya, adat, olahraga, politik, dan keamanan.
2. **Mewujudkan Transformasi Ekonomi,** perekonomian Pohuwato bertumpu pada potensi unggulan daerah, berdaya saing dan berkelanjutan. Pengembangan ekonomi ini menekankan pada kompetensi inti daerah dengan basis pertanian dalam arti luas, dilakukan dalam suatu sistem agribisnis dan agroindustri yang memiliki keterkaitan dengan industri pengolahan, terintegrasi dengan ekonomi regional, nasional dan global. Selain itu mengoptimalkan pengelolaan SDA mineral untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, mengembangkan UMKM dan koperasi, transformasi digital, penerapan ekonomi hijau dan menjadikan perkotaan pusat pertumbuhan ekonomi dengan *linkage* aktifitas ekonomi perdesaan.
3. **Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan**, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Pohuwato dengan membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas, adaptif dan tanggap dengan berbasis tekonologi informasi.
4. **Memantapkan Keamanan dan Ketertiban, Praktek Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro yang Kuat,** dengan memantapkan keamanan dan menjaga ketertiban masyarakat, meminumkan kriminalitas dibarengi dengan pelaksanaan demokrasi yang berkualitas (subtansial) akan melahirkan kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah, sehingga daerah memiliki daya

saing investasi selanjutnya memperkuat stabilitas makro ekonomi untuk menarik investasi.

5. **Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi,** perubahan merupakan keniscayaan pasti akan terjadi bahkan lebih cepat *(volatilitas)* dari yang dipikirkan. Cepatnya perubahan yang terjadi dapat melahirkan ketidakpastian *(uncertainty),* sehingga menimbulkan goncangan bahkan menjadi bencana. Cara menghadapi kondisi tersebut diperlukan ketahanan sosial dengan membangun ketangguhan individu melalui penguatan keluarga dan komunitas masyarakat berdasarkan nilai-nilai budaya setempat yang telah mengakar. Khazanah budaya tersebut dijadikan sebagai spirit (semangat) sebagai modal sosial, sekaligus benteng menghadapi goncangan dan bencana sebagai dampak kemajuan pembangunan dan perkembangan Iptek. Selain itu, kemajuan pembangunan selama ini secara diametral acapkali berkorelasi negatif terhadap kondisi lingkungan yang dapat melahirkan bencana alam. Maka dalam proses pembangunan kedepan perlu dilakukan penyeimbangan timbal balik dengan memantapkan ketahanan sosial budaya dan keberlanjutan sumber daya alam harus terjaga.
6. **Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan**, kemajuan pembangunan yang telah dicapai cukup pesat, tetapi disatu sisi menghasilkan ketimpangan distribusi pendapatan dan wilayah. Maka pembangunan kewilayahan dilakukan dengan meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjamahan agenda transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola yang dilengkapi dengan penegakan hukum yang adil, praktek demokrasi yang sehat, dan stabilitas makro ekonomi yang kuat serta ketahanan sosial budaya dan ekologi.
7. **Dukungan Sarana Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan**, menjadi kunci pengembangan wilayah, dengan sarana prasarana yang memadai akan memperlancar kegiatan ekonomi dan aksesibilitas orang/barang, sehingga mendorong produktivitas hal ini dapat menjadi pilar pendukung agenda transformasi.
8. **Kesinambungan Pembangunan,** untuk meujudkan Pohuwato Maju serta mengawal pencapaian Indonesia Emas, diwujudkan melalui kaidah

pelaksanaan yang efektif, tata kelola pemerintahan yang berintegritas serta pembiayaan pembangunan yang pasti dengan tidak hanya mengandalkan pembiayaan dari APBN/APBD.

BAB V
ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH 2025 - 2045

5.1. Arah Kebijakan

Tujuan jangka panjang yang hendak diwujudkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato adalah "**Pohuwato yang Maju, Mandiri, Harmonis Berbasis SDA Bernilai Tambah dan Berkelanjutan yang Ditunjang SDM Handal Berlandaskan Nilai-Nilai Religius**" di tahun 2045. Cita-cita jangka panjang ini dicapai melalui dalam 8 (delapan) misi, 17 (tujuh belas) arah kebijakan pembangunan dan 45 (empat puluh lima) indikator sasaran utama pembangunan. Delapan misi pembangunan tersebut terdiri dari 3 (tiga) misi transformasi yang ditopang 2 (dua) misi landasan pelaksanaan transformasi pembangunan serta 3 (tiga) misi sebagai kerangka implementasi yang terjabarkan ke dalam 17 arah kebijakan pembangunan Kabupaten Pohuwato 20 tahun kedepan (2025 – 2045).

5.2. Sasaran Pokok RPJPD 2025 - 2045

Tabel 5.1 Arah Kebijakan/Tujuan Pembangunan Kabupaten Pohuwato 2025-2045

Pohuwato yang Maju, Mandiri, Harmonis Berbasis SDA Bernilai Tambah dan Berkelanjutan yang Ditunjang SDM Handal Berlandaskan Nilai-Nilai Religius		
Arah Kebijakan/Tujuan Pembangunan		
Transformasi Sosial	**Transformasi Ekonomi**	**Transformasi Tatakelola Pemerintahan**
1. Kesehatan Untuk Semua 2. Pendidikan Berkualitas **3.** Perlindungan Sosial yang Adaptif	4. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi 5. Penerapan Ekonomi Hijau 6. Transformasi Digital 7. Integrasi Ekonomi Domestik, Regional dan Global 8. Perkotaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	9. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif
Landasan Transformasi Pembangunan Daerah		
Memantapkan Keamanan dan Ketertiban, Praktek Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro yang Kuat		**Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi**
10. Penegakan Hukum yang Berkeadilan, Keamanan dan		13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju 14. Keluarga Berkualitas,

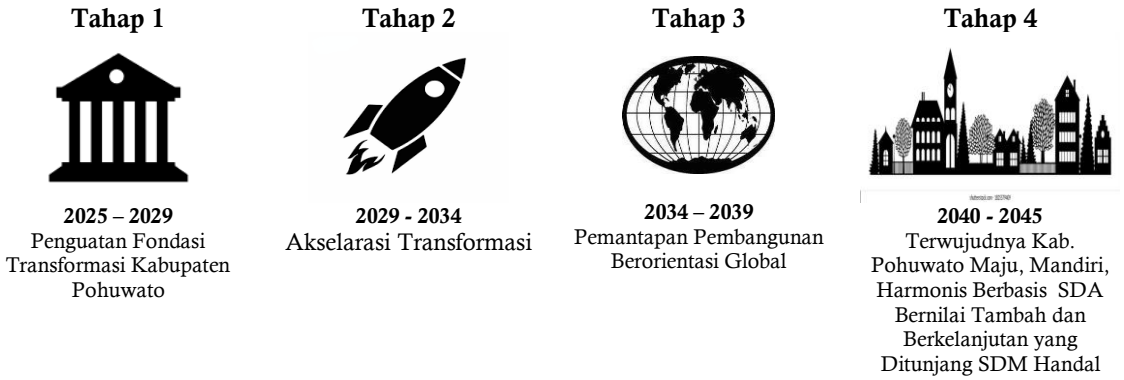
Ketertiban 11. Stabilitas Ekonomi Makro 12. Memantapkan Sistem Demokrasi Substansial dan Kepemimpinan Daerah yang Kuat		Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif 15. Lingkungan Hidup Berkualitas 16. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan 17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
Kerangka Implementasi Transformasi		
Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	Pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Kesinambungan pembangunan

Untuk mencapai misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Pohuwato selama 20 tahun kedepan, membutuhkan nilai-nilai ideal bagaimana misi tersebut dapat dilaksanakan. Hal utama harus diperhatikan, yakni kesesuaian dalam mewujudkan transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan ditunjang oleh pertahanan dan keamanan yang mantap, praktek demokrasi berkualitas dan stabilitas makroek onomi yang kuat, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Mewujudkan misi tersebut harus dilandasi dengan nilai-nilai budaya dan agama **(Adat bersendikan syara', dan syara' bersendikan kitabullah)** yang selama ini telah melekat di masyarakat Gorontalo pada umumnya dan Kabupaten Pohuwato pada khususnya.

Berkaitan dengan misi untuk mewujudkan Transformasi Pohuwato Maju di Tahun 2045, ada satu nilai penting yang harus dijunjung tinggi, yakni kedaulatan rakyat. Artinya pembangunan dilakukan dengan segala manfaat dan keuntungan yang berhasil dicapai tidak lain untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kepentingan rakyat menjadi tujuan utama dan tertinggi dalam segala aspek bernegara, misalnya di bidang ekonomi manfaat yang diperoleh oleh negara bertujuan untuk mengangkat derajat dan kesejahteraan rakyat. Kedaulatan rakyat dan pencapaian kesejahteraan yang tinggi harus dinikmati secara bersama-bersama seluruh elemen bangsa.

Sementara itu pentahapan pembangunan dalam jangka panjang harus dilakukan dengan terukur dan konsisten dalam rangka memudahkan pencapaian visi (Sejahtera, Maju, Mandiri dan Berkelanjutan). Arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah, selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana jangka menengah

daerah setiap 5 (lima) tahun, untuk memberikan panduan bagi pencapaian indikator kinerja sasaran pokok pembangunan. Dengan demikian dibagi menjadi 4 (empat) tahap pembangunan yang dituangkan dalam RPJMD I Tahun 2025–2029, RPJMD II Tahun 2029–2034, RPJMD III Tahun 2034–2039, dan RPJMD IV Tahun 2040–2045.



Gambar 5.1. Pentahapan Implementasi RPJPD Kabupaten Pohuwato 2025 – 2045

Tahap Pertama (2025 – 2029), penguatan fondasi transformasi, pada tahap ini pertumbuhan ekonomi diperkirakan pada kisaran 5 – 7 persen per tahun. Pada tahapan lima tahun pertama ini diwujudkan melalui; Transformasi sosial fokus pada (i) pelayanan kesehatan untuk semua, (ii) pendidikan berkualitas dan merata, serta (iii) perlindungan sosial yang adaptif. Transformasi ekonomi fokus pada (i) penciptaan nilai tambah komoditi serta melakukan hilirisasi SDA yang didukung oleh teknologi dan inovasi sehingga lebih efisien dan berdaya saing, (ii) peningkatan produktivitas tenaga kerja disemua sektor, (iii) penerapan ekonomi ekonomi hijau dan biru, serta (iv) percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan. Tranformasi tata kelola pemerintahan fokus (i) kelembagaan pemerintah tepat fungsi dan kolaboratif, (ii) peningkatan kualitas ASN dan peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, (iii) regulasi atau peraturan daerah yang efisien dan ramah investasi, (iv) partai politik berintegritas dan pendidikan politik, serta (v) pemberdayaan masyarakat sipil. Memantapkan keamanan dan ketertiban, praktek demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro yang kuat fokus pada (i) penguatan supremasi hukum, (ii) memantapkan ketertiban, serta (iii) stabilitas politik daerah dan stabilitas ekonomi makro. Ketahanan sosial budaya dan ekologi fokus pada penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan Kabupaten Pohuwato.

Tahap Kedua (2030 – 2034), akselarasi transformasi pembangunan, pada tahap akselarasi ditargetkan pertumbuhan ekonomi sekitar 8 – 10 persen per tahun. Tahapan lima tahun kedua diwujudkan melalui; Transformasi sosial kemasyarakatan fokus pada (1) percepatan pembangunan SDM dan peningkatan daya saing SDM, (ii) kesejahteraan masyarakat tinggi dan merata. Transformasi ekonomi, fokus pada (i) peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah, (iii) perluasan sumber pertumbuhan baru, serta (iv) penciptaan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan strategis daerah. Transformasi tata kelola pemerintahan fokus pada (i) SDM ASN yang kompeten dan profesional, (ii) regulasi berbasis teknologi informasi, (iii) pendidikan politik dan partai politik berintegritas, serta (iv) masyarakat sipil partisipatif dalam pembangunan. Memantapkan keamanan dan ketertiban, praktek demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro yang kuat fokus pada (i) memantapkan supremasi hukum dan kepatuhan hukum yang tinggi, (ii) Memantapkan stabilitas dan ketertiban, serta (iii) Stabilitas ekonomi makro. Ketahahan sosial budaya dan ekologi fokus pada pemantapan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai pendorong pembangunan ekonomi yang inklusif.

Tahap Ketiga (2034 – 2039), pemantapan transformasi berorientasi global, pada tahap pemantapan pembangunan pertumbuhan ekonomi ditargetkan kisaran di atas 10 persen setiap tahun. Tahapan periode ketiga diwujudkan melalui; Transformasi Sosial fokus pada (i) penguatan daya saing SDM, (ii) keberlanjutan kesejahteraan masyarakat secara merata. Transformasi ekonomi, fokus pada (i) peningkatan produksi dan kualitas produk, (ii) perluasan pemasaran produk dan ekspor komoditi olahan, (iii) produk UMKM dan komoditi olahan menjadi bagian dari mata rantai perdagangan nasional dan global. Transformasi tata kelola, fokus pada (i) kelembagaan adaptif dengan perkembangan, ((ii) SDM ASN berkinerja tinggi dan cekatan, (iii) regulasi adaptif, (iv) partai politik modern, serta (v) masyarakat sipil kuat dan mandiri. Memantapkan keamanan dan ketertiban, praktek demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro yang kuat, fokus pada (i) Pohuwato yang berkeadilan, bebas dari praktek korupsi, (ii) Kemananan yang mantap, ketertiban terjaga dan nyaman (iii) Demokrasi makin berkualitas, serta (iv) Ekonomi makro makin tangguh. Ketahahan sosial budaya dan ekologi, fokus pada

(i) ketangguhan keluarga dan masyarakat menghadapi perubahan yang volatilitas, (ii) alam dan lingkungan yang lestari.

Tahap keempat (2040 – 2045), terwujudnya Pohuwato Maju, Mandiri, Harmonis Berbasis SDA yang ditunjang SDM Handal yang Religius mendukung pencapaian **Indonesia Emas di tahun 2045**. Pada tahap ini pertumbuhan ekonomi ditargetkan rata-rata 7 – 9 persen, terjadi penurunan dibanding periode sebelumnya karena siklus ekonomi yang biasa muncul. Selain itu, elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap indikator kesejahteraan masyarakat makin besar, serta ukuran *(size)* ekonomi bertambah. Tahapan periode keempat ini diwujudkan melalui; Transformasi sosial, difokuskan pada terwujudnya manusia Kabupaten Pohuwato unggul dan religius. Transformasi ekonomi, fokus pada perwujudan Pohuwato berpendapatan tinggi dan masyarakatnya sejahtera. Tata kelola pemerintahan fokus pada terwujudnya regulasi dan tata kelola yang berintegritas serta adaptif. Memantapkan keamanan dan ketertiban, praktek demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro yang kuat, fokus pada (i) terwujudnya Pohuwato sebagai daerah yang aman, damai dan nyaman, (ii) sebagai tujuan investasi yang dapat berkontribusi terhadap pembangunan nasional. Ketahahan sosial budaya dan ekologi, fokus pada Kabupaten Pohuwato maju, mandiri dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi Gorontalo dan di Kawasan Teluk Tomini yang berkelanjutan.

Dalam rangka mengimplementasikan tahapan fokus pembangunan setiap periode, maka arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan perlu ditetapkan.

5.1.1. Transformasi Sosial

Pembangunan Kabupaten Pohuwato selama 20 tahun kedepan akan menghadapi perubahan besar, seperti perubahan struktur penduduk, kemajuan teknologi, perubahan iklim, pergolakan geopolitik kawasan, pergeseran struktur ekonomi dan perubahan budaya (perilaku). Menghadapi perubahan yang akan terjadi di masa depan menuntut adanya kesiapan dan antisipasi secara adaptif lewat transformasi sosial, sebab transformasi sosial dapat menjadi kunci menangani perubahan tersebut sehingga masyarakat Kabupaten Pohuwato dapat menghadapi tantangan lebih besar dan dapat beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi.

Transformasi sosial bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kaulitas hidup manusia disetiap siklus kehidupan, karena itu transformasi sosial diarahkan untuk (i) mengatasi kemiskinan yang masih sangat tinggi dan mengurangi ketimpangan, (ii) menciptakan keadilan sosial agar setiap masyarakat Pohuwato memiliki kesempatan yang sama mendapatkan layanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial dan perlindunagn dari segala bentuk kekerasan, (iii) membentuk SDM yang menguasai Iptek dan inovatif, (iv) membangun masyarakat yang inklusif, ramah dan peduli sesama tanpa melihat fisik, suku, ras dan agama, (v) pembangunan berwawasan lingkungan untuk menciptakan masa depan berkelanjutan, dan (vi) mempromosikan keluarga berkualitas, kesetaran gender, masyarakat inklusif dan religius. Untuk mewujudkan tercapainya misi transformasi sosial, maka arah pembangunan dua puluh tahun kedepan menekankan pada; Kesehatan Untuk Semua, Pendidikan Yang Merata dan Berkualitas, serta Perlindungan Sosial yang Adaptif.

1) Mewujudkan Kesehatan Untuk Semua

Pembangunan kesehatan bertujuan agar setiap penduduk dapat hidup sehat, layanan dasar yang diberikan mencakup semua penduduk, pada seluruh siklus kehidupannya, di seluruh wilayah Pohuwato. Pelayanan dasar kesehatan terjangkau dan berkualitas diberikan kepada seluruh penduduk, dan pembangunan kesehatan harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Kebijakan pembangunan kesehatan diarahkan dengan fokus pada; 1) Peningkatan upaya kesehatan masyarakat, perluasan upaya promotif dan preventif dan menciptakan perilaku hidup sehat bagi semua kalangan masyarakat. 2) Pengendalian peredaran dan konsumsi produk yang berdampak negatif bagi kesehatan masyarakat, 3) Penanggulangan gizi buruk, penurunan prevalensi stunting dan percepatan penanganan penyakit menular, 4) Peningkatan layanan kesehatan ibu, anak dan lanjut usia, 5) Penyediaan pelayanan kesehatan yang tanggap dan berbasis IT, serta layanan kesehatan *mobile* di daerah perpencil, 6) Pemenuhan tenaga medis dan kesehatan yang didukung dengan sarana prasarana dan peralatan yang canggih, serta pemberian insentif yang memadai bagi tenaga medis dan kesehatan di daerah terpencil, dan 7) Pengembangan sistem telemedicine yang didukung oleh peningkatan cakupan jaminan sosial (kesehatan dan ketenagakerjaan).

2) Pendidikan yang Merata dan Berkualitas

Pendidikan memiliki peranan sentral untuk menciptakan peradaban dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Kebijakan pembangunan pendidikan diarahkan untuk menciptakan SDM unggul dan berdaya saing, dengan fokus pada; 1) Pemerataan akses pendidikan dengan percepatan wajib belajar 13 tahun dalam rangka meningkatkan rata-rata lama sekolah. 2) Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran lewat peningkatan kapasitas pendidik (guru), mengintegrasikan model pembelajaran *soft skill, social skill* dan *life skill,* peningkatan kecakapan literasi, penguatan pendidikan inklusif dan penguatan pendidikan karakter. 3) Pemerataan kualitas pendidikan antarsatuan dan antarwilayah untuk menghasilkan kualitas lulusan yang sama dengan distribusi guru yang merata. 3) Akselarasi peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan pengembangan program afirmasi untuk mengakses pendidikan tinggi pada wilayah terpencil. 4) Peningkatan kualitas dan keterampilan SDM berdasarkan potensi daerah serta kebutuhan pasar kerja.

3) Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan sosial yang adaptif ditujukan untuk percepatan penuntasan kemiskinan dan memperluas perlindungan yang menyeluruh, berkeadilan dan inklusif. Kebijakan ini difokuskan pada; 1) Pengentasan kemiskinan terutama fokus di wilayah perdesaan dan perlindungan sosial yang adaptif dan integratif, 2) Peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja bukan penerima upah, dan perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas. 3) Perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan, pengembangan perlindungan sosial daerah yang adaptif bagi seluruh masyarakat secara integratif dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat, penanggulangan bencana dan dampak perubahan iklim. 4) Menciptakan ekosistem inklusif, termasuk perlindungan sosial, pemenuhan hak dasar masyarakat tanpa kecuali, kegiatan ekonomi produktif dan pembangunan infrastruktur dasar untuk menunjang ketahanan ekonomi keluarga. 5) Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah, serta kolaborasi antar *stakeholders* dalam penyediaan perumahan. 6) Peningkatan keterampilan masyarakat dan pengembangan kewirausahaan bagi kaum perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.

5.1.2. Transformasi Ekonomi

Pembangunan ekonomi Kabupaten Pohuwato selama 20 tahun ke depan akan menghadapi perubahan besar yang menuntut dilakukannya transformasi ekonomi. Beberapa perubahan tersebut, diantaranya perubahan struktur penduduk, kemajuan Iptek, perubahan iklim, pergeseran geopolitik, desprupsi termasuk ketidakpastian ekonomi global. Transformasi ekonomi menjadi kunci pendorong terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, menciptakan nilai tambah dan dampak ekonomi yang luas lewat peningkatan kontribusi sektor industri manufaktur. Transformasi ekonomi sekaligus mempercepat perubahan struktur ekonomi dengan menggeser struktur tenaga kerja se sektor produktif yang membawa dampak besar terhadap peningkatan pendapatan, sehingga dapat mewujudkan secara umum Indonesia keluar dari *middle income trap.* Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi inklusif dan berkelanjutan maka transformasi ekonomi difokuskan pada peningkatan produktivitas dan inovasi pada sektor potensi (unggulan) daerah. Transformasi ekonomi akan dilakukan melalui beberapa kebijakan, sebagai berikut:

1) Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

Kebijakan pembangunan Iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi bertujuan untuk terus mempercepat produktivitas sektor-sektor ekonomi dengan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi. Kebijakan ini dilakukan melalui; 1) Optimalisasi pemanfaatan Iptek secara masif diberbagai sektor dan kegiatan ekonomi, 2) Peningkatan produktivitas tenaga kerja untuk seluruh lapangan usaha melalui peningkatan kapasitas (kursus), pelatihan dan sekolah lapang. 2) Peningkatan nilai tambah sektor unggulan, daya saing sektor pertanian, perikanan dan peternakan secara umum yang berkelanjutan dengan menerapkan teknologi. 3) Pengembangan industri pengolahan dan hilirisasi SDA *linkage* dengan kegiatan UMKM dan koperasi. 4) Peningkatan sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru dan penyerapan tenaga kerja *(labor intensive).* 5) Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah sebagai sumber ekonomi masa depan.

2). Penerapan Ekonomi Hijau

Kebijakan penerapan ekonomi hijau bertujuan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dengan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi tinggi sejalan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Kebijakan ini difokuskan pada; 1) Pemenuhan kebutuhan listrik dengan pembangkit rendah karbon, serta pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan sebagai sumber listrik. 2) Pengembangan transportasi umum yang ramah lingkungan. 3) Pengelolaan lahan pertanian, perikanan dan kehutanan serta produk-produk turunannya secara berkelanjutan. 4) Penerapan ekonomi sirkular, 5) Mendorong perwujudan investasi hijau di berbagai sektor. 6) Mendorong inovasi dan membangun kemitraan antar pihak dalam pelaksanaan ekonomi hijau.

3). Transformasi Digital

Kebijakan pembangunan transformasi digital ditujukan untuk mendukung transformasi ekonomi, kebijakan ini difokuskan pada; 1) Perluasan dan pemerataan pembangunan infrastruktur jaringan *broadband* ke seluruh wilayah hingga kenpelosok Kabupaten Pohuwato. 2) Peningkatan pemanfaatan ICT untuk mengembangkan sektor unggulan dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka menunjang produktivitas ekonomi. 3) Percepatan penyediaan SDM dan talenta digital untuk penguasaan ICT dalam mendukung produktivitas ekonomi.

4). Integrasi Ekonomi Domestik, Regional dan Global

Kebijakan pembangunan integrasi ekonomi domestik, regional dan global ditujukan untuk mendorong peningkatan produktivitas perekonomian daerah. Kebijakan ini dofokuskan pada; 1) Penguatan konektivitas antar kawasan pertumbuhan ekonomi di regional Gorontalo dan nasional. 2) Penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi baru dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan mengembangkan Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). 3) Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur untuk memperkuat konektivitas antar kawasan dengan moda transportasi terintegrasi. 4) Peningkatan nilai tambah komoditi unggulan daerah untuk meningkatkan pangsa ekspor komoditi di pasar global. 5) Peningkatan produktivitas BUMD, UMKM dan Koperasi dan penguatan kemitraan dengan dunia industri. 6) Penguatan ekonomi dan keuangan syariah serta perluasan infrastruktur ekonomi dan keuangan syariah.

5) **Perkotaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi**

Penguatan pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di daerah, kebijakan ini dilakukan fokus pada; 1) Peningkatan pembangunan kota yang inklusif (ramah terhadap semua kalangan). 2) Pengembangan kawasan pemukiman yang sehat, layak huni, ketersediaan air bersih yang cukup, tersedia moda transportasi massa penghubung kawasan,. 3) Pengelolaan sampah dan limbah bernilai ekonomi. 4) Mendorong perwujudan kota hijau melalui peningkatan efisiensi dan pemanfaatan energi baru terbarukan, penerapan prinsip rendah karbon di pemukiman, perkantoran, bisnis dan komersial.

5.1.3. Tranformasi Tata Kelola Pemerintahan

Transformasi tata kelola pemerintahan merupakan pilar penting untuk menjalankan transformasi sosial dan ekonomi, sebab tata kelola yang baik memungkinkan aparatur bekerja lebih akuntabel, memberikan layanan yang berkualitas dan cekatan. Kebijakan transformasi tata kelola melalui; 1) Harmonisasi regulasi antar level pemerintah untuk menghilangkan tumpang tindih peraturan. 2) Mengoptimalkan partisipasi publik dalam desain kebijakan, implementasi dan pengawasan pembangunan. 3) Peningkatan efektifitas layanan publik, kelembagaan yang efisien dan responsif terhadap aduan layanan publik. 4) Pengembangan digitalisasi layanan publik secara merata di seluruh wilayah dan level pemerintah di Kabupaten Pohuwato. 5) Penguatan manajemen talenta ASN, pengembangan karir dan promosi ASN dengan sistem meritokrasi. 6) Penguatan audit internal dan pencegahan penyalahgunaan wewenang (korupsi) dalam pengelolaan anggaran dan pengadaan barang/jasa. 7) Penguatan integritas partai politik dan lembaga politik.

5.1.4. Keamanan dan Ketertiban, Praktek Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro yang Kuat

Untuk mewujudkan keberhasilan transformasi pembangunan Kabupaten Pohuwato dalam mendukung pencapaian Indonesia Emas di tahun 2045, maka perlu didukung oleh penciptaan supremsi hukum, stabilitas keamanan dan ketertiban dan stabilitas ekonomi makro. Arah kebijakannya melalui;

1). Penegakan Hukum yang Berkeadilan, Keamanan dan Ketertiban

Penegakan hukum yang berkeadilan menjadi kunci suksesnya transformasi sosial, setiap pelanggaran atau *abuse* yang terjadi *law enforcement* harus dijalankan tanpa memandang siapa yang melanggar. Selain itu ancaman keamanan datang setiap saat dengan beragam kepentingan ekonomi, politik dan idiologi (faham), serta perlunya menjaga ketertiban sebab penyakit sosial masih banyak terjadi, kriminalitas, pelanggaran norma dan susila, pelanggaran peraturan yang berpotensi menggangu daya saing daerah menarik investasi. Kebijakan pembangunan hukum yang adil, keamanan dan ketertiban, difokuskan pada; 1) Penguatan kerja sama antar daerah perbatasan, para *stakeholders* (terutama tokoh masyarakat dan agama) untuk pencegahan transidiologi kekerasan. 2) Mengoptimalkan keamanan dan ketertiban untuk mencegah kriminalitas dan pelanggaran peraturan daerah. 3) Peningkatan kualitas produk Perda dan peraturan yang dapat menunjang transformasi Kabupaten Pohuwato.

2) Memantapkan Praktek Demokrasi Substansial

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan kedaulatan rakyat, dimana setiap orang dapat mengambil bagian perihal keputusan yang akan mempengaruhi kehidupannya dalam bernegara. Dengan demikian, demokrasi dipraktekkan agar kebutuhan masyarakat umum dapat terpenuhi, artinya pengambilan kebijakan negara demokrasi tergantung pada keinginan dan aspirasi rakyat secara umum. Kebijakan pembangunan demokrasi substansial difokuskan pada; 1) Menciptakan partai politik modern dengan menjalankan fungsinya secara optimal. 2) Peningkatan kapasitas kader partai politik dan pendidikan politik bagi masyarakat 2) Penguatan integritas partai politik. 4) Penguatan sistem demokrasi melalui perbaikan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.

3) Stabilitas Ekonomi Makro yang Kuat

Stabilitas politik dan ekonomi makro diarahkan untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan dan daya saing daerah untuk mendukung kebijakan pro-pertumbuhan dan pro-kemiskinan, kebijakannya difokuskan pada; 1) Menjaga stabilitas harga untuk memperkuat daya beli masyarakat, mengendalikan inflasi dan memperkuat kepercayaan investor. 2) Menjaga keberlanjutan fiskal daerah yang adaptif untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan dengan

mengoptimalkan potensi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. 3) Mengoptimalkan potensi pembiayaan pembangunan dengan skema kerjasama, dana sosial perusahaan dan pajak karbon. 4) Meningkatkan kualitas belanja daerah dan memperkuat sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dan nasional.

5.1.5. Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Ketahanan sosial *(social resilience)* dan budaya merupakan sayarat kondisi yang perlu diperkuat untuk menunjang transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola. Ancaman ketahanan sosial sumbernya beragam, misalnya perlakuan secara tidak adil dalam kehiduan sosial, kesenjangan ekonomi yang lebar, tingkat kemiskinan dan pengangguran yang tinggi. Untuk mengeliminasi sumber tersebut, diperlukan keseriusan menanganinya, selain aspek budaya yang melekat dalam kehidupan masyarakat selama ini dapat dioptimalkan untuk memperkuat ketahanan sosial, seperti praktek kegotong royongan *(huyula)*. Meskipun diakui bahwa pesatnya perkembangan teknologi dan kemajuan pembangunan nilai-nilai budaya mengalami pengikisan, sehingga budaya yang telah melekat erat di masyarakat perlu diperkuat. Disamping itu di tengah pesatnya pembangunan dan perkembangan Iptek, berdampak terhadap eksploitasi SDA secara besar-besaran, penggunaan lahan di kawasan tertentu makin meluas. Dampaknya terjadi degradasi lingkungan sehingga intensitas bencana alam makin sering terjadi, hal ini mempengaruhi ketahanan sosial. Arah kebijakan pada:

1) Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Kebijakan pembangunan ini di tujukan untuk memperkuat peran agama sebagai landasan spiritual, etika, moral dan modal dasar pembangunan. Kebijakan ini dilakukan melalui; 1) Peningkatan aktualisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat. 2) Pembangunan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan mengembangkan pemahaman kemajemukan. 3) Pengembangan dana sosial keagamaan dan pemberdayaan ekonomi umat berbasis rumah ibadah atau kelompok keagamaan. 4) Pengembangan dan pemanfaatan kearifan lokal serta budaya lokal untuk mendorong produktivitas masyarakat.

2) Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif

Kebijakan pembangunan ini ditujukan untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat, keluarga dan individu untuk memastikan terbentuknya sumberdaya manusia yang berkualitasi sebagai pelaku pembangunan, arah kebijakan fokus pada; 1) Penguatan ketahanan keluarga dengan penyediaan lingkungan pendukung sesuai karakteristik dan kebutuhannya. 2) Peningkatan kapasitas dan keterampilan keluarga agar memiliki produktivitas yang tinggi. 3) Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia 4) Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan. 4) Akselarasi kesetaraan gender dan mengurangi kesenjangan kelompok rentan, melalui peningkatan kepemimpinan perempuan, pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi serta pelayanan dasar yang inklusi.

3) Lingkungan Hidup Berkualitas

Arah kebijakan pembangunan lingkungan hidup berkualitas bertujuan untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk peningkatan kualitas hidup, produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakannya berfokus pada; 1) Peningkatan kualitas dan pengelolaan ekosistem laut dan pesisir. 2) Peningkatan kualitas air dan udara serta pengelolaan limbah melalui penerapan teknologi terkini dan murah. 3) Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dengan penggunaan teknologi tepat guna pada tempat penampungan sementara dan tempat pemrosesan akhir. 4) Penguatan upaya pengelolaan dan mempertahankan ekosistem alami berupa kawasan konservasi untuk menjaga keberadaan hutan alam dan bakau, serta menjaga luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa *(home range)* dan konektivitas spesies yang dilindungi. 5) Peningkatan pemanfaatan jasa ekosistem untuk kegiatan wisata dan sumber air secara berkelanjutan. 6) Desain tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, dan wilayah jelajah satwa spesies dilindungi. 7) Pengelolaan reklamasi dan kegiatan pasca kegiatan pertambangan. 8) Pembangunan infrastruktur dan kawasan permukiman tanggap bencana berbasis lingkungan.

4. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Untuk menciptakan kemandirian pangan didukung oleh katahanan energi dan air dilakukan pendekatan terpadu. Arah kebijakan difokuskan pada; 1) Pembangunan tampungan air serba guna yang memberikan manfaat secara cepat bagi kebutuhan air sehari-hari bagi masyarakat. 2) Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan, seperti *picohidro* dan *microhidro* di daerah terpencil. 3) Pengembangan sistem irigasi yang modern untuk mendorong efisiensi penggunaan air dalam rangka menunjang produktivitas lahan sawah. 4) Pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi yang cukup, beragam, seimbang dan aman. 5) Pengembangan diversifikasi pangan lokal untuk mendukung kemandirian pangan.

5. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Rusaknya lingkungan, luasan hutan makin menyusut dan pembukaan lahan untuk perkebunan di area kemiringan mengakibatkan bencana banjir kerap melanda Kabupaten Pohuwato. Dampak kerusakan lingkungan selain membawa bencana banjir turut memperparah pemanasan global (perubahan iklim) dan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) meningkat. Kebijakan ini dilakukan dengan tujuan untuk mencapai penurunan emisi GRK, arah kebijakan fokus pada; 1) Pembangunan sarana dan prasarana yang memperhatikan kerawanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan gedung dan hunian rendah karbon. 2) Penerapan kebijakan mendorong perubahan perilaku masyarakat Kabupaten Pohuwato secara luas dalam aktivitas keseharian bersifat rendah karbon dan berkelanjutan. 3) Pencegahan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) terhadap penyakit yang dipengaruhi oleh iklim di sektor kesehatan. 4) Pengelolaan limbah dan penerapan ekonom sirkular.

5.1.6. Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan

Untuk mewujudkan pembangunan kewilayahan yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pembangunan yang merata di seluruh wilayah di Kabupaten Pohuwato dengan hasil pembangunan yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Selama ini nampak pembangunan terkonsentrasi pada pusat-pusat kegiatan ekonomi saja, sehingga berdampak terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan yang timpang

menjadi hambatan percepatan penurunan angka kemiskinan. Kebijakan ini fokus pada; 1) Percepatan pembangunan infrastruktur perdesaan dan penguatan aksesibilitas ke daerah terpencil. 2) Peningkatan pelaksanaan reforma agraria untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di sektor pertanian. 3) Percepatan pusat pertumbuhan ekonomi baru untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri di Provinsi Gorontalo. 4) Pengembangan pangan nasional di kawasan Teluk Tomini untuk menunjang kebutuhan pangan di IKN. 5) Pengembangan simpul transportasi untuk membangun konektivitas angkutan laut, darat dan udara dalam rangka memperlancar distribus barang (logistik), serta kemudahan aksesibilitas pendukung pengembangan sektor pariwisata. 6) Peningkatan kapasitas jalan pada koridor utama untuk mendukung integrasi rantai pasok domestik dan regional. (menghubungkan kawasan ekonomi dan pelabuhan/bandara). 7) Pengembangan transportasi penghubung antar wilayah dan perkotaan dengan moda transportasi umum yang andal serta modern dalam melayani mobilitas penumpang.

5.1.7. Pembangunan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Untuk mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan dalam rangka mendukung agenda transformasi sosial kemasyarakatan, transformasi ekonomi dan transformasi tata kelola pemerintahan, arah kebijakan fokus pada; 1) Percepatan pemenuhan sarana dan prasarana dasar yang inklusif dan menunjang pertumbuhan ekonomi. 2) Pengembangan tata ruang dengan keterpaduan pengelolaan SDA dan sumber daya buatan dalam pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan. 3) Percepatan pemenuhan sarana dan prasarana dasar di wilayah perdesaan dan terpencil, serta peningkatan konektivitas antar wilayah (kota dan desa). 4) Optimalisasi pemanfaatan lahan di wilayah perkotaan untuk penyediaan hunian yang terintegrasi dengan layanan dasar dan sistem transportasi publik yang ramah lingkungan. 5) Percepatan penataan pemukiman kumuh perkotaan dan wilayah pesisir yang ditunjang oleh air bersih dan sanitasi yang aman. 6) Fasilitasi penyediaan rumah layak huni dan terjangkau berdasarkan karakteristik wilayah

dengan menggunakan penerangan EBT. 7) Penyediaan air bersih dan siap minum melalui jaringan perpipaan secara merata di wilayah permukiman, serta pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik wilayah. 8) Peningkatan kesadaran hidup sehat masyarakat dengan mendorong pembangunan sanitasi sehat dan aman bagi rumah tangga. 9) Peningkatan kualitas akses layanan internet di seluruh wilayah Kabupaten Pohuwato untuk menunjang kegiatan ekonomi berbasis digital.

5.1.8. Kesinambungan Pembangunan

Kebijakan kesinambungan pembangunan diarahkan melalui; 1) Memperkuat sinkronisasi dokumen perencanaan sektoral serta antar tingkat pemerintah daerah. 2) Mengoptimalkan pengendalian dan evaluasi pembangunan melalui penerapan manajemen risiko, penguatan tata kelola data pembangunan yang integratif dan berbasis elektronik. 5) Pengembangan pembiayaan pembangunan lewat skema KPBU dan pendanaan campuran dari non APBN/APBD.

5.2. Sasaran Pokok

Dalam rangka mencapai Transformasi Kabupaten Pohuwato 2045 untuk menunjang pencapaian Indonesia Emas 2045, maka ada 8 (delapan) agenda (misi) pembangunan yang harus dijalankan, pelaksanaannya melalui 17 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah, diwujudkan kedalam sasaran pokok dan indikator pembangunan daerah. Dimana sasaran pembangunan daerah terdiri dari 45 indikator utama pembangunan dngan menyesuiakan kondisi dan kekhasan daerah.

Tabel 5.2
Kebijakan dan Sasaran Pokok Pembangunan RPJPD

MISI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN		SASARAN POKOK DAN INDIKATOR SASARAN PEMBANGUNAN		BASELINE 2025	TARGET 2045
MISI 1 TRANSFORMASI SOSIAL					
IE1	**Kesehatan Untuk Semua**	**Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Memperkuat Sistem Layanan Kesehatan**			
	1. Peningkatan upaya kesehatan masyarakat, perluasan upaya promotif dan preventif dan menciptakan perilaku hidup sehat bagi semua kalangan masyarakat. 2. Pengendalian peredaran dan konsumsi produk yang berdampak negatif bagi kesehatan masyarakat. 3. Penanggulangan gizi buruk, penurunan prevalensi stunting dan percepatan penanganan penyakit menular. 4. Peningkatan layanan kesehatan ibu, anak dan lanjut usia. 5. Penyediaan pelayanan kesehatan yang tanggap dan berbasis IT, serta layanan kesehatan *mobile* di daerah perpencil.	1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	64.95	71.93
		2	Kesehatan Ibu dan Anak		
			a. Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	114	54
			b. Prevalensi sunting pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	6.4	0.80
		3	Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)		
			a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis *(treatment coverage)*	86,00	100
			b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis *(treatment success rate)* (%)	43,00	69.34
		4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	79,65	100

	6. Pemenuhan tenaga medis dan kesehatan yang didukung dengan sarana prasarana dan peralatan yang canggih, serta pemberian insentif yang memadai bagi tenaga medis dan kesehatan di daerah terpencil, dan 7. Pengembangan sistem telemedicine yang didukung oleh peningkatan cakupan jaminan sosial (kesehatan dan ketenagakerjaan).				
IE2	**PENDIDIKAN BERKUALITAS**	**Mewujudkan SDM Unggul dan Memiliki Daya Saing yang Tinggi**			
	1. Pemerataan akses pendidikan dengan percepatan wajib belajar 13 tahun dalam rangka meningkatkan rata-rata lama sekolah. 2. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran lewat peningkatan kapasitas pendidik (guru), mengintegrasikan model pembelajaran *soft skill, social skill* dan *life skill,* peningkatan kecakapan literasi, penguatan pendidikan inklusif dan penguatan pendidikan karakter. 3. Pemerataan kualitas pendidikan antarsatuan dan antarwilayah untuk menghasilkan kualitas lulusan yang sama dengan distribusi guru yang merata. 4. Akselarasi peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan pengembangan program afirmasi untuk mengakses pendidikan tinggi pada wilayah terpencil. 5. Peningkatan kualitas dan keterampilan SDM berdasarkan potensi daerah serta	5	Hasil Pembelajaran		
			a. Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: • Literasi membaca • Numerasi		
			b. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	68,54	100
			c. Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	7,59	10.42
			d. Harapan lama sekolah	12,46	12.84
		6	Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi (%)	11,44	13.19
		7	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	19,55	68.17

	kebutuhan pasar kerja.				
IE3	**PERLINDUNGAN SOSIAL YANG ADAPTIF**	**Mewujudkan Percepatan Penuntasan Kemiskinan dan Meningkatkan Cakupan Perlindungan Sosial Secara Berkeadilan dan Inklusif**			
	1. Pengentasan kemiskinan terutama fokus di wilayah perdesaan dan perlindungan sosial yang adaptif dan integrative. 2. Peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja bukan penerima upah, dan perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas. 3. Perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan, pengembangan perlindungan sosial daerah yang adaptif bagi seluruh masyarakat secara integratif dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat, penanggulangan bencana dan dampak perubahan iklim. 4. Menciptakan ekosistem inklusif, termasuk perlindungan sosial, pemenuhan hak dasar masyarakat tanpa kecuali, kegiatan ekonomi produktif dan pembangunan infrastruktur dasar untuk menunjang ketahanan ekonomi keluarga. 5. Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah, serta kolaborasi antar *stakeholders* dalam penyediaan perumahan.	8	Tingkat kemiskinan (%)	17,64	3-8
		9	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kabupaten (%)		
		10	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)		

	6. Peningkatan keterampilan masyarakat dan pengembangan kewirausahaan bagi kaum perempuan, penyandan disabilitas dan kelompok rentan lainnya.				
MISI 2 TRANSFORMASI EKONOMI					
IE4	**IPTEK, INOVASI DAN PRODUKTIVITAS EKONOMI**	**Mengakselarasi Produktivitas Lapangan Usaha (Sektor Ekonomi)**			
	1. Optimalisasi pemanfaatan Iptek secara masif diberbagai sektor dan kegiatan ekonomi. 2. Peningkatan produktivitas tenaga kerja untuk seluruh lapangan usaha melalui peningkatan kapasitas (kursus), pelatihan dan sekolah lapang. 3. Peningkatan nilai tambah sektor unggulan, daya saing sektor pertanian, perikanan dan peternakan secara umum yang berkelanjutan dengan menerapkan teknologi. 4. Pengembangan industri pengolahan dan hilirisasi SDA *linkage* dengan kegiatan UMKM dan koperasi. 5. Peningkatan sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru dan penyerapan tenaga kerja *(labor intensive).* 6. Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah sebagai sumber ekonomi masa depan.	11	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	5	15-20
		12	Pengembangan Pariwisata :		
			a) Rasio PDRB Penyedia Akomodasi Makan dan Minum (%)	1,13	1.32
			b) Jumlah tamu wisatawan mancanegara (orang)	39	261
		13	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)		
		14	Produktivitas UMKM, Koperasi dan BUMD		
			a) Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)		
			b) Jumlah koperasi aktif	110	132
			c) Jumlah usaha mikro, kecil dan menengah pada level kabupaten	3.828	3.912
			d) Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada kabupaten (%)		
			e) Rasio kewirausahaan kabupaten		
			f) Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)		
			g) Return on Aset (RoA) BUMD (%)		
		15	Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Pohuwato (%)	3,46	1.75
		16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja perempuan (%)	36,40	50.19
		17	Tingkat penguasaan Iptek		
			a) Indeks Daya Saing Digital		
			b) Indeks Inovasi Daerah	48.59	65.18
IE5	**PENERAPAN EKONOMI HIJAU**	**Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Tinggi dan Berkelanjutan**			
	1. Pemenuhan kebutuhan listrik dengan	18	Tingkat penerapan ekonomi hijau		

	pembangkit rendah karbon, serta pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan sebagai sumber listrik. 2. Pengembangan transportasi umum yang ramah lingkungan. 3. Pengelolaan lahan pertanian, perikanan dan kehutanan serta produk-produk turunannya secara berkelanjutan. 4. Penerapan ekonomi sirkular, 5) Implementasi Mendorong perwujudan investasi hijau di berbagai sektor. 5. Mendorong inovasi dan membangun kemitraan antar pihak dalam pelaksanaan ekonomi hijau.		a) Indeks Ekonomi Hijau		
			b) Porsi EBT dalam bauran energi primer		
IE6	**TRANSFORMASI DIGITAL**	**Meuwujudkan Transformasi Digital Untuk Mendukung Transformasi Ekonom**			
	1. Perluasan dan pemerataan pembangunan infrastruktur jaringan *broadband* ke seluruh wilayah hingga kepelosok Kabupaten Pohuwato. 2. Peningkatan pemanfaatan ICT untuk mengembangkan sektor unggulan dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka menunjang produktivitas ekonomi. 3. Percepatan penyediaan SDM dan talenta digital untuk penguasaan ICT dalam mendukung produktivitas ekonomi.	19	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi		
IE7	**INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK, REGIONAL DAN GLOBAL**	**Mewujudkan Peningkatan Produktivitas Perekonomian Daerah dan Memperkuat Integrasi Ekonomi Daerah, Nasional dan Global**			
	1. Penguatan konektivitas antar kawasan pertumbuhan ekonomi di regional Gorontalo dan nasional.	20	Kontribusi keuangan syariah (%)		
		21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	20,05	25,93
		22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	7,3	23,58

	2. Penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi baru dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan mengembangkan Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). 3. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur untuk memperkuat konektivitas antar kawasan dengan moda transportasi terintegrasi. 4. Peningkatan nilai tambah komoditi unggulan daerah untuk meningkatkan pangsa ekspor komoditi di pasar global. 5. Peningkatan produktivitas BUMD, UMKM dan Koperasi dan penguatan kemitraan dengan dunia industri. 6. Penguatan ekonomi dan keuangan syariah serta perluasan infrastruktur ekonomi dan keuangan syariah.				
IE8	**PERKOTAAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI**	**Mewujudkan Wilayah Perkotaan Sebagai Pusat Pertumbuhan**			
	1. Peningkatan pembangunan kota yang inklusif (ramah terhadap semua kalangan), modern dan berkelanjutan. 2. Pengembangan kawasan pemukiman yang sehat, layak huni, ketersediaan air bersih yang cukup, tersedia moda transportasi massa penghubung kawasan, pengelolaan sampah dan limbah bernilai ekonomi. 3. Mendorong perwujudan kota hijau melalui peningkatan efisiensi dan pemanfaatan energi baru terbarukan, penerapan prinsip rendah karbon di	23	Kota Maju Inklusif dan Berkelanjutan		
			a) Proporsi kontribusi PDRB Kabupaten Pohuwato terhadap Provinsi Gorontalo %)	16.35	16.95
			b) Rumah tangga dengan akses hunian layak terjangkau dan berkelanjutan (%)	92.97	100
			c) Persentase Desa Mandiri (%)	3,96	46,05

	pemukiman, perkantoran, bisnis dan komersial. 4. Penguatan pembangunan wilayah perdesaan dan pesisir, serta pengembangan komoditi unggulan sebagai penunjang kegiatan ekonomi perkotaan.				
MISI 3 TRANSFORMASI TATA KELOLA					
IE 9	**Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif**	**Mewujudkan Lingkungan Kelembagaan, Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif**			
	1. Harmonisasi regulasi antar level pemerintah untuk menghilangkan yariah tindih peraturan. 2. Mengoptimalkan partisipasi yaria dalam desain kebijakan, implementasi dan pengawasan pembangunan. 3. Peningkatan efektifitas layanan yaria, kelembagaan yang efisien dan yariah terhadap aduan layanan yaria. 4. Pengembangan digitalisasi layanan yaria secara merata di seluruh wilayah dan level pemerintah di Kabupaten Pohuwato. 5. Penguatan manajemen talenta ASN, pengembangan karir dan promosi ASN dengan sistem meritokrasi. 6. Penguatan audit internal dan pencegahan penyalahgunaan wewenang (korupsi) dalam pengelolaan anggaran dan pengadaan barang/jasa. 7. Penguatan integritas partai politik dan lembaga politik.	24	Indeks Reformasi Hukum		
		25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		
		26	Indeks Pelayanan Publik		
		27	Indeks Integritas Nasional		

MISI 4 MEMANTAPKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN, PRAKTEK DEMOKRASI SUBSTANSIAL DAN STABILITAS EKONOMI MAKRO YANG KUAT					
IE 10	**PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN, KEAMANAN DAN KETERTIBAN**	**Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban yang Mantap, Praktek Demokrasi Substansial dan Stabilitas Makro yang Kuat**			
	1. Penguatan kerja sama antar daerah perbatasan, para *stakeholders* (terutama tokoh masyarakat dan agama) untuk pencegahan transidiologi kekerasan. 2. Mengoptimalkan keamanan dan ketertiban untuk mencegah kriminalitas dan pelanggaran peraturan daerah. 3. Peningkatan kualitas produk Perda dan peraturan yang dapat menunjang transformasi Kabupaten Pohuwato.	28	Indeks ketentraman dan ketertiban		
		29	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)		
IE 11	**MEMANTAPKAN PRAKTEK DEMOKRASI SUBSTANSIAL**	**Mewujudkan Praktek Demokrasi yang Berkualitas**			
	1. Menciptakan partai politik modern dengan menjalankan fungsinya secara optimal. 2. Peningkatan kapasitas kader partai politik dan pendidikan politik bagi masyarakat 3. Penguatan integritas partai politik. 4. Penguatan sistem demokrasi melalui perbaikan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.	30	Indeks Demokrasi Indonesia		
IE 12	**STABILITAS EKONOMI MAKRO YANG KUAT**	**Mewujudkan Kesinambungan Fiskal dan Meningkat Kemandirian Keuangan Daerah**			
	1. Menjaga stabilitas harga untuk	31	Rasio Penerimaan Daerah terhadap PDRB (%)		

	memperkuat daya beli masyarakat, mengendalikan inflasi dan memperkuat kepercayaan investor. 2. Menjaga keberlanjutan yaria daerah yang adaptif untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan dengan mengoptimalkan potensi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. 3. Mengoptimalkan potensi pembiayaan pembangunan dengan skema yariah , dana sosial perusahaan dan pajak karbon. 4. Meningkatkan kualitas belanja daerah dan memperkuat sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dan nasional.		a) Pajak Daerah terhadap PAD (%)	22,86	48,95
			b) Retribusi Daerah terhadap PAD (%)	9,40	15,04
			c) PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	9,40	23,28
		32	Inflasi daerah (%)		
		33	Pendalaman/lntermediasi Sektor Keuangan		
			a) Total dana pihak ketiga/PDRB (%)		
			b) Aset dana yariah/PDRB (%)		
			c) Nilai transaksi saham per kabupaten berupa nilai rata-rata tahunan		
			d) Total kredit/PDRB		
		34	Inklusi keuangan (%)		
		35	Jumlah yariah antar daerah, *internasional fund*, swasta		
		36	Nilai Investasi		
			a) Penanaman Modal Asing (PMA)		
			b) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)		
MISI 5 KETAHANAN SOSIAL YANG TANGGUH, MEMPERKUAT NILAI-NALAI BUDAYA DAN EKOLOGI LESTARI					
IE 13	**BERAGAMA MASLAHAT DAN BERKEBUDAYAAN MAJU**	**Mewujudkan Penguatan Peran Agama dan Kearifan Lokal Sebagai Landasan Moral dan Modal Pembangunan Daerah**			
	1. Peningkatan aktualisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat. 2. Pembangunan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan mengembangkan pemahaman kemajemukan. 3. Pengembangan dana sosial keagamaan dan pemberdayaan ekonomi umat berbasis rumah ibadah atau kelompok keagamaan. 4. Pengembangan dan pemanfaatan kearifan lokal serta budaya lokal untuk mendorong produktivitas masyarakat.	37	Indes Pembangunan Kebudayaan		
		38	Indeks Kerukuran Umat Beragama (IKUB)		
IE 14	**KELUARGA BERKUALITAS,**	**Meningkatkan Ketangguhan Masyarakat, Keluarga dan Individu**			

	KESETARAAN GENDER, DAN MASYARAKAT INKLUSIF				
	1. Penguatan ketahanan keluarga dengan penyediaan lingkungan pendukung sesuai karakteristik dan kebutuhannya. 2. Peningkatan kapasitas dan keterampilan keluarga agar memiliki produktivitas yang tinggi. 3. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia. 4. Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan. 5. Akselarasi kesetaraan gender dan mengurangi kesenjangan kelompok rentan, melalui peningkatan kepemimpinan perempuan, pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi serta pelayanan dasar yang inklusi.	39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga		
		40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,452	0.076
IE 15	**LINGKUNGAN HIDUP BERKUALITAS**	**Mewujudkan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Untuk Peningkatan Kualitas Hidup, Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan**			
	1. Peningkatan kualitas dan pengelolaan ekosistem laut dan pesisir. 2. Peningkatan kualitas air dan udara serta pengelolaan limbah melalui penerapan teknologi terkini dan murah. 3. Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dengan penggunaan teknologi	41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah		
		42	Kualitas Lingkungan Hidup		
			a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	80.07	96.55
			b) Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	73.41	100
			c) Pengelolaan Sampah • Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan		

	tepat guna pada tempat penampungan sementara dan tempat pemrosesan akhir. 4. Penguatan upaya pengelolaan dan mempertahankan ekosistem alami berupa kawasan konservasi untuk menjaga keberadaan hutan alam dan bakau, serta menjaga luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa *(home range)* dan konektivitas spesies yang dilindungi di antaranya anoa dan babi rusa. 5. Peningkatan pemanfaatan jasa ekosistem untuk kegiatan wisata dan sumber air secara berkelanjutan. 6. Desain tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya yariah lingkungan hidup, luasan hutan, dan wilayah jelajah satwa spesies dilindungi. 7. Pengelolaan reklamasi dan kegiatan pasca kegiatan pertambangan. 8. Pembangunan infrastruktur dan kawasan permukiman tanggap bencana berbasis lingkungan.		sampah (%) • Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah (% RT)		
IE 16	**BERKETAHANAN ENERGI, AIR DAN KEMANDIRIAN PANGAN**	**Mewujudkan Kemandirian Pangan Didukung oleh Katahanan Energi dan Air Dengan Pendekatan Terpadu**			
	1. Pembangunan tampungan air serba guna yang memberikan manfaat secara cepat bagi kebutuhan air sehari hari bagi masyarakat. 2. Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan, seperti picohidro dan microhidro di daerah terpencil.	43	Ketahanan Energi, Air, dan Pangan		
			a) Ketahanan energi		
			b) Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan *(Prevalence of Undernourishment)* (%)		
			c) Ketahanan Air • Kapasitas air baku (m3/detik)		

	3. Pengembangan sistem irigasi yang modern untuk medorong efisiensi penggunaan air dalam rangka menunjang produktivitas lahan sawah. 4. Pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi yang cukup, beragam, seimbang dan aman. 5. Pengembangan diversifikasi pangan lokal untuk mendukung kemandirian pangan.		• Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)		
IE 17	**RESILIENSI TERHADAP BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM**	**Mewujudkan Resilensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim**			
	1. Pembangunan sarana dan prasarana yang memperhatikan kerawanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan yaria dan hunian rendah karbon. 2. Penerapan kebijakan mendorong perubahan perilaku masyarakat Kabupaten Pohuwato secara luas dalam dalam aktivitas keseharian bersifat rendah karbon dan berkelanjutan. 3. Pencegahan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) terhadap penyakit yang dipengaruhi oleh iklim di sektor kesehatan. 4. Pengelolaan limbah dan penerapan ekonomi sirkular.	44	Indeks Resiko Bencana (IRB)	161.60	80.60
		45	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)		

Tabel 5.3
Sasaran Pokok, Indikator Pembangunan dan Target Pembangunan per periodisasi Pembangunan

NO	MISI	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	SASARAN POKOK		INDIKATOR SASARAN	TARGET			
						I	II	III	IV
1.	**TRANSFORMASI SOSIAL**	Kesehatan untuk Semua	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dan Memperkuat Sistem Layanan Kesehatan	1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	67.18	68.76	70.35	71.93
				2	Kesehatan Ibu dan Anak				
					a. Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	114	94	74	54
					b. Prevalensi Stunting pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	6.4	5,52	3.92	0.80
				3	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)				
					a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis *(treatment coverage)* (%)	86,00	93,00	100	100
					b. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	51.90	57.71	63.52	69.34
				4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	79,65	100	100	100
		Pendidikan Berkualitas	Mewujudkan SDM Unggul dan Memiliki Daya Saing yang Tinggi	5	Hasil Pembelajaran				
					a. Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: • Literasi membaca • Numerasi				
					b. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:	68,54	100	100	100

					• Literasi membaca • Numerasi				
					c. Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	8.45	9.11	9.76	10.42
					d. Harapan lama sekolah	12,56	12.65	12.74	12.84
				6	Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi	12.30	12.62	12.94	13.19
				7	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	25,27	39.57	53.87	68.17
		Perlindungan Sosial yang Adaptif	Mewujudkan Percepatan Penuntasan Kemiskinan dan Meningkatkan Cakupan Perlindungan Sosial Bagi Seluruh Penduduk Kabupaten Pohuwato Secara Berkeadilan dan Inklusif	8	Tingkat kemiskinan (%)	17,64	14.31	11.68	8.00
				9	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kabupaten (%)				
				10	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)				
2	**TRANSFORMASI EKONOMI**	Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi	Mengakselarasi Produktivitas Lapangan Usaha (Sektor Ekonomi) Unggulan	11	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	5	6.28	7.45	15.00
				12	Pengembangan Pariwisata :				
					a. Rasio PDRB Penyedia Akomodasi Makan dan Minum (%)	1,23	1.26	1.29	1.32
					b. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)	39	107	195	261
				13	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)				
				14	Produktivitas UMKM, Koperasi dan BUMD				
					a) Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)				
					b) Jumlah koperasi aktif	115	120	125	132
					c) Jumlah usaha mikro, kecil dan menengah pada level kabupaten	3.828	3.856	3.884	3.912

					d) Proporsi jumlah yariah kecil dan menengah pada kabupaten (%)				
					e) Rasio Kewirausahaan kabupaten				
					f) Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)				
					g) Return on Aset (RoA) BUMD (%)				
				15	Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Pohuwato (%)	3,46	1.95	1.85	1.75
				16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	36,40	48.29	49.24	50.19
				17	Tingkat Penguasaan IPTEK				
					a. Indeks Daya Saing Digital				
					b. Indeks Inovasi Daerah	50.44	55.35	60.27	65.18
		Penerapan Ekonomi Hijau	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Tinggi Sejalan Dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Untuk Menjamin Keberlanjutan	18	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau				
					a. Indeks ekonomi hijau				
					b. Porsi EBT dalam bauran energi primer				
		Transformasi Digital	Mewujudkan Transformasi Digital Untuk Mendukung Transformasi Ekonomi	19	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi				
		Integrasi Ekonomi Domestik, Regional dan Global	Mewujudkan Peningkatan Produktivitas Perekonomian Daerah dan Memperkuat Integrasi Ekonomi Daerah, Nasional dan Global	20	Kontribusi keuangan yariah (%)				
				21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	20,05	23,88	24,90	25,93
				22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	7,3	11,87	17,72	23,58
		Perkotaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi dan Wilayah Perdesaan Menunjang Kegiatan Produksi Ekonomi Perkotaan.	Mewujudkan Wilayah Perkotaan Sebagai Pusat Pertumbuhan	23	Kota Maju Inklusif dan Berkelanjutan				
					a. Proporsi kontribusi PDRB Kabupaten Pohuwato terhadap Provinsi Gorontalo (%)	16.50	16.65	16.80	16.95
					b. Rumah tangga dengan akses hunian layak terjangkau dan berkelanjutan (%)	92.97	100	100	100

					c. Persentase Desa Mandiri (%)	18,60	27,75	36,90	46,05
3	**TRANSFORMASI TATA KELOLA**	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Mewujudkan Lingkungan Kelembagaan, Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	24	Indeks Reformasi Hukum				
				25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik				
				26	Indeks Pelayanan Publik				
				27	Indeks Integritas Nasional				
4	**MEMANTAPKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN, PRAKTEK DEMOKRASI SUBSTANSIAL DAN STABILITAS EKONOMI MAKRO YANG KUAT**	Penegakan Hukum yang Berkeadilan, Keamanan dan Ketertiban	Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban yang Mantap, Praktek Demokrasi Substansial dan Stabilitas Makro yang Kuat	28	Indeks ketentraman dan ketertiban				
				29	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)				
		Memantapkan Praktek Demokrasi Substansial	Mewujudkan Praktek Demokrasi yang Berkualitas	30	Indeks Demokrasi Indonesia				
		Stabilitas Ekonomi Makro yang Kuat	Mewujudkan Kesinambungan Fiskal dan Meningkat Kemandirian Keuangan Daerah	31	Rasio Penerimaan Daerah terhadap PDRB (%)				
					a) Pajak Daerah terhadap PAD	30,01	36,32	42,64	48,95
					b) Retribusi Daerah terhadap PAD	11,97	12,99	14,02	15,04
					c) PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	13,33	16,64	19,96	23,28
				32	Inflasi daerah (%)				
				33	Pendalaman/lntermediasi Sektor Keuangan				
					a) Total dana pihak ketiga/PDRB (%)				
					b) Aset dana pensiun/PDRB (%)				
					c) Nilai transaksi saham per kabupaten berupa nilai rata-rata tahunan				
					d) Total kredit/PDRB				
				34	Inklusi keuangan (%)				
				35	Jumlah kerjasama antar daerah, *internasional fund*, swasta				
				36	Nilai Investasi				
					a) Penanaman Modal Asing (PMA)				
					b) Penanaman Modal Dalam				

					Negeri (PMDN)				
5	**KETAHANAN SOSIAL YANG TANGGUH, MEMPERKUAT NILAI-NALAI BUDAYA DAN EKOLOGI LESTARI**	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Mewujudkan Penguatan Peran Agama dan Kearifan Lokal Sebagai Landasan Moral dan Modal Pembangunan Daerah	37	Indes Pembangunan Kebudayaan				
				38	Indeks Kerukuran Umat Beragama (IKUB)				
		Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Meningkatkan Ketangguhan Masyarakat, Keluarga dan Individu	39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga				
		Lingkungan Hidup Berkualitas		40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0.342	0.253	0.165	0.076
		Lingkungan Hidup Berkualitas	Mewujudkan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Untuk Peningkatan Kualitas Hidup, Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan	41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah				
				42	Kualitas Lingkungan Hidup				
					a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	84.19	88.31	92.43	96.55
					b) Rumah tangga dengan akses sanitansi aman	80.05	86.69	93.33	100
					c) Pengelolaan Sampah • Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%) • Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah (% RT)				
		Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan	Mewujudkan Kemandirian Pangan Didukung oleh Katahanan Energi dan Air Dengan Pendekatan Terpadu	43	Ketahanan Energi, Air, dan Pangan				
					a) Ketahanan energi				
					b) Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan *(Prevalence of Undernourishment)* (%)				
					c) Ketahanan Air • Kapasitas air baku (m3/detik) • Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)				

		Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Resilensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	44	Indeks Resiko Bencana (IRB)	140.6	120.6	100.6	80.60
				45	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)				

BAB VI
PENUTUP

6.1. Implementasi Pelaksanaan

a. Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan

Agar perencanaan berkualitas, diperlukan konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan serta dukungan pendanaan yang pasti dan berkesinambungan. Dimana perencanaan yang baik (berkualitas) merupakan katalis bagi pelaksanaan pembangunan untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam hal ini meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dokumen perencanaan merupakan pedoman (kompas) bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah, karena itu perencanaan harus didesain sebaik mungkin. Sejalan dengan itu dalam implementasinya, didukung dengan anggaran yang memadai disertai dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang tepat dan cermat. Karena bagaimanapun pemerintah daerah memiliki keterbatasan waktu maupun anggaran, maka diperlukan prioritas agenda-agenda yang memberikan efek luas. Agar sasaran pembangunan tercapai sesuai target dan agenda berdasarkan preferensi dan kebutuhan daerah (rakyat), maka mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara kolaboratif dan melibatkan seluruh komponen masyarakat.

b. Keterkaitan RPJPD Kabupaten Pohuwato dan Dokumen Perencanaan Turunannya

RPJPD Kabupaten Pohuwato 2025 - 2045 merupakan dokumen induk perencanaan pembangunan daerah dengan berpedoman pada RPJPD Provinsi serta memperhatikan dokumen sektoral lainnya. Oleh karenanya RPJPD menjadi pedoman bagi dokumen perencanaan turunannya, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dimana dokumen itu dipedomani untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Konsistensi antara RPJPD dengan dokumen perencanaan turunannya adalah sebagai berikut :

1. RPJPD Kabupaten Pohuwato secara periodisasi dan substansi sinkron dengan RPJPD Provinsi dan RPJMD Provinsi. Dimana delapan misi (agenda) pembangunan yang ditunjang dengan proses transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola di dalam RPJPD Kabupaten Pohuwato menjadi bagian dari muatan RPJPD Provinsi Gorontalo.
2. RPJPD Kabupaten Pohuwato memberikan arah pembangunan jangka panjang dan memuat proses jalannya transformasi untuk mencapai Pohuwato Maju, Mandiri, Harmonis, SDA Bernilai Tambah, Berkelanjutan, SDM Handal dan Religius Maju dan menunjang pencapaian Indonesia Emas 2045 secara makro. Sementara agenda yang bersifat spesifik sesuai kondisi daerah dan periodesasi akan dimuat dalam RPJMD.
3. Arah (tujuan) Pembangunan dan Indikator dalam RPJPD Kabupaten Pohuwato menjadi pedoman dalam penentuan sasaran dan indikator prioritas Pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Pohuwato secara periodik.
4. Sasaran dan indikator prioritas pembangunan Kabupaten Pohuwato dalam RPJMD menjadi pedoman sasaran dan indikator prioritas pembangunan Kabupaten Pohuwato dalam RKPD setiap tahun.
5. Sasaran dan indikator prioritas pembangunan daerah dalam RKPD menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD). Indikator prioritas pembangunan daerah dilaksanakan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD yang nantinya akan dipergunakan dalam penilaian akuntabilitas kinerja OPD.
6. Dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan sektoral daerah seperti rencana induk/master plan/grand design, strategi daerah, peta jalan, atau sebutan lainnya terkait perencanaan pembangunan daerah.
7. Dokumen RPJPD Kabupaten Pohuwato menjadi pedoman penyusunan visi, misi, dan program bagi pasangan calon bupati dan wakil bupati, calon anggota DPRD Kabupaten Pohuwato.

c. Penerapan Prinsip Kerangka Kerja Logis dalam Perencanaan Pembangunan

Dalam rangka penyusunan RPJPD Kabupaten Pohuwato dan dokumen perencanaan turunannya menerapkan Kerangka Kerja Logis (KKL) Pembangunan.

Tujuannya agar kebijakan yang dirumuskan relevan dengan tujuan pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya. Selain itu, penyusunan dokumen dengan menerapkan KKL untuk memudahkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan. Penerapan KKL dilakukan dengan pendekatan; 1) Tematik penentuan tema prioritas dalam suatu jangka waktu perencanaan. 2) Spasial adalah penjabaran program kepala daerah dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah. 3) Holistik adalah penjabaran tematik program kepala daerah ke dalam perencanaan yang komprehensif mulai dari hulu hingga hilir, dan 4) Integratif adalah upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan program kepala daerah yang dilihat dari peran berbagai pemangku kepentingan dan upaya keterpaduan berbagai sumber pendanaan

Selain itu KKL menggambarkan keterkaitan yang runut mulai dari *input-proses-output-outcome* dan *impact*. Sasaran utama pembangunan dalam dokumen RPJPD bersifat impact-outcome, maka dari itu pada pelaksanaannya harus diterjemahkan dengan detil hingga ke level input program disertai dengan kerangka pendanaan yang berkesinambungan dan pasti. Mendetailkan sasaran dalam dokumen perencanaan turunan yang meliputi RPJMD maupun RKPD hingga Renja OPD.

Untuk ketercapaian sasaran pembangunan, KKL harus dilengkapi indikator kinerja pada setiap level dan satuan. Dimana indikator kinerja bersifat khusus, terukur, dapat dicapai, berorientasi hasil atau relevan serta tepat waktu, dengan menggunakan instrument tersebut diharapkan dapat menjamin kesinambungan indikator dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Untuk memastikan keberhasilan pembangunan daerah, seluruh indikator RPJPD harus menjadi bagian dari RPJMD, dan seluruh indikator RPJMD harus menjadi bagian dari Renstra Perangkat Daerah.

d. Pendanaan dan Penganggaran

Untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yang tercantum dalam dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD ditingkat kabupaten, maka diperlukan sinkronisasi antara perencanaan dan pendanaan. Sebagus apapun desain perencanaan dan realistis sesuai kebutuhan daerah, namun jika tidak dukung oleh anggaran yang cukup maka apa yang diharapkan dalam sasaran pembangunan

tidak akan tercapai. Oleh karena itu diperlukan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia berbagai sumber pendanaan pembangunan, baik yang bersumber dari pemerintah (APBN/APBD) maupun non pemerintah lewat pengembangan inovasi pembiayaan dengan skema kerjasama. Selain itu urgen dilakukan perbaikan kualitas belanja, dan pembiayaan fokus pada program prioritas yang dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan itu tidak kalah pentingnya pengelolaan anggaran dilakukan efisiensi dan efektivitas sasaran dalam belanja.

6.2. Kerangka Pengendalian

a. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Untuk menjamin tercapainya sasaran pembangunan di Kabupaten Pohuwato sekaligus menunjang pembangunan nasional, maka dibutuhkan pengendalian secara kontinu dengan melibatkan berbagai unsur. Proses pengendalian dijalankan dengan dukungan sistem elektronik *(online)* secara terpadu, termasuk tata kelola data pembangunan. Mekanisme pengendalian melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan mitigasi risiko yang kemungkinan akan muncul mulai dari tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Kegiatan pengendalian dengan sistem elektronik, terintegrasi di setiap tahap mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan.

Pelaksanaan pengendalian RPJPD dilakukan dalam jangka menengah dan jangka pendek, dimana hasil pengendalian dilaporkan kepada kepala daerah (bupati dan wakil bupati). Adapun ruang lingkup pengendalian pembangunan, diantaranya:

1) Pengendalian pada tahap perencanaan bertujuan memastikan terdapat konsistensi perencanaan pembangunan, menjaga kualitas desain program prioritas pembangunan daerah, dan menjamin ketersediaan anggaran. Pengendalian ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah dan jangka pendek. Pengendalian jangka menengah mencakup: (i) penjabaran perencanaan RPJPD Kabupaten Pohuwato ke dalam RPJMD, dan diturunkan ke dalam Renstra OPD, (ii) kesiapan desain program prioritas pembangunan daerah, termasuk penerapan prinsip KKL dan penetapan ukuran

keberhasilan; (iii) konsistensi perencanaan dan penganggaran; dan (iv) identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya. Sementara pengendalian jangka pendek mencakup : (i) penjabaran perencanaan RPJMD Kabupaten Pohuwato ke dalam RKPD, kemudian diturunkan ke dalam Renja OPD; (ii) kesiapan desain program prioritas pembangunan daerah, termasuk penerapan KKL dan penetapan ukuran keberhasilan; (iii) konsistensi perencanaan dan penganggaran; dan (iv) identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya.

2) Pengendalian tahap pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJPD maupun RPJMD. Mekanisme pengendalian ini dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek. Pemantauan dan evaluasi mencakup : (i) pemantauan pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah; (ii) pemantauan mitigasi risiko pembangunan; (iii) evaluasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah; dan (iv) evaluasi pencapaian sasaran kinerja utama dan program OPD yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

b. Sistem Insentif

Agar sasaran pembangunan Kabupaten Pohuwato dapat tercapai optimal, maka diperlukan partisipasi aktif dari seluruh aktor pembangunan, diantaranya pemerintah pusat dan daerah, non pemerintah di dalamnya dunia usaha, lembaga riset, perguruan tinggi, masyarakat sipil dan kelompok masyarakat lainnya. Dalam rangka mendorong partisipasi aktif seluruh aktor pembangunan, terutama dari kalangan non pemerintah perlu diberikan insentif, sistem insentif dapat berupa dukungan regulasi dan fasilitas kemudahan lainnya. Dengan demikian dapat merangsang keterlibatan para aktor secara luas dalam proses pembangunan, sehingga capaian sasaran pembangunan cepat tercapai. Insentif dikalangan pemerintah, aparat yang memiliki kinerja yang baik diintegrasikan kedalam sistem tunjangan kinerja. Pemberian insentif kinerja pelaksanaannya berdasarkan kinerja capaian indikator sasaran pembangunan. Kinerja diukur antara lain dari aspek konsistensi perencanaan, konsistensi perencanaan dan pendanaan, pencapaian

indikator kerangka ekonomi makro daerah, pencapaian indikator-indikator kinerja utama lainnya, dan pencapaian program prioritas.

6.3. Mekanisme Perubahan

Penyusunan dokumen perencanaan seringkali tidak semua masalah dapat tercover dengan baik pada saat itu, misalnya terjadi turbulensi maupun menghadapi perubahan karena perkembangan Iptek. Maka dalam perencanaan memerlukan ruang penyesuaian, ada kondisi yang memaksa di luar kendali karena perubahan *(volatelite)* yang begitu cepat, seperti gejolak geopolitik, geoekonomi, perkembangan IT, bencana. Dampak dari semua itu pasti akan terjadi pergeseran atau bahkan penyimpangan sehingga target sasaran pembangunan dalam jangka panjang tidak tercapai. Kondisi perlu penyesuaian dan dimutakhrkan dalam implmentasi rencana jangka menengah lewat RPJMD maupun jangka pendek lewat RKPD, pemutahiran *(up date)* dilakukan lewat mekanisme evaluasi dan monitoring pembangunan. Agar efisien dan efektif pelaksanaannya ditunjang oleh sistem digitalisasi, terpadu dan terintegrasi yang meliputi semua tahapan siklus pembangunan.

6.4. Komunikasi Publik

Agenda pembangunan yang dirancang oleh pemerintah seingkali menghadapi banyak tantangan dan hambatan bukan karena keterbatasan anggaran dan kemampuan teknis, akan tetapi penolakan dari berbagai kalangan, bahkan dari masyarakat yang kemanfaatannya untuk mereka ikut menentang. Maka dalam konteks itu segala rencana pembangunan diperlukan diseminasi informasi secara utuh agar sasaran pembangunan dapat tercapai sesuai target. Dengan demikian komunikasi publik sangat penting, sekaligus untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, responsif dan komunikatif. Berjalannya prinsip pemerintahan seperti ini harapannya segala kebijakan maupun agenda pembangunan yang dijalankan, masyarakat luas dapat menerima dan bahkan terjadi mobilitas dari mereka untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan, mulai dari perencanaan, implementasi hingga pada pengawasan pembangunan.

Diseminasi tentang arah kebijakan pembangunan yang ada dalam dokumen perencanaan (RPJPD) tersampaikan secara utuh dan masyarakat dapat melihat positioning untuk ikut ambil bagian berperan. Komunikasi publik untuk diseminasi esensi RPJPD Kabupaten Pohuwato 2025-2045 melibatkan para pemangku kepentingan, diantaranya Perangkat Daerah Kabupaten Pohuwato, DPRD, aparat tingkat kecamatan, desa/kelurahan dan masyarakat luas, termasuk masyarakat Pohuwato yang ada di luar daerah. Bentuk komunikasi dilakukan melalui forum-forum perencanaan mulai dari Konsultasi Publik, Forum Perangkat Daerah, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah dan forum-forum perencanaan tematik lainnya dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan sesuai kebutuhan dan substansi forum termasuk juga melalu media cetak dan elektronik yang tersedia.

Komunikasi publik dilaksanakan dengan mengutamakan keterbukaan, menjamin akses yang luas, jelas, tepat, cepat dan objektif. Dengan demikian komunikasi public yang baik dan pesannya sampai diharapkan dapat mendorong partisipasi publik secara luas dalam hal penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pembangunan di Kabupaten Pohuwato.

6.5. Pembiayaan Pembangunan

Upaya untuk mewujudkan Pohuwato Maju, Mandiri, Harmonis, SDA Bernilai Tambah, Berkelanjutan, SDM Handal dan Religius di Tahun 2045 sekaligus mendukung Indonesia Emas 2045, maka memerlukan pembiayaan program yang memadai dan berkesinambungan. Oleh sebab itu, peningkatan pembiayaan bersifat inovatif, berupa perluasan sumber-sumber pembiayaan di luar APBN/APBD, penerapan skema yang baru, seperti KPBU, Obligasi Daerah, hibah internasional. Selain itu optimalisasi pemanfaatan aset-aset milik Pemda untuk penyewaan dan pengelolaan pihak ketiga hingga optimalisasi peran sektor keuangan, seperti pembiayaan produk Syariah dan dana pensiun.

Keberhasilan implementasi RPJPD Kabupaten Pohuwato periode 2025 – 2045 sangat dipengaruhi oleh komitmen seluruh masyarakat, pemangku kepentingan dan penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato. Dalam kerangka tersebut sangat diperlukan sinergi, kolaborasi dan konsistensi guna

terwujudnya ---**Pohuwato yang Maju, Mandiri, Harmonis Berbasis SDA Bernilai Tambah dan Berkelanjutan yang Ditunjang SDM Handal Berlandaskan Nilai-Nilai Religius---** di tahun 2045.

Marisa, April 2024

Bupati Pohuwato

Saeful Mbuinga